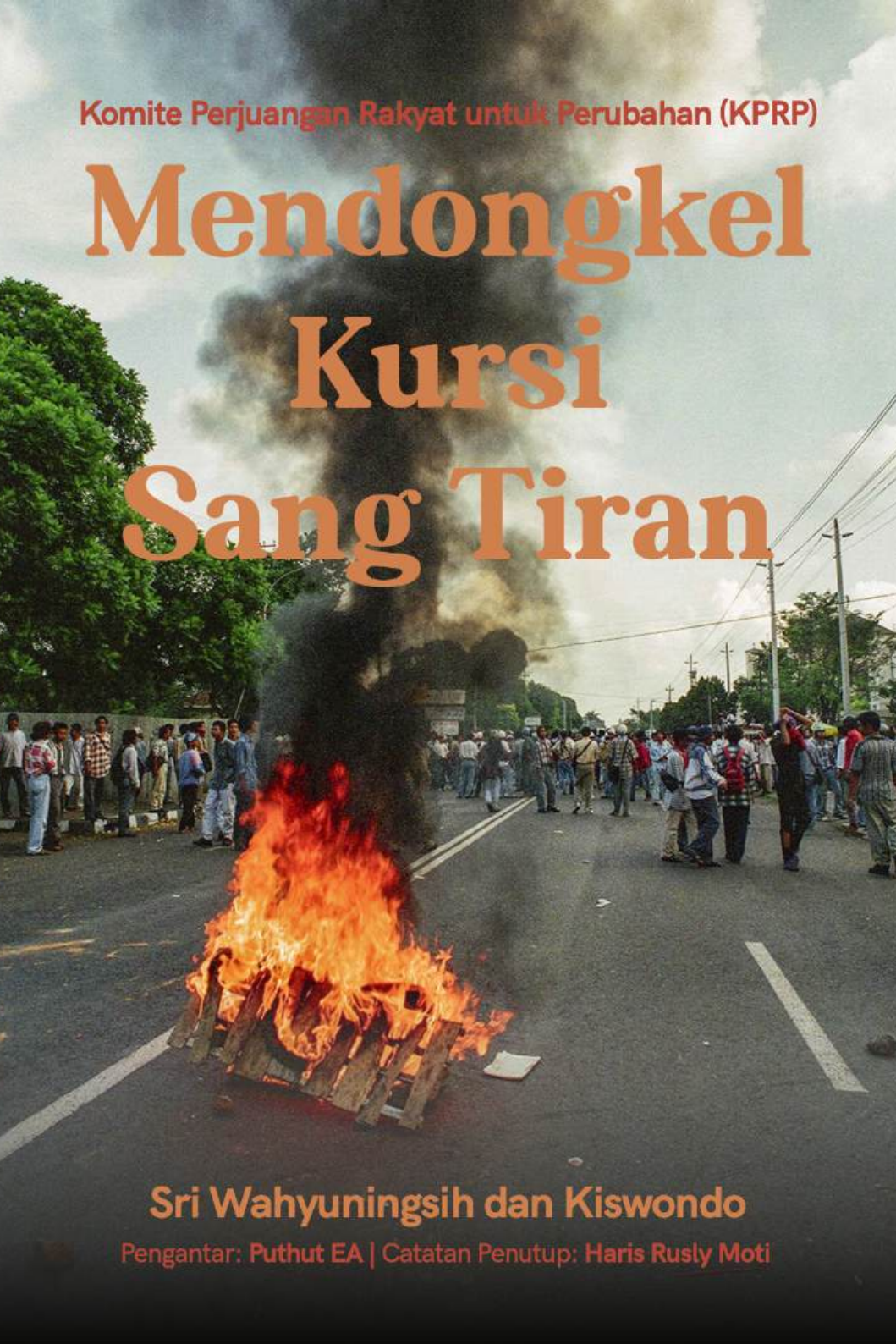


Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP)

Mendongkel Kursi Sang Tiran



Sri Wahyuningsih dan Kiswondo

Pengantar: Puthut EA | Catatan Penutup: Haris Rusly Moti

Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP)

Mendongkel Kursi Sang Tiran

**KOMITE PERJUANGAN RAKYAT
UNTUK PERUBAHAN (KPRP):
MENDONGKEL KURSI SANG TIRAN**

© Sri Wahyuningsih dan Kiswondo, 2025

Penyunting: A.S. Rimbawana

Foto sampul: Dwi Oblo

Penata isi dan sampul: M. Sadam Husaen

Cetakan pertama, Mei 2025

x + 183 halaman

14 x 21 cm

ISBN 978-623-10-9368-4

Diterbitkan oleh:



KOLOFON

Buku Mojok Grup

Drono Gang Elang 6E No. 8,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
D.I. Yogyakarta 55581

🐦 📘 📷 @kolofonmedia

✉ kolofonmedia@gmail.com

Daftar ISI

	<i>Pengantar:</i>
iv	Keberanian Itu Entah Datang dari Mana
X	Pengantar Penulis
4	Palagan
18	Memecah Budaya Bisu
42	Kelahiran KPRP
130	Setelah Sang Tiran Tumbang
158	Dari KPRP menuju LMND
	<i>Catatan Penutup:</i>
164	Kita adalah Generasi yang Beruntung Punya “Cerita”
170	Lini Masa KPRP
171	Sumber
174	Index

Pengantar: Keberanian Itu Entah Datang dari Mana

Puthut EA

iv





► Sesosok patung dengan kepala tertempel muka Soeharto tengah diarak oleh massa aksi, 11 Maret 1998. *Sumber: Dwi Oblo.*



ika saya bertemu dengan para aktivis '98, dan saya ajukan pertanyaan, "Jika waktu bisa diulang, apakah akan jadi aktivis?"

Hampir semua yang pernah saya tanya, menjawab: tidak. Seolah mereka bersepakat bahwa apa yang telah mereka lakukan di tahun-tahun berbahaya itu sebetulnya memang terlalu berisiko. Tapi entah karena dorongan apa, mereka memiliki keberanian di luar takaran.

Saya kira, saya pun termasuk dalam golongan itu. Kalau saya ingat semenjak mulai terlibat sebagai peserta mogok makan di Fakultas Filsafat UGM, usia saya adalah misteri yang pendek. Saya tidak tahu nasib esok hari. Setiap saya bangun tidur, hal pertama yang saya sadari: saya masih hidup.

Hari-hari dalam kecemasan dan ketegangan, apalagi jika senja angslup di Fakultas Filsafat, apalagi jika yang sedang menjaga kami tak begitu banyak orang, kekhawatiran saya dkk 'diambil' oleh pihak penguasa atau diserang oleh preman selalu seperti sebilah pisau yang diletakkan di leher.

Tapi pada akhirnya, saya sadar, ketakutan itu harus dihadapi. Keberanian harus ditumbuhkan. Maka, jiwa korsia, suntikan 'ideologi', nyanyian dan puisi tentang keberanian seperti karya-karya Wiji Thukul, WS Rendra, Pramoedya Ananta Toer dll, menjadi penting. Lagu-lagu perjuangan yang dibuat oleh para senior kami, menjadi begitu magis. Semua seperti dipersatukan bukan hanya cita-cita demokrasi, tapi juga masa depan yang tak pasti.

Namun, sekalipun jika disuruh mengulang hidup di zaman itu belum tentu berani melakukan hal yang sama, saya tidak pernah merasa menyesal menjadi aktivis '98. Bahwa kuliah saya kemudian terbengkalai (walaupun akhirnya lulus juga), walaupun saat Reformasi usai, saya bingung mau kerja apa, tetap saja pengalaman itu mahal harganya, dan membangun beberapa nilai penting yang berguna bagi saya di kehidupan selanjutnya.

Pertama, keberanian mengambil risiko. Sepertinya, risiko-risiko di kehidupan saya setelah Reformasi tergolong berat, tapi karena saya pernah mengalami kondisi yang lebih berat dari itu, semua seolah masih bisa tertanggungkan.

Kedua, kerja tim. Di saat penuh pergolakan dan risiko, satu-satunya yang bisa kita percaya adalah tim kita. Semua bekerja saling mengisi. Tidak ada yang merasa jadi bos. Kalau saatnya mau demonstrasi ya semua orang bikin perangkat aksi. Tidak peduli level pimpinan, jika saatnya ngecat spanduk ya ikut ngecat. Saat ditunjuk jadi pimpinan aksi ya siap. Saat diminta jadi tim keamanan ya siap juga. Karena semua juga seperti itu. Tidak ada privilese terhadap satu atau dua orang. Jabatan di struktur organisasi bukan berarti tidak bekerja hanya di bidang itu saja.

Ketiga, karena saya ditunjuk jadi kepala departemen Pendidikan dan Propaganda, maka mau tidak mau ya harus menulis. Kelak bahkan dalam pendidikan dan rapat-rapat penting, saya harus membuat makalah dan silabus pendidikan. Dan semua ilmu itu kelak berguna, bahkan sampai sekarang.

Itu sedikit dari sekian saripati yang bisa saya dapatkan ketika menjadi aktivis '98.

Tapi ketika kemudian saya ditunjuk jadi Sekjen dan kemudian jadi ketua KPRP, kemampuan saya mesti diuji lebih tinggi lagi. Kemampuan melakukan manajemen tim, membuat keputusan politik, menyelesaikan konflik, lebih disiplin dalam soal waktu, dan mengatasi rasa bosan dalam tekanan. Energi rasanya terkuras habis. Masalah selalu datang. Satu masalah selesai, dua masalah datang. Begitu terus. Capek. Tapi ya harus dilakoni, karena itu persoalan tanggungjawab.

Maka ketika tahapan hidup saya berubah, mentalitas seperti itu bertahan di diri saya. Sampai sekarang, naluri menjadi pemimpin, disiplin dalam bekerja, seolah sudah menyatu dalam denyut nadi.



kut menjadi bagian dari penggarapan buku ini, membuat ada banyak memori yang sudah tertimbun, mendadak menyeruak lagi. Ingatan-ingatan berkelebat. Penggalan-penggalan kisah, nongol lagi. Saya merasa ada di sebuah ambang, antara rasa bangga sekaligus melankolia.

Bangga pada apa yang sudah sama-sama kami kerjakan di masa lalu sebagai anggaplah ‘tugas sejarah’. Tapi juga semacam melankolia, karena perlahan apa yang dulu kami perjuangkan tak sampai pada paripurna. Kalau mau jujur, banyak agenda Reformasi yang bukan hanya terinterupsi, tapi juga bisa mengarah ke arus balik. Tentu pemikiran semacam ini perlu direfleksikan dan bisa diperdebatkan. Namun itulah yang saya rasakan. Tapi setiap perasaan itu datang, saya berusaha menepisnya. Mungkin saatnya, tugas sejarah ini dipanggul oleh anak-anak muda Indonesia. Generasi yang lebih segar dari saya. Karena setiap zaman punya napasnya.

Buku ini, bisa jadi adalah sebuah memoar kolektif. Hal yang tidak mudah dikerjakan. KPRP itu pernah berada di fase emas, di mana ratusan orang terlibat di dalamnya. Tentu setiap orang punya cerita dan refleksi masing-masing, termasuk memutuskan mana yang harus diingat dan mana yang harus dilupakan.

Di sinilah letak kesulitan penyusunan buku ini, sekaligus tantangan bagi kedua penulisnya. Namanya juga buku, tidak mungkin semua hal terakomodasi. Tidak semua bisa distrukturkan dengan mudah menjadi bab per bab, hingga kalimat demi kalimat. Tapi saya kira, saya harus mengapresiasi kedua penulis sekaligus penyunting buku ini.

Kami juga tidak terlalu beruntung. Sebetulnya, dokumen organisasi kami ini nisbi lengkap karena sejak awal ada beberapa orang yang mendokumentasikannya, dan sebagai organisasi besar di saat itu, banyak diliput oleh media di dalam dan di luar negeri. Namun mengumpulkan itu semua, adalah ikhtiar yang tidak

mudah. Apalagi harus disadari, Mei '98 adalah hajatan banyak orang. Apalagi setelah semua media lalu fokus pada Jakarta sebagai titik penting, mengingat episentrum pergulatan politik memang terjadi di sana, walaupun mereka bukan yang memulainya.

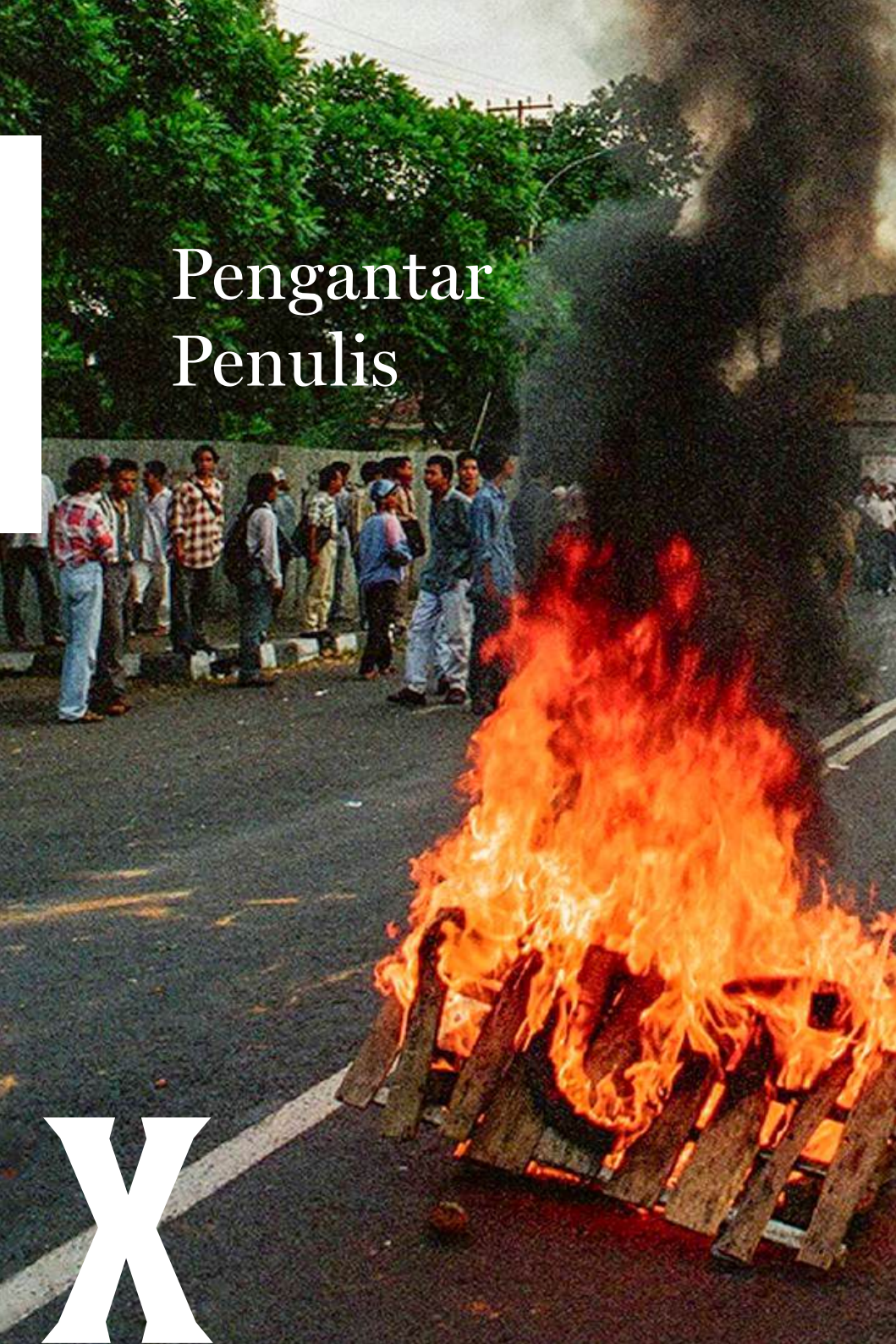
Media mungkin tidak bisa menangkap keresahan kami ketika Soeharto akhirnya menyatakan mundur. Semua penuh euforia. Di Jakarta, kemenangan itu dirayakan dengan gegap gempita. Di Yogya bahkan banyak aktivis yang cukur gondul. Tapi yang terjadi di KPRP justru ada rasa sendu. Karena kami menyadari, ke depan, persoalan menjadi lebih rumit. Kami belum sempat merumuskan apa yang akan dilakukan jika Soeharto jatuh. Dalam bahasa yang lebih vulgar: Soeharto jatuh terlalu cepat, di luar perkiraan kami.

Berikutnya adalah kisah-kisah perjuangan organisasi di babak selanjutnya yang tidak mudah, yang bisa Anda baca di buku ini.

Buku ini selain sebagai sebuah upaya dokumentasi, juga menjadi semacam pengingat bagi siapapun. Politik tidak pernah sederhana. Ia terlalu rumit. Variabelnya terlalu banyak. Maka dari puluhan bahkan ratusan orang yang pernah jadi aktivis di dalamnya, hanya sedikit sekali yang tetap berada di jalur politik. Tidak semua aktivis ternyata bisa menjadi politikus.

Namun pengalaman memang mahal harganya. Ia tumbuh di diri kami dengan segala rimbun dan cabangnya. Mengenanginya saja, bisa jadi adalah sebuah tamasya ke masa lalu. Syukur jika bisa menghasilkan bulir-bulir bernas, yang bisa dikaji dan dipelajari oleh generasi setelah kami. Semoga.

Yogya, 2 Mei 2025



Pengantar Penulis

X



► Aksi 13 Mei 1998 di Perempatan Mirota. Sumber: Dwi Oblo.



Buku Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP): Mendongkel Kursi Sang Tiran ini merupakan usaha untuk memaknai dan melacak kembali kiprah Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Komite ini lahir pada 1998 di UGM, Yogyakarta, dalam gempita aksi massa menuntut kediktatoran rezim otoritarian Orde Baru berakhir. Fokus temporal buku ini adalah kurun 1996–1999, dimulai setelah peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta dan berakhir pada 1999 kala KPRP berubah menjadi organisasi lain, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND). Bahan penyusun buku ini merupakan narasi kesaksian berdasar ingatan para inisiator dan partisipan KPRP, serta para jejaring dekat maupun jauh. Maka itu, kami amat berterima kasih atas kesediaan para narasumber membagikan kisahanya selama proses penyusunan buku ini. Selain itu, data-data ditunjang lewat dokumentasi media cetak, audio-visual, buku, jurnal, majalah, surat kabar, selebaran, internet, maupun dokumentasi lainnya yang masih memungkinkan kami dapatkan. Sayang, dokumentasi tertulis berupa notulensi rapat, arsip keorganisasian, video-video, serta foto-foto KPRP banyak yang tak terselamatkan. Meski begitu, Femi Adiningsih, salah satu anggota Gabungan Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI), jejaring KPRP pada 1998, memiliki dokumentasi yang lumayan lengkap tentang KPRP: kliping koran, selebaran, pamflet terbitan KPRP dan organ sekawan lainnya. Namun, Femi meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, 9 Mei 2012. Pun, kami tidak bisa mengakses dokumentasi pribadinya, karena kehilangan kontak satu-satunya dengan sang kakak. Ada pula dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga atau kelompok lain, tapi belum bisa kami akses selama proses penulisan ini. Karena itu, kelemahan pasti diidap narasi berdasar ingatan semacam ini. Bila seandainya ada versi narasi dan penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa, pembaca yang menentukan keabsahannya dengan terang kritisisme.

Peristiwa diingat dan ditafsir sudah tidak mungkin berubah lagi, tetapi orang yang mengingat dan menafsirnya sudah berubah dan berkembang –pengetahuan, pemahaman dan pandangan politik serta ideologi— berdasarkan perjalanan waktu pembentukan kesadaran intelektualitasnya. Oleh karena itu, menarasikan ingatan masa lalu adalah menafsirkan ulang kejadian di masa lalu dengan terang pemahaman dan pengetahuan kekinianya. Menarasikan masa lalu adalah juga bermakna menempatkan posisi diri dan kelompok dalam tafsiran atas ingatan itu sendiri. Jarak waktu yang terentang lebih dari 25 tahun memungkinkan orang dan para pelaku atau partisipan KPRP menimbang ulang pemahamannya atas tindakan di masa lalu yang dilakukannya. Dengan memberikan pemaknaan baru yang lebih logis dan rasional, berdasarkan pertumbuhan pengetahuan dan pencapaian pertumbuhan intelektualitas dan kematangan kesadaran dirinya. Itu semua yang harus jadi pegangan kami sewaktu menuliskan refleksi ini.

Ada dua hal yang perlu penting dikemukakan berkait KPRP. *Pertama*, konteks sosial-politik Indonesia untuk memberikan gambaran besarnya, dan kemudian Yogyakarta pada sekitar 1996–1999; dan *kedua*, ekosistem macam apa yang memungkinkan muncul dan berkembangnya KPRP. Himpunan yang akan kita narasikan itu sendiri, yakni kondisi subjektif KPRP itu sendiri beserta dengan segala sepak terjang dan aktivitasnya dalam merespons tantangan terhadap kondisi objektif yang ada, guna mengubah realitas sosial politik yang ada di tengah-tengah masyarakat, yakni kediktatoran tersebut beserta segala dampak negatifnya.

Lalu, apakah KPRP itu, bagaimana terbentuknya, apa yang dikerjakan dan bagaimana pula cara mengerjakannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang berupaya kami sajikan dalam bab-bab berikut.

Palagan



4



► Suasana Aksi Panggung KPRP. Sumber: Dwi Oblo.



ua pekan jelang Soeharto lengser. Malam itu, 5 Mei 1998, suasana mencekam di Gejayan —seruas jalan yang membentang dari utara ke selatan, membelah kawasan kampus paling padat di Sleman, Yogyakarta. Sejak pagi, terjadi aksi demonstrasi merespons situasi politik saat itu yang dilakukan mahasiswa Universitas Sanata Dharma (USD). Aparat juga tampak ketat berjaga. Menjelang petang, panitia aksi USD telah mengakhiri aksi. Namun massa aksi bergeming, bahkan hingga membakar ban. Melihat kondisi memanas, Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), organisasi yang dimulai dari sebuah aksi mogok makan di UGM pada 1998, mengambil alih kendali massa.

Sastro Gempur, organ KPRP yang hampir selalu siap saban aksi demonstrasi, diturunkan. Tak lama kemudian, bentrok antara aparat-massa tak terelakkan. Bentrok segera meluas, hingga areal IKIP yang tak jauh dari episentrum aksi. Dalam keadaan kaos, Sastro Gempur menggunakan segala peralatan yang ada untuk bertahan. Berbagai material untuk renovasi masjid IKIP Yogyakarta, seperti bambu, kayu dan material lain, juga dipasang melintang untuk menghambat laju aparat. Di belakang barikade, sudah bersiap tiga lapis pasukan pelempar batu, molotov, dan ketapel. Sementara jauh di depan, ditempatkan dua orang pengintai. Tugas mereka memberi kode bila ada pergerakan.

Dentum tiang listrik bertalu, tanda dari pengintai agar massa waspada. Begitu barisan polisi bertameng tampak bergerak menuju arah massa, suasana langsung tegang. Berjarak 20an meter, barisan massa-aparat terdiam, tegang. Hingga lemparan molotov dari arah Sastro Gempur meledak di udara, disusul sepasukan aparat merangsek tak beraturan, merusak barikade massa. Massa dipukul mundur hingga lari ke perumahan-perumahan di Karangmalang, areal perkampungan di utara IKIP.

Sesekali terdengar teriakan dari dalam rumah penduduk ucapan selamat berjuang. Tanda bila aksi massa juga direspon warga.

Itulah salah satu gambaran demonstrasi terlama yang pernah tercatat di Yogyakarta. Kelak, peristiwa itu dikenang sebagai “Gejayan Kelabu”, sebab tak hanya meninggalkan jalanan yang porak-poranda, tetapi juga menewaskan seorang korban jiwa. Ini bukanlah aksi-aksi reaksioner, tapi rakyat memang jengah dengan kepemimpinan Tiran Soeharto. Apa yang sesungguhnya mereka lawan?

Istilah Orde Baru secara umum merujuk pada sistem politik yang berlaku setelah Soeharto berkuasa pada 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Istilah ini pertama digunakan untuk merujuk koalisi pembentuknya: militer, mahasiswa, intelektual, dan Muslim yang menentang Sukarno serta Partai Komunis Indonesia (PKI). Sistem politik ini bermula dengan berusaha membersihkan Indonesia dari pengaruh golongan kiri pada 1965. Ciri lainnya adalah kebijakan luar negeri yang amat antikomunis, mendukung stabilitas ekonomi yang mengacu pada stabilitas politik, serta atas nama pembangunan menindas kelompok tertentu —terutama rakyat. Lalu apa yang membuat resim ini berkuasa begitu lama —selama tiga puluh dua tahun? Dalam artikel “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokrasi” (1996) Pratikno menyebutkan paling tidak ada empat hal: represi fisik dan hukum; klientelisme ekonomi; wacana politik partikular yang mendukung otoritarianisme; dan pengembangan korporatisme negara.¹

¹ Pratikno, 1996, “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokrasi” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, JSP, Vol. 2, No. 2, November 1998, <https://media.neliti.com/media/publications/37587-none-e49fe060.pdf> (Diakses, 24-3-2021). Lihat juga pula lema “Orde Baru” dalam Audrey dan Robert, 2012, *Kamus Sejarah Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, hal. 335; juga Dhanita Kusuma Pertiwi, 2021, *Mengenal Orde Baru*, Yogyakarta: EA Books. Hal. 372.

Pertama, represi fisik². Pada awal kekuasaan Orde Baru, represi fisik dijalankan guna menghancurkan struktur dan formasi politik yang menopang kekuasaan Sukarno. Soeharto menggunakan struktur militer sebagai institusi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya. Namun, sejak 1980 Soeharto mengumpulkan kekuasaan mutlak di tangannya sendiri sebagai kepemimpinan personal.³ Represi fisik ini masih diperkuat dengan operasi represi hukum yang dijalankan melalui pembentukan berbagai badan untuk mengawasi aktivitas politik. Belum lagi diperkuat dengan pasal karet UU Anti-subversi (UU No. 5/1969) untuk menjerat lawan-lawan politik.

Kedua, klientelisme ekonomi yang diciptakan dengan cara memberikan suap (*money politics*) untuk menciptakan sekutu elitnya agar bersedia menjadi pendukung kekuasaan.⁴ Kesetiaan dan dukungan ini dibayar dengan sogokan ekonomi. Pembiayaan diambil dari dana *oil booming*, investasi asing, sumber daya ekonomi nasional, serta sumber daya alam yang melimpah. Sekutu elite sipil ini perlu diciptakan karena kekuasaan pemerintah hanya ditopang kekuatan militer yang kurang mendapatkan dukungan masyarakat. Walaupun mengakibatkan kerugian negara di berbagai bidang –ekonomi, budaya, lingkungan— strategi ini terbukti telah menjadi salah satu instrumen ampuh bagi pemerintah Orde Baru demi membangun loyalitas elite politik sipil.⁵

Ketiga, mengembangkan wacana politik partikular dengan tujuan memberikan tafsir dan pembenaran-pembenaran kepemimpinan yang hegemonik.⁶ Rezim ini, dalam pandangan Pratikno, menggunakan politik represi (*management of fear*), dan klientelisme ekonomi adalah mekanisme kontrol terhadap

² Pratikno, *Ibid.*, Hal. 20.

³ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 21.

⁴ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 21-22.

⁵ Pratikno, *Op. Cit.* Hal. 22.

⁶ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 23–24.

perilaku politik, dan politik wacana digunakan untuk melakukan mekanisme kontrol terhadap persepsi dan pola pikir partisipan politik. Rezim juga mengeksplorasi dan mengelaborasi “bahasa baru” —seperti “Pancasila Sakti”, “Pembangunan Nasional”, dibutuhkan “Stabilitas Politik” dan “Integrasi Nasional”, “Demi Kesatuan Persatuan”, “Demi NKRI”, “*Jer Basuki Mawa Bea*” (Baca: pembangunan menuntut pengorbanan dari rakyat). Atas nama ‘pembangunan’ pemerintah memaksa rakyat merelakan lahan miliknya ditukar dengan ganti rugi murah. Bila tetap melawan tinggal tempelkan stigma “pembangkang” atau “sisa-sisa PKI”. ‘Stabilitas politik’ menjadi frasa sakti, yang bisa digunakan untuk kepentingan membubarkan diskusi, seminar, rapat dan demonstrasi yang dianggap mengancam kekuasaan rezim. Atas nama integrasi nasional, pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan proyek sampai ke tingkat desa. Dengan menggunakan narasi-narasi kegagalan demokrasi liberal pada 1950an, rakyat didorong membenci demokrasi ‘Barat’.⁷

Keempat, jaringan korporatisme. Melalui jaringan ini, negara ‘menyalurkan’ partisipasi masyarakat menjadi mobilisasi politik yang terkontrol.⁸ Dalam sistem Orde Baru, hanya boleh berdiri lembaga tunggal yang mesti taat pada aturan yang dibuat pemerintah, semua harus menerapkan asas atau tunggal, yakni Pancasila. Organisasi ini ke dalam memiliki kekuatan kontrol yang kuat terhadap anggotanya, dan secara ideologis-politis rentan diintervensi atau dikooptasi oleh negara. Demokrasi pun dikemas dengan retorika Pancasila —demokrasi Pancasila— yang diterapkan dalam sistem politik Indonesia, mengerucut menjadi rezim otoriter dan penuh represi. Demokrasi palsu ini pula yang dijalankan untuk menghabisi Soekarnoisme, nasionalis populis, sosialisme dan komunisme (bahkan sosial-demokrasi, Islam dan

⁷ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 24.

⁸ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 25.

sosialisme Islam). Daya kritis masyarakat diberangus dan oposisi dibabat habis hingga akar rumput.

Ketika kepentingan rezim dan para pendukungnya terancam serangan kritik, maka standar ganda budaya sisa-sisa feodalisme dimanfaatkan untuk mengamankan kekuasaan. Retorika seperti “budaya Timur adiluhung”; *mikul dhuwur, mendhem jero* yang berarti “tidak boleh mengkritik pimpinan” —merujuk kepada Soeharto; “HAM tidak cocok dengan budaya kita”; “voting tidak sesuai dengan budaya kita yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat” —dst. Retorika budaya ini direproduksi dan digunakan membela kepentingan kekuasaan. Sementara itu, budaya lokal kerakyatan dikerdilkan untuk semata-mata hanya dijadikan barang komoditas turisme. Rezim melakukan politik dengan cara “berpolitik yang seolah-olah tanpa politik”. Rakyat ditakut-takuti agar tidak berpolitik, hanya rezim yang boleh melakukannya. Politik itu kotor, politik itu kejam, karena itu hindarilah politik. Padahal siapa yang berpolitik dengan kejam? Guna menjalankan strategi politiknya ini, rezim Orde Baru harus ditopang oleh formasi masyarakat yang didirikan di atas lima pilar utama kekuasaan. Kelimanya yaitu: Undang-undang Politik, Asas Tunggal Pancasila, UU Partai Politik yang hanya membolehkan dua partai politik dan satu Golongan Karya, pengaturan pemilu, dan Dwifungsi ABRI⁹.

⁹ Ini adalah doktrin Angkatan Bersenjata Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (Soekarno) dan Orde Baru. Doktrin ini menyatakan fungsi militer bukan pertahanan nasional semata, melainkan juga berpartisipasi dalam urusan politik. Struktur teritorial Angkatan Darat amat membantu doktrin ini. Doktrin ini secara formal lepas dari militer pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Lihat lenma “dwifungsi” dalam Kahin dan Cribb, 2012, *Kamus Sejarah Indonesia*. Hal. 123. —*peny.*



ada 1974, meletuslah demonstrasi berujung kerusuhan pertama pada masa Orde Baru. Peristiwa itu acap disebut Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) – merujuk pada demonstrasi mahasiswa pada 15–16 Januari 1974. Tuntutan utama demonstrasi itu adalah penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Peristiwa ini dipandang sebagai tantangan besar perdana bagi Orde Baru. Demonstrasi itu dimotori oleh mahasiswa yang telah menghimpun kekuatan melawan Orde Baru sejak 1970an. Hasilnya, Hariman Siregar dan seorang dosen Syahrir –keduanya dari UI— diadili dan diputus bersalah dengan dakwaan mendorong kericuhan. Buntut dari peristiwa itu antara lain enam surat kabar nasional dibredel, dan Daoed Joesoef diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan –kelak tugasnya adalah mendepolitisasi kampus.

Empat tahun berselang, 1978, muncul lagi demonstrasi di Bandung dan Jakarta. Dewan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi MPR. Mereka menolak Soeharto sebagai presiden dan memintanya mundur. Tak butuh waktu lama, pemerintah membekukan dan membubarkan Dewan Mahasiswa di seluruh perguruan tinggi. Tindakan itu diperkuat SK Menteri Pendidikan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus yang dibuat Menteri Daoed Joesoef. Surat Keputusan ini wujud dari pengaturan kampus, yang pada akhirnya, juga menghancurkan gerakan mahasiswa pada 1974 dan 1978. Para teknokrat dan intelektual Orde Baru tahu betul bahwa sebagian dari mereka turut menjatuhkan pemerintahan Sukarno dengan melibatkan gerakan mahasiswa. Maka mereka berusaha mengendalikan –bahkan memberangus— gerakan mahasiswa dan kebebasan akademis di kampus. Dengan retorika mahasiswa harus mengembangkan

diri menjadi intelektual di bidang studinya masing-masing, kampus dibuat menjadi “menara gading”. Lantas kampus diceraikan dari kepedulian dan kepekaan sosial.

Namun, perlawanan selalu menemukan celah. Setelah gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 dihancurkan, kampus relatif steril dari kritik sosial dan gerakan (politik) mahasiswa. Kelak para sebagian aktivis gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 bertransformasi menjadi anggota Organisasi Non Pemerintah (Ornop), cikal bakal NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat. Ornop ini melakukan pendampingan ke masyarakat dengan pendekatan program-program kemandirian masyarakat, mulai dari akhir 1970an hingga mengalami kemajuan akhir 1990an akhir. Di samping ornop, pada akhir 1980an, muncul berbagai kelompok studi mahasiswa. Mereka melakukan diskusi intensif mengenai ilmu-ilmu sosial kritis, teori-teori studi pembangunan —semacam teori ketergantungan, pendidikan sebagai praktek pembebasan, filsafat kritis dan pembebasan, teori budaya dan sastra alternatif. Selain itu, mereka juga perlahan-lahan mempersoalkan dampak buruk dari program pembangunan dan ekses negatif pembangunan, seperti korupsi, kemiskinan struktural, tingginya angka pengangguran, penggusuran tanah rakyat untuk pembangunan, dan sebagainya. Kelompok ini lekas jadi wadah menempa intelektualitas dan kepekaan sosial para mahasiswa saat itu.

Berbeda dengan situasi pada dekade sebelumnya, pada 1990an kekerasan aparat keamanan juga tidak bisa lagi dilakukan secara terbuka. Saat itu, pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu penting di tingkat global untuk melawan sistem politik otoriter. Sementara, di kalangan ornop, karena tersedia donor melimpah dari negara-negara Eropa dan Amerika, mereka juga mulai mengalihkan isu-isunya pada penegakkan HAM. Aktivisme politik di kalangan kampus, baik mahasiswa maupun kelompok intelektual, mulai bangkit kembali mendobrak NKK/BKK yang

mengerangkeng dunia kampus. Akibatnya wacana tanding untuk melawan otoritarianisme penguasa Orde Baru kembali menguat.¹⁰ Kondisi ini menguat bersamaan dengan tumbuhnya gerakan mahasiswa, NGO dan rakyat di akar rumput.

Di Yogyakarta jelang 1990an juga muncul Kelompok Studi Sosial Palagan Yogyakarta (KSSPY), yang mendiskusikan teori kritis dan persoalan masyarakat.¹¹ Kelompok ini segera berhadapan dengan otoritas negara. Tiga orang aktivisnya ditangkap, diadili dan dipenjarakan dengan tuduhan menjual buku terlarang karya Pramoedya Ananta Toer dan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxis-Leninisme. Ketiga Mahasiswa itu adalah Bambang Subono, Bambang Isti Nugroho, dan Bonar Tigor Naipospos. Sejak mereka ditangkap, gerakan mahasiswa mulai menggeliat di Yogyakarta. Aksi-aksi Mahasiswa mulai marak dengan isu solidaritas terhadap kasus penangkapan dan pemenjaraan ketiga aktivis ini. Kemudian berkembang menjadi aksi-aksi menolak kebijakan kampus yang tidak demokratis; menuntut kebebasan mimbar akademik, menuntut hak-hak mahasiswa dan menolak NKK-BKK. Aksi-aksi mahasiswa berkembang menjadi aksi solidaritas menolak penggusuran pedagang kaki lima, solidaritas terhadap rakyat yang lahannya dirampas. Masa ini ditandai dengan lahirnya Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), yang merupakan gabungan dari mahasiswa dari kampus UGM, IAIN, ISI, UKDW, Universitas Janabadra, UII, dll. FKMY ini kemudian pecah menjadi Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) dan Serikat Mahasiswa Yogyakarta (SMY). Sementara itu, aksi massa besar di Yogyakarta paling tidak terjadi tiga kali. *Pertama*, aksi menolak Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB), aksi ini diselenggarakan gabungan aktivis dan aktivis pers kampus

¹⁰ Pratikno, *Op. Cit.*, Hal. 26.

¹¹ Cintya Faliana dan Sanya Dinda, "Mahasiwa di Balik Trali Besi" dalam www.balairungpress.com/2018/05/mahasiswa-di-balik-terali-besi/. Diakses 27 April 2021.

UGM melibatkan mahasiswa dan masyarakat, yang waktu itu sempat ditemani Rektor UGM Prof. Dr Koesnadi Hardjasoemantri waktu audiensi dengan DPRD DIY. Aksi ini berhasil membuat SDSB akhirnya dihentikan; *Kedua*, penolakan pembongkaran Seni Sono selama satu bulan. Aksi ini diselenggarakan oleh FKMY bekerja sama dengan para pekerja seni-budaya Yogyakarta; *Ketiga*, aksi menolak Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 Tahun 1991, aksi ini diadakan oleh SMY. Dalam aksi ini Aji Kusumo (Filsafat UGM, 1985) anggota Komite Mahasiswa UGM – Komite Pembelaan Mahasiswa UGM, melakukan aksi mogok makan di tenda yang didirikan di halaman Gedung Seni Sono, (kini jadi bagian Gedung Agung, Yogyakarta). Aksi menolak UUL ini disambut luas oleh masyarakat dan mampu menggerakkan buruh transportasi angkutan umum di Yogyakarta untuk mogok.

Ada pula gerakan mahasiswa yang semakin sporadis mengorganisir dan mengadvokasi persoalan buruh seputar hak bersuara, berserikat, berkumpul dan politik buruh. Gerakan mahasiswa sudah mulai menyentuh persoalan nyata ketertindasan masyarakat kelas bawah, petani, ekonomi sektor informal, dan membela hak-hak buruh. Selain itu gerakan mahasiswa mengalami percabangan, antara gerakan mahasiswa sebagai sebatas gerakan moral –yang hanya mengkritisi penyimpangan pembangunan—ataukah harus memposisikan diri menjadi gerakan politik, yang sudah makin mengarah ke usaha menentang kediktatoran rezim Orde Baru —tipologi gerakan ini juga segera akan kita jumpai pada 1998.

Nyatanya, sampai dengan paruh akhir 1990an, gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik makin menguat, ditandai dengan terbentuknya Perserikatan Rakyat Demokratik (PRD), yang merupakan pengerucutan dari gerakan politik mahasiswa. PRD berawal dari komite-komite mahasiswa di Yogyakarta pada 1994, lantas menyebar di berbagai universitas lain. Semula

mengambil bentuk perserikatan, lalu pada Juli 1996 berubah nama menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Profil mahasiswa merangkak naik setelah para aktivis bersekutu dan membentuk PRD. Tujuan partai oposisi Orde Baru ini adalah untuk memperluas struktur demokratis yang tak terbatas hanya pada politik, tapi juga ekonomi dan budaya. Namun, pembentukan partai ini dilakukan pada saat membangun sebuah partai politik—bukan hanya subversif—tapi juga ilegal. Maka itu, pembentukan PRD pada 1996 termasuk menantang rezim. Pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) ketika kantor PDI diserang massa, PRD segera dikambinghitamkan. Mereka dituduh sebagai dalang dan lekas jadi organisasi terlarang. Tiga belas aktivisnya ditangkap, dan simpatisannya jadi buron—beberapa dari mereka berada di UGM, yang sebentar lagi akan kita bahas. Padahal, Kudatuli dipicu oleh dominasi Golkar pada pemilu nasional. Pada 1973, Orde Baru menyederhanakan berbagai politik menjadi dua partai, PPP dan PDI. Dua partai ini harus melawan Golkar yang biasanya selalu memenangi tiap pemilu. Dalam pemilu 1987, Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai perwakilan PDI. Kampanye itu berhasil hingga 1993. Usai itu muncul faksi lain dalam tubuh PDI: faksi Megawati dan faksi Soerjadi, ketua PDI sebelumnya. Juni 1996, konflik pecah saat PDI berkongres di Medan. Saat itu pendukung Megawati menolak Soerjadi menjadi ketua lagi. Buntutnya, massa pendukung Megawati menduduki kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Massa pendukung Soerjadi lantas berbondong-bondong mengepung kantor itu. Kelak, gerombolan itu diketahui oleh dimobilisasi oleh rezim yang berkuasa

Aktivis PRD dan berbagai jejaring organisasi massa saat itu—seperti SMID, STN, PPBI, Jakker dan SPRIM—jadi buron. Perburuan dan penangkapan hingga di Yogyakarta. Para aktivis di Yogyakarta sebagian pun menyelamatkan diri. Namun tidak seperti di Jakarta dan Surabaya, para aktivis yang tertangkap

di Yogyakarta tak ditahan lama dan tak sampai diproses di pengadilan. Setelah disiksa oleh aparat, kebanyakan dari mereka dibebaskan. Situasi ini menuai ragam sikap dari para aktivis yang berjejaring dengan PRD. Sebagian menyalahkan PRD, sebab menilai program dan tuntutan partai ini terlalu maju dan saat situasi kian represif mereka ikut terimbas—diburu, ditangkap, juga mendapat siksaan. Sebagian lainnya justru berusaha mengonsolidasi diri di bawah tanah untuk mencegah moral yang ambruk dan berusaha menata gerak agar perlawanan berlanjut. Situasi itu cukup memukul dunia gerakan mahasiswa.

Belum lagi setelah Soeharto dilantik pada 11 Maret 1998. Rezim merasa mendapatkan tenaga dan kepercayaan diri lagi sehingga pada 12 Maret 1998, beberapa aktivis PRD: Faisol Reza, Herman Hendrawan, Raharja Waluya Jati, dihilangkan secara paksa usai menghadiri konferensi pers Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jl Diponegoro, Jakarta, yang menolak pelantikan Soeharto. Esoknya sejumlah aktivis PRD lainnya kembali diculik. Bimo Petrus dan Herman Hendrawan (Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya) dihilangkan secara paksa. Suyat (Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta), Aan Rusdianto (Mahasiswa Universitas Diponegoro), Mugiyanto dan Nezar Patria (Mahasiswa Universitas Gadjah Mada), juga dihilangkan secara paksa —terkait dengan kasus ledakan bom di Rusun Klender, Jakarta Timur. Leonardus Nugroho Iskandar —lebih dikenal sebagai Gilang —pekerja seni Serikat Pengamen Indonesia (SPI Surakarta, pernah bergabung dengan Dewan Mahasiswa dan Rakyat Surakarta-DRMS)¹² dihilangkan negara, dan jenazahnya

¹² Baca misalnya: “Kisah Gilang, Aktivis ’98 yang Hanya Pengamen Jalanan,” <http://m.medcom.id/nasional/peristiwa/9K5EL9aK-kisah-gilang-aktivis-98-yang-hanya-pengamen-jalanan> (Diakses 27 Mei 2021; lihat juga H.S. Lilik, *Tirto.id*, Sabtu 23 Mei 2020, “Kematian Gilang: Pengamen dari Solo Dibunuh karena Melawan Soeharto”, <http://tirto.id/kematian-gilang-karena-melawan-soeharto-fBTh>. Diakses 27 Mei 2021.

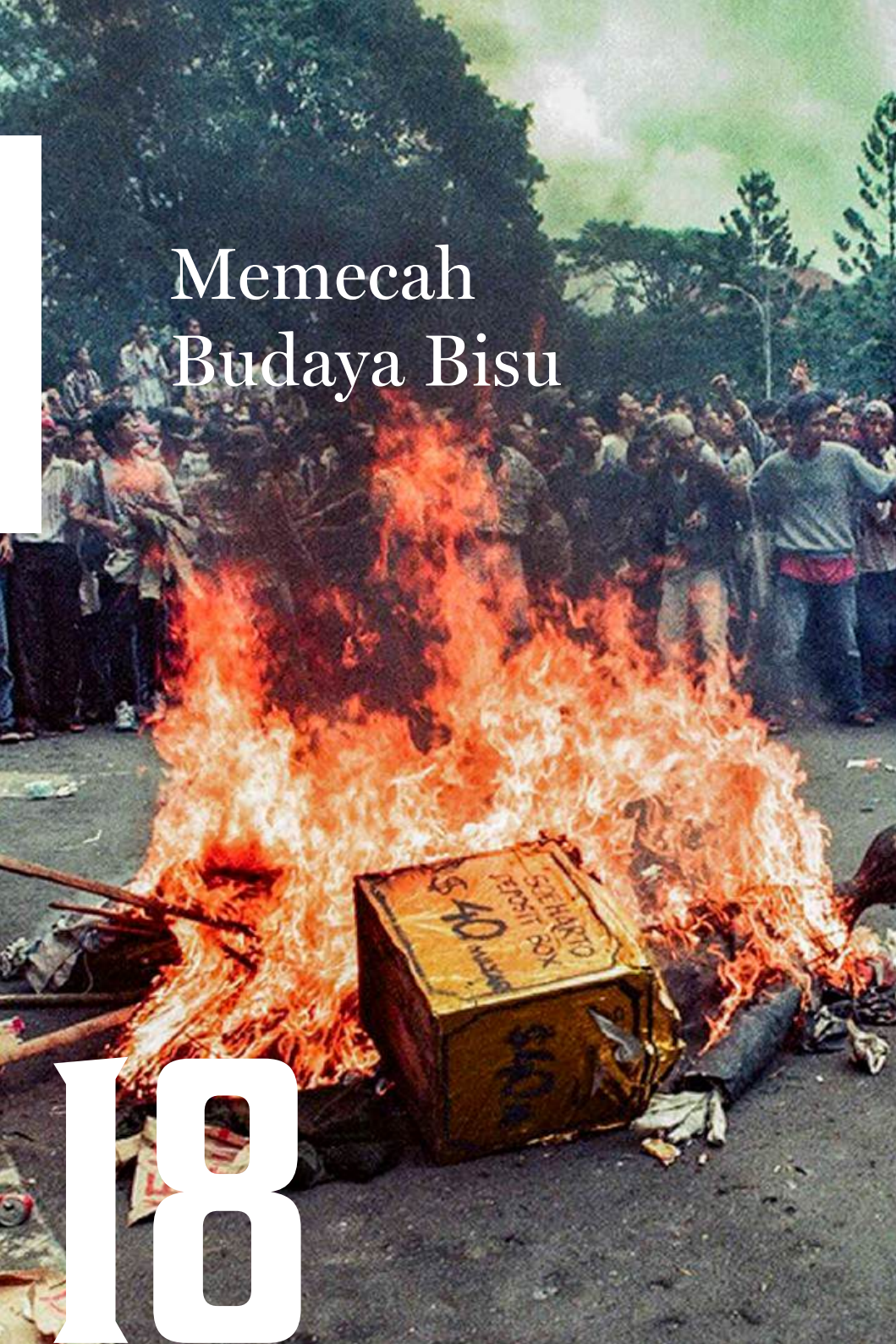
ditemukan pada 23 Mei 1998 di hutan Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Aktivis PRD lain: Andi Arief dan Wiji Thukul dihilangkan secara paksa dari berbagai tempat dalam waktu yang berbeda. Zul Amrozi Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra UGM, ketua SMID Yogyakarta juga ditangkap, diinterogasi dan tapi dibebaskan kembali. Kelak, beberapa aktivis seperti Faisol Reza, Raharja Waluyo Jati, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria dan Andi Arif dikembalikan dalam kondisi hidup. Namun yang lain, seperti Bimo Petrus Anugerah, Herman Hendrawan, Suyat dan Thukul hingga kini tidak diketahui di mana keberadaannya. Kenyataan ini menyulut api kemarahan di beberapa kota, terutama di Yogyakarta –lebih khusus lagi di UGM— karena ada lima orang mahasiswa UGM yang dihilangkan secara paksa. Energi solidaritas terhadap para aktivis yang dihilangkan secara paksa inilah yang ikut memengaruhi mengapa aksi-aksi di Yogyakarta dan cenderung mengalami eskalasi tinggi, manakala massa direpresi, masa balik melawan dan terjadi bentrok yang masif dan meluas.

Di lain sisi, menjelang 1998, situasi ekonomi nasional juga tampak memburuk. Pada paruh kedua 1997 nilai rupiah jatuh. Pemerintah berupaya mencari suntikan dana dengan berutang kepada International Monetary Fund (IMF) dan disetujui, tetapi harga pangan pokok dan bahan bakar terus meroket. Namun Soeharto tetap melindungi bank dan kepentingan keluarganya. Ia luput, peristiwa-peristiwa itu berpilin menjadi cambuk yang akan memaksanya turun dari kursi kepresiden.

Fajar politik Indonesia tiba.

Memecah Budaya Bisu

18





▶ Patung seperti Soeharto dibakar massa pada aksi 11 Maret 1998 di Gedung Pusat UGM. *Sumber: Dwi Oblo.*



Setelah PRD ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan jejaring aktivisnya diburu, salah satu upaya menjaga agar moral gerakan tak ambruk terjadi di Yogyakarta. Koordinasi pertama pasca-Kudatuli dilakukan di Perpustakaan Hatta, Jalan Raya Solo–Yogyakarta oleh eksponen PRD. Pertemuan itu berhasil mengkoordinasikan 12 orang. Faisol Riza (Fakultas Sastra, UGM, 1993) saat itu bertindak sebagai koordinator. Sepuluh orang lainnya yaitu Nor Hiqmah (Fakultas Filsafat, UGM, 1992), Edy Haryadi (Fakultas Filsafat, UGM, 1990), Antun Joko Susmana (Filsafat, UGM 1991), Hendrianto Kuok (FH, UGM, 1992), Ricardo Simarmata (FH-UGM, 1991), Siti Rubaidah (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 1990), Amin Sayoga (Sospol-UGM, 1992), Harris Sitorus (Sospol-UGM 1994), Lorensius Mayensi (Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma, 1995) dan satu orang lain yang tak terkonfirmasi identitasnya.

Kondisi buron membuat para kader berusaha menyaru dengan mengubah penampilan. Yang semula berbusana semauanya berubah jadi klimis, harum, dan santun. Pendeknya: Jadi tampak necis. Suasana temu perdana saat jadi buron itu jadi paduan antara menegangkan sekaligus kocak. Mereka yang terbiasa ekspresif, harus berusaha keras menahan diri untuk tidak terbahak dan saling ledek karena melihat penampilan kawan yang berubah drastis. “Pangling, takjub, geli, sekaligus berusaha tetap waspada, kalau-kalau ada yang mengawasi atau mencurigai diam-diam”, kisah Nining Wahyuningsih, mahasiswa Filsafat UGM sekaligus aktivis PRD.

Kedua belas orang ini lantas dibagi dalam kelompok koordinasi, berisi masing-masing tiga orang. Tiap kelompok dipimpin seorang koordinator. Para koordinator secara berkala berkoordinasi dengan koordinator kelompok lain. Selanjutnya, hasil koordinasi para koordinator disampaikan ke masing-masing

kelompok. Koordinasi semacam itu, konon, biasa disebut ‘sistem sel’. Sementara, bila ada kawan yang belum sempat terkoordinasi pada pertemuan perdana itu ditindaklanjuti kemudian. Saat itu, tak boleh membicarakan politik, kecuali dengan kawan satu koordinasi. Bertemu tatap muka pun mesti pura-pura tak kenal. Namun, kreativitas seorang kawan, Samsul Prihatmo, kerap bikin adrenalin tiba-tiba melonjak. Sifat usil tampaknya sudah berurat-berakar di nadinya. Ketika kebetulan berjumpa sesama anggota PRD sedang berjalan kaki, dengan berkendara motor Samsul bisa spontan berteriak: “Hidup PRD!”. Ia langsung tancap gas dan meninggalkan kawan sesama anggota. Jadilah mereka hanya bisa buru-buru menyingkir dari lokasi, sambil merapal mantra: “Assuuuu..., bajingaaan...!”

Selain soal teknis koordinasi, dibicarakan juga tentang penyimpanan material-material “haram” yang dimiliki tiap anggota kelompok. Yang disebut materi haram itu adalah buku-buku “kiri”, termasuk novel karya Pramoedya Ananta Toer, material-material kongres, serta makalah-makalah yang dianggap berbahaya. Material-material ini kemudian dikumpulkan dan disimpan di sebuah rumah aman (*safe house*) yang diurus oleh Faisol Riza. Bila ada anggota butuh bacaan, mereka mesti terlebih dulu berkoordinasi dengan koordinatornya. Setelah itu, koordinator tiap kelompok berkomunikasi dengan pengurus rumah aman. Dalam pertemuan itu dibicarakan pula soal teknis evakuasi barang-barang di sekretariat PRD di Sendowo, Sleman, Yogyakarta. Untuk sementara, pusat informasi dan koordinasi menumpang di Sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Sastra UGM Dian Budaya.

Situasi represif itu meresahkan. Banyak kader tidak terkoordinasi karena ada yang sengaja menghindar saat ditemui. Ada pula yang dimasukkan ke pesantren oleh orangtuanya, memanfaatkan kondisi “vakum” organisasi untuk konsentrasi kuliah,

menjalankan kuliah kerja nyata, atau mengerjakan skripsi. Ada pula yang melepas ketegangan dengan berfoya-ria. Ada juga yang kemudian menjadi pegawai magang. Ada beberapa kader yang tertangkap, dan setelah dilepaskan aparat, tidak lagi masuk dalam koordinasi kerja-kerja organisasi karena pertimbangan keamanan. Dikhawatirkan kader yang pernah tertangkap masih selalu diawasi dan dibuntuti. Kader macam itu jika bisa dikoordinasikan pun harus memakai sistem koordinasi khusus. Macam-macam.

Dari kedua belas orang yang berhasil dikoordinasikan pun kemudian berkurang satu demi satu karena *deploy* (dipindah tugaskan) oleh Dewan Nasional PRD ke luar kota, seperti Hendrianto dan Ricardo yang ditarik ke Jakarta; Rubaidah, yang pada dasarnya adalah pengurus nasional STN, kemudian lebih banyak berkeliling di Jawa Tengah; Edy Haryadi melaksanakan KKN; Ian dan Antun Joko Susmana ditarik ke Jakarta, dan lain-lain. Hingga orang-orang yang dapat berkoordinasi di Yogyakarta hanya Riza, Nining, Hiqmah, Harris Sitorus dan Susilo. Karena personel sedikit, pilihan tempat koordinasi justru bisa sangat fleksibel—di warung, jalanan, di taman, bahkan di tengah keramaian sekalipun koordinasi bisa berjalan, asal dilakukan sewajar mungkin. Dengan sumber daya yang semakin sedikit, kerja-kerja didistribusikan semaksimal mungkin. Nining saat itu ditugaskan mengorganisir mahasiswa. Untuk sementara waktu, ia masih dibantu anggota lain yang kelak dipindahtugaskan juga untuk membantu kerja-kerja organisasi dan advokasi terhadap kawan-kawan yang ditangkap di Jakarta dan Surabaya. Faisol Riza, misalnya, ditarik ke Jakarta sembari masih membereskan koordinasi di Jawa Tengah. Hiqmah dan Harris dipindah tugaskan ke Surabaya, Susilo pun kemudian ditarik ke Jakarta. Hingga praktis di Yogyakarta hanya Nining seorang yang memiliki akses dengan Jakarta dan kota lain.

Kerja pengorganisasian sebisa mungkin dilakukan dengan taktik membentuk komite-komite baru. Semula dengan metode tertutup,

sedikit demi sedikit, ketika sudah memungkinkan, dilakukan secara terbuka. Komite-komite baru inilah yang kemudian dipakai untuk terus konsisten menyerukan program, tuntutan, dipakai menjalin kerjasama dengan organisasi lain, mengundang dan menyelenggarakan pertemuan–diskusi, dan lain-lain. Saat itu, pengorganisasian dilakukan dengan telaten mendekati satu demi satu kawan yang dinilai potensial hingga dapat dikumpulkan dan dapat “diajak duduk bersama” dalam forum kecil hingga sepakat membuat organ.

Organ baru pertama yang berhasil terbentuk dengan mengajak kawan-kawan baru bernama Jaringan Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (JKMY). Organ ini berhasil mengumpulkan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi: UGM, Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Islam Indonesia (UII). JKMY kelak berubah nama menjadi PPD, dengan tambahan unsur dari STIE-SBI dan unsur pemuda. Organ baru inilah yang selanjutnya dipakai sebagai alat untuk bertemu, menawarkan program kerja, membuat koalisi dengan organisasi dan kelompok lain, dipakai pula untuk tetap menyuarakan program politik dan tuntutan. Sementara di UGM, pasca-Kudatuli para aktivis banyak yang mengevakuasi diri, akhirnya yang hidup adalah pers-pers mahasiswa, Pijar, Dian Budaya, Sintesa, Mahkamah. Bagi aktivis kampus, saat itu adalah momen menyedihkan —masa-masa suram.

Dua Aksi Massa



ekitar Oktober 1996, para aktivis menganggap bahwa kebisuan dan tiarapnya gerakan pro-demokrasi harus diakhiri. Dengan begitu, aksi massa mesti dilakukan dengan memanfaatkan momentum apa pun. Penilaian atas kondisi objektif saat itu adalah bahwa “kesadaran sejati massa sudah sampai pada sikap anti kediktatoran yang tinggi”. Hanya,

tergantung pada batas ketakutan dan keraguan dipecahkan dengan suatu aksi massa yang mampu menunjukkan bahwa ternyata “masih ada banyak kawan yang berani melawan”.

Hingga pada 27 Oktober 1996, percetakan *Suara Independen*, media Aliansi Jurnalis Independen (AJI), digerebek aparat Polres Jakarta Selatan. *Media Indonesia* edisi 30 Oktober 1996 memberitakan, lima ribu eksemplar *Suara Independen* disita dan 10 orang ditangkap. Mendengar berita itu, Harris Sitorus langsung bergerak dengan mengatasnamakan Lembaga Pers Mahasiswa Administrasi Negara, UGM, Administrator. Ia mengundang lembaga-lembaga pers kampus se-UGM serta lembaga pers kampus lain, kelompok dan organisasi lain di Yogyakarta. Forum itu berhasil menyepakati akan melakukan aksi massa pada 7 November 1996 di halaman depan Fakultas MIPA-UGM, di tepi barat Jalan Kaliurang, seberang Gedung Pusat UGM. Penyelenggara aksi ini bernama Komite Advokasi terhadap Penindasan Pers (KAPP).

Namun ketika aksi hendak digelar, tiba-tiba aparat telah bersiap di sekitar lokasi aksi. Lokasi aksi pun pindah menuju depan Gedung Pusat UGM. Massa aksi saat itu menilai ini fenomena aneh, karena sebelumnya tidak pernah ada operasi lalu-lintas di lokasi itu. Tampaknya, itu dalih semata agar aparat keamanan bisa terkonsentrasi di sekitar lokasi aksi. Artinya, aksi telah terendus aparat. Berangsur situasi berubah represif. Padahal, massa yang terkumpul baru sedikit, sekitar tujuh orang. Koordinator lapangan (korlap) yang ditunjuk memimpin aksi pun gentar. Perutnya mulas, katanya. Nining saat itu bertugas sebagai pencatat kronologi, jadi posisinya harus aman. Demi kelangsungan gerakan, ia harus mencatat detail peristiwa dan mengabarkannya.

Harris lantas mengambil alih posisi korlap dan menginstruksikan agar massa berkumpul. Spanduk dan poster baru hendak dibuka ketika aparat tiba-tiba menyerbu. Harris segera diringkus,

dan dibawa ke Garnisun Yogyakarta. Semua perlengkapan aksi pun dirampas. Nining segera ke kampus untuk menyusun kronologi kejadian. Nantinya, kronologi itu digunakan sebagai dasar membuat selebaran dan rilis pers berkait peristiwa itu. Bersama kawannya, ia mengkoordinir pertemuan untuk menyikapi penyerbuan dan pemukulan oleh polisi itu.

Pertemuan membahas rencana tindakan berikutnya dilakukan pada Rabu, 13 November 1996, di Sekretariat Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat (BPMFF) UGM Pijar. Pertemuan membahas sosialisasi aksi KAPP beserta rentetan kejadian. Berbagai rencana tindakan dibicarakan pada pertemuan itu. Sebagai hasil pertemuan, disepakati organ baru bernama Komite Keprihatinan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KOKAM-UGM) yang dikoordinatori Haris Rusly Moti, seorang mahasiswa Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra sekaligus aktivis HMI. Dalam komite baru inilah spektrum keterlibatan mahasiswa semakin diperluas. Ada unsur Senat Mahasiswa (SM) UGM, lengkap dengan Badan Eksekutif Mahasiswa-nya (BEM). Kondisi macam ini sebelumnya sangat sulit terjadi, sebab situasi perpolitikan mahasiswa di kampus saat itu terbelah, berkaitan dengan sikap mahasiswa terhadap konsep organisasi kemahasiswaan bernama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa yang menolak lebih sepakat dengan struktur lembaga kemahasiswaan berbentuk DEMA (Dewan Mahasiswa). Untuk sementara waktu, elemen yang mengusung konsep DEMA lebih menampakkan diri sebagai “parlemen jalanan” dalam konteks perpolitikan mahasiswa kala itu.

Peristiwa pemukulan terhadap aksi KAPP menjadi momentum untuk mengorganisir aksi solidaritas yang lebih besar. Ratusan orang terlibat dalam aksi ini —perkembangan jumlah massa benar-benar signifikan, dari semula hanya sekitar tujuh orang, berlipat menjadi sekitar 500an orang. Taktik meminimalisir

ketakutan massa yang terlibat dalam aksi ini, salah satunya, adalah mengenakan jaket almamater ketika aksi berlangsung. Cara ini dilematis, karena peserta aksi bukan hanya mahasiswa UGM, sebab itu juga rawan jatuh ke sektarianisme kampus. Di sisi lain, hal itu dapat membesarkan hati para peserta aksi, sehingga mampu memobilisir massa lebih banyak. Agitasinya adalah mengangkat isu otonomi kampus dan kebebasan mimbar akademik. Massa aksi ditemui oleh Rektor, Pembantu Rektor III Bidang kemahasiswaan, Pembantu Dekan III Fakultas Fisipol, Filsafat dan Sastra di depan Gedung Pusat UGM. Aksi pun sukses digelar.

Aksi “martir” KAPP diikuti aksi solidaritas yang diadakan oleh KOKAM-UGM, menjadi titik balik kembalinya elan gerakan pro-demokrasi dan keberanian melawan penindasan kediktatoran rezim Orde Baru. Dua aksi massa tadi berhasil memecahkan kebisuan dan membangkitkan kembali keberanian para aktivis gerakan di Yogyakarta —serta berharap juga akan merembet ke nasional.

Kesimpulan tentang kondisi saat itu adalah sentimen anti-kediktatoran sudah semakin meluas dan meninggi di masyarakat. Saat itu, sistem politik yang ditopang 5 UU Politik 1985 dan digadai oleh Dwifungsi ABRI semakin mengukuhkan posisi kediktatoran rezim Soeharto. Sementara, perjuangan mengubah sistem melalui parlemen dianggap mustahil. Maka itu, metode perjuangan yang bisa dipakai hanya ekstra-parlementer, alias parlemen jalanan —gerakan massa, *people power*. Itulah alasan konsentrasi kerja-kerja selalu diarahkan agar bermuara pada gerakan massa, gerakan turun ke jalan. Bentuk organisasi yang lebih bersifat non-permanen, berupa komite-komite aksi yang dinilai paling tepat untuk mengatasi situasi dan kondisi saat itu yang sangat represif, tapi telah dipantik keberaniannya untuk bergerak kembali. Sejak itu, bertumbuhlah komite-komite aksi

di berbagai universitas di Yogyakarta lain bak cendawan di musim hujan.

Menurunkan Pembantu Dekan Filsafat



ak banyak orang tahu dan ingat bahwa mahasiswa Fakultas Filsafat UGM pernah berhasil memenangkan tuntutan penurunan Pembantu Dekan (PD) III fakultasnya dengan metode aksi massa. Aksi itu dimulai pada 19 Desember 1996, sekitar sebulan pasca dua aksi “pemecah kebisuan” —aksi KAPP dan KOKAM-UGM. Aksi dengan tuntutan penurunan PD III Fakultas Filsafat UGM dipicu penilaian mayoritas mahasiswa tentang sikap otoriter pejabat yang mengepalai Bidang Kemahasiswaan di lingkungan dekanat. Misalnya, PD III bisa membatalkan kegiatan mahasiswa dengan alasan yang tak jelas. Padahal, kegiatan-kegiatan itu telah disetujui dekanat dan lembaga kemahasiswaan. Konon, PD III saat itu bekerja juga untuk Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sehingga wajar jika dia “alergi” dengan tema-tema politis. BEM dan Senat Fakultas juga telah berusaha menjembatani ketidakpahaman antara mahasiswa dan pihak dekanat, terkhusus PD III. Namun selalu buntu akibat, sebut mahasiswa kala itu, “sikap arogan dan feodal” pihak dekanat.

Belum lagi tindakan “sterilisasi” kampus dari kegiatan politik dengan pemberlakuan jam malam. Di Fakultas Filsafat, kunci-kunci ruang kemahasiswaan mulai ditarik satpam tiap sekitar pukul enam petang. Bagi yang ingin menggunakan ruangan harus izin kepada PD III. Aturan ini menunjukkan bahwa keberhasilan aksi “pemecah kebisuan” tak serta-merta berjalan mulus. Keberanian memang berhasil dibangkitkan, tampak dari makin banyaknya aksi-aksi politis terbuka dari berbagai organ dan elemen di Yogyakarta dan “kegiatan malam” di kampus

kembali marak. Gelombang pasang perlawanan mahasiswa tampak hendak diredam kembali oleh kampus.

Berbeda dengan sebutan lembaga kemahasiswaan di fakultas lain UGM, lembaga kemahasiswaan di Fakultas Filsafat disebut Badan Semi Otonom (BSO). Nama itu bermakna “otonom” dalam bentuk kegiatan, tapi tidak dalam hal pendanaan. BSO bergantung pada dana kemahasiswaan dari universitas, bersumber dari sekian persen SPP yang dibayarkan mahasiswa, sehingga pemanfaatannya pun harus semaksimal mungkin untuk keperluan pemaksimalan potensi mahasiswa. Dari sebutan yang dipilih, tampak semangat untuk membebaskan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan bentuk kegiatan yang dinilai paling sesuai bagi mahasiswa sendiri. Ini penting karena mahasiswa adalah bagian terbesar dari sivitas akademika, sehingga suaranya sangat layak dipertimbangkan —terutama dalam mengatur kegiatan kelembagaannya sendiri.

Aksi Mimbar Bebas didukung seluruh lembaga kemahasiswaan di Fakultas Filsafat. Hal itu tampak dari pernyataan solidaritas yang dibacakan masing-masing perwakilan: Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, keempat BSO (Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat Pijar, Forum Budaya Retorika, Mahasiswa Pecinta Jagat Raya “Panta Rhei”, dan Keluarga Muslim Filsafat), ditambah Suara Mahasiswa Angkatan 1994 dan Suara Mahasiswa Sastra (solidaritas dari fakultas lain). Dewan Mahasiswa UGM kemudian juga mengeluarkan pernyataan solidaritas. Selain menuntut PD III mundur, mahasiswa juga menuntut pemangkasan dan perubahan birokrasi kampus, serta menegakkan hak politik mahasiswa. Bila tuntutan tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam mogok kuliah.

Solidaritas antar pers mahasiswa juga paling tinggi di antara organ-organ lain. Diskusi yang saling menguatkan terjadi terutama antara BPMF Pijar, LPMF Sastra Dian Budaya, LPMF Sospol

Sintesa dan LPMF Hukum Mahkamah, juga Dewan Mahasiswa UGM. Kasus tuntutan penurunan PD III pun banyak mendapat dukungan dari fakultas lain. Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat pun banyak berhubungan dengan senat-senat mahasiswa fakultas lain, terutama Fakultas Sastra, Fisipol, dan Hukum. Karena dukungan meluas, maka Dekan Fakultas Filsafat mesti segera mengambil tindakan.

Poster dan spanduk berisi tuntutan lantas ditempel di dinding-dinding kampus dan papan-papan pengumuman. Sebuah spanduk dari *bagor* (karung goni) juga ditempel di dinding luar kampus menghadap Jl. Olahraga, Bulaksumur, agar terpapar kendaraan umum. Ketika banyak tempelan poster dan spanduk, akan memicu pertanyaan: apa yang terjadi? Mahasiswa pun selalu kompak menjawab pertanyaan Satpam UGM bahwa mahasiswa secara keseluruhanlah yang bertanggung jawab atas aksi, berikut poster dan spanduk, akan tetap dipasang hingga tuntutan dipenuhi.

Tidak sampai sebulan setelah aksi mimbar bebas, PD III dinonaktifkan oleh Dekan dan mengambil alih segala urusan kemahasiswaan yang menjadi tugas PD III. Usai PD III dicopot, situasi di kampus menjadi lebih kondusif bagi aktivitas kemahasiswaan karena banyak pihak, terutama birokrat kampus, tak hanya di Fakultas Filsafat, lebih berhati-hati ketika hendak menerapkan aturan. Pihak Dekanat juga makin akomodatif terhadap aspirasi mahasiswa. Kelak, situasi kampus yang makin longgar membuka kembali denyut kehidupan kemahasiswaan di kampus. Diskusi, kumpul-kumpul, serta kegiatan kemahasiswaan lainnya bisa berlangsung lagi hingga malam —kampus ‘hidup’ kembali. Namun, itu juga tidak akan berimbas besar jika “elan” dan “atmosfer” anti-penindasan, anti-feodalisme, serta sikap-sikap kritis yang menyertainya tidak terus-menerus ditanamkan pada mahasiswa Fakultas Filsafat sebelumnya di kehidupan kemahasiswaan di kampus.

Tahun 1996 diakhiri dengan “dipecahkannya kebisuan” dan “dibangkitkannya kembali gerakan” lewat Aksi KAPP dan KOKAM UGM, serta dicapainya “kemenangan kecil” dari keberhasilan Aksi Penurunan PD III Fakultas Filsafat. Aksi-aksi itu memberikan dampak “terbukanya kembali ruang” untuk mahasiswa beraktivitas (politik) dan dibataalkannya program “jam malam” di kampus. Sementara itu, suasana di bilik-bilik indekos, di ruang-ruang sempit sekretariat unit kegiatan mahasiswa, di fakultas-fakultas dan di tempat-tempat lain, orang berkumpul dalam jumlah kecil. Mereka terus mengasah kepekaan sosial dan pemikiran kritis membangun kesadaran politik kerakyatan untuk gerakan perubahan. Kantin Fakultas Sastra UGM, acap dikenal sebagai Bonbin misalnya, orang-orang senantiasa berjumpa, bertukar sapa dan pikiran, berdiskusi soal pengorganisasian, dan saling berkoordinasi siapkan barisan. Demikian juga di kantin-kantin di Fakultas Filsafat UGM, di kantin Fisipol, di Warung Bu Harjo dan di angkringan, diskusi-diskusi terus berjalan. Meski tertutup dan terbatas, di luar itu semua diskusi-diskusi tentang politik kerakyatan, berbagai kabar situasi nasional dan internasional, soal demokrasi dan HAM juga terus berjalan.

Menjelang 1997, acara-acara pentas seni dengan panggung tanpa sekat antara penonton dan penampil juga mulai digelar di lingkup kampus UGM. Dimulai dari panggung kecil di halaman belakang kampus Fakultas Sastra, Filsafat, dan Fisipol UGM. Panggung-panggung itu hanya mengandalkan peralatan sederhana. Untuk penerangan, misalnya, hanya bermodalkan *senthir*, botol-botol beling minuman berenergi yang berisi minyak tanah dan bersumbu kaus katun bekas, atau obor berbahan bambu sederhana. Pentas ini tak hanya dikerjakan oleh salah satu mahasiswa dari satu fakultas saja, tetapi juga melibatkan kawan dari ragam fakultas lain di lingkungan UGM. Kawan-kawan

dari universitas lain di Yogyakarta atau tamu dari luar kota pun turut serta. Pentas seni ini juga dilakukan beberapa kali dengan tempat berpindah, dari Fakultas Sastra, ke Filsafat dan Fisipol. Perlahan, kerumunan massa mulai tercipta kembali. Pembacaan sajak, musikalisasi puisi, serta lagu-lagu yang dibawakan secara akustik turut memeriahkan tiap pentas seni. Selain itu, pentas seni juga menjadi media agar para aktivis “keluar dari persembunyiannya”. Saling berjumpa, berdiskusi, kembali menggalang kekuatan sembari membongkar trauma akibat teror dan kekerasan. Pemanasan aksi-aksi politik skala kecil dan terbatas pun diupayakan. Kelak, pentas-pentas seni di kampus turut menyuntikkan semangat perlawanan yang mulai pulih. Seni perlawanan memiliki fungsi meniupkan napas hidup dan membangunkan kampus dari mati suri gerakan mahasiswa.

Sejak panggung budaya ini dijalankan, perlahan-lahan kawan-kawan dari berbagai gerakan bermunculan, saling bercanda dan bercengkrama kembali. Mereka yang sebelumnya “menjalankan mekanisme mengamankan diri secara mandiri” maupun yang melakukan “mekanisme organisasi untuk menjalankan prosedur evakuasi” perlahan muncul dan berkomunikasi dengan sejawat, serta turut membuat diskusi-diskusi dan jadwal bertemu untuk menyusun agenda aksi politik kecil-kecilan.

Menjaga Nyala Api



elang Pemilu 1997 suasana di UGM dan Yogyakarta mulai memanasi. Di UGM sudah banyak aksi-aksi politik menentang penyelenggaraan Pemilu 1997. Diawali dengan program advokasi terhadap para tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) PRD juga lainnya, lewat jalur di luar hukum (non-litigasi) atau metode aksi massa. Organ taktis untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas sejarah yang berhasil

dibentuk yaitu Jaringan Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (JKMY) –kelak bersulih nama menjadi Perjuangan Pemuda untuk Demokrasi (PPD). Organ inilah yang bertindak sebagai inisiator dalam aksi advokasi pada 10 Januari 1997. Selain PPD, beberapa organ lain terlibat dalam aksi: Komite Perjuangan Demokrasi (KPD), Dewan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma (DEMA-USD), Dewan Mahasiswa UGM (DEMA-UGM), juga perwakilan mahasiswa Timor Leste. Anggota PPD yang heterogen menggambarkan keberagaman sudah terbangun saat itu. Selain dari UGM, beberapa anggota berasal dari Universitas Sanata Dharma (USD), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Syariah Banking Institute (STIE-SBI), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Atma Jaya (UAJY). Dilihat dari latar kegiatan yang digeluti juga cukup beragam. Mayoritas berasal dari aktivis pers mahasiswa, pegiat teater kampus, senat mahasiswa fakultas, dewan mahasiswa non-UGM, bahkan juga dari HMI¹³.

Saat itu, konstelasi perpolitikan di Yogyakarta banyak membicarakan Pemilu 1997. Di antaranya diskusi terbuka pada 19 Januari tentang 5 Undang-undang Politik di ruang Senat Fakultas Sastra yang diselenggarakan oleh PPD. Beberapa selebaran yang mengangkat tema Pemilu nampak dikeluarkan salah satunya oleh Dewan Mahasiswa UGM. PPD pun menerbitkan selebaran berisi seruan Boikot Pemilu. Pun muncul selebaran tanpa identitas berisi seruan: “Awasi Pemilu 1997!” Sebuah selebaran beridentitas Banteng Bergerak mengemukakan judul: “Boikot Pemilu 1997!!!” Kemudian, ditemukan pula selebaran tanpa identitas berjudul: “Awasi Ada Kecurangan Pemilu!” dan ditutup dengan slogan: “Awasi Pemilu, Kawal Kotak Suara, Protes Setiap Kecurangan”. Forum Diskusi Keliling (FDK) juga mengagendakan sebuah diskusi dengan pancingan pertanyaan: “Layakkah Pemilu 1997

diteruskan?” Mulai muncul juga selebaran-selebaran yang mengatasnamakan Komite Pendukung Koalisi Mega-Bintang Rakyat yang membahas tentang penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap dua partai selain Golkar. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulaksumur pun mengangkat tema Pemilu 1997 dalam diskusinya. Terdapat juga selebaran yang memberikan penjelasan detail tentang bagaimana melihat metode-metode sistematis kecurangan dan bagaimana bertindak terhadap kecurangan Pemilu yaitu dengan melakukan pengawasan¹⁴.

Isu “Boikot Kampanye” yang digulirkan oleh PPP, ditambah isu Golput (Golongan Putih) dan Golsak (Golongan Perusak [Kartu Suara]) diangkat menjadi tema diskusi yang diselenggarakan oleh PPD pada 6 Maret 1997. Disusul adanya undangan pertemuan dari PPD yang berisi ajakan pembentukan sebuah front pada 12 Maret 1997. Pertemuan itu pun melahirkan front koalisi bernama Komite Keprihatinan Pemuda Yogyakarta (KKPY). Organ ini kemudian mengeluarkan selebaran berjudul: “Teori Gebuk dan Demokrasi Indonesia, disusul Aksi Mimbar Bebas Keprihatinan Situasi Nasional” pada 20 Maret 1997 yang ternyata secara terselubung mengangkat isu boikot pemilu 1997¹⁵. Dalam aksi itu, mereka juga menuntut pencabutan Paket 5 UU Politik, UU Subversi, pembebasan tahanan politik, pencabutan Dwifungsi ABRI, dan menyatakan dukungan kepada Megawati¹⁶.

Ketika semakin menjamurnya komite-komite dan gerakan pro-demokrasi serta aksi-aksi massa, muncul elemen bernama Komite Solidaritas Pembelaan Masyarakat Muslim Kampus (KSPMMK) yang mencantumkan alamat sekretariat di Bulaksumur

¹⁴ Selebaran-selebaran dan undangan diskusi yang terbit pada 1997, dokumen pribadi.

¹⁵ Selebaran-selebaran dan undangan diskusi di UGM yang terbit pada 1997, dokumen pribadi.

¹⁶ Muridan S. Widjojo, dkk. *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999. Hal. 150.

UGM. Dalam sebuah surat yang salah satunya dialamatkan kepada Senat Mahasiswa UGM, mereka mengeluarkan pernyataan yang intinya berseberangan dengan apa yang diserukan oleh gerakan pro-demokrasi, serta mengimbau Senat UGM dan jajarannya untuk bisa bertindak tegas terhadap hal tersebut. Imbauan serupa mereka alamatkan pada pihak Rektorat serta kepada Pimpinan ABRI dan Pemerintah. BEM UGM merespons situasi tersebut dengan mengundang dan mengajak Presidium KKPY untuk “menyamakan persepsi” pada 27 Maret 1997.

Pada Maret 1997 muncul lagi geliat aksi massa dengan isu krusial dan lebih meningkat eskalasi politisnya. Aksi itu menuntut pencabutan 5 UU Politik anti Demokrasi dan Dwifungsi ABRI. Aksi yang paling awal muncul dipelopori oleh Perjuangan Pemuda untuk Demokrasi (PPD), dengan seruan Boikot Pemilu. Komite Keprihatinan Pemuda Yogyakarta (KKPY) —di dalamnya juga ada eksponen PPD— juga mengangkat isu boikot pemilu. Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia (KPDI) melakukan aksi Boikot pemilu 1997. Aksi mendapat represi aparat keamanan. Selama dua hari aksi sebanyak 32 mahasiswa dan massa arus bawah PDI pro-Megawati ditangkap. Komite Mahasiswa Anti Penindasan (KMAP) juga menolak pemilu 1997. Dari gerakan-gerakan ini kemudian bermuara menjadi organisasi Komite Nasional Perjuangan Demokrasi Indonesia (KNPDI). Aksi-aksi yang dilakukan oleh komite-komite ini diinisiasi mahasiswa kritis yang spektrum politiknya luas, tapi tak dapat dipungkiri yang di tengah-tengahnya ada kader, simpatisan dan atau massa pemengaruh PRD-SMID. Para penggerak kelompok-kelompok dan komite-komite inilah yang kemudian mengerucut menjadi bagian dari kelompok yang turut menginisiasi kemunculan KPRP pada 1998 —yang akan dibahas pada bagian buku ini selanjutnya.

Masuk pada April situasi mulai bergolak. Hari pertama, 1 April 1997, aksi yang diinisiasi front koalisi perluasan KKPY

—yaitu Komite Perjuangan untuk Demokrasi Indonesia (KPDI)—mulai direspons dengan kekerasan oleh aparat Korem 072. Aksi yang dimulai dari Plaza Fisipol UGM dipukul dan dibubarkan begitu keluar dari areal Fisipol dan mulai bergerak di depan Fakultas Hukum. Sejumlah 24 orang mahasiswa ditangkap dan ditahan hampir 2x24 jam di Garnisun, kemudian dioper ke Polres Sleman. Keesokan hari, 2 April 1997, sebuah aksi kembali digelar oleh elemen KPDI, Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan BPMFF UGM-Pijar di Bundaran UGM. Mereka juga dipukul, dan 8 orang ditahan. Selanjutnya, 3 April 1997, aksi solidaritas kembali digelar oleh BPPM UGM, SM UGM, dan Dema UGM, di halaman Gelanggang UGM. Mereka juga melayangkan protes menuntut pembebasan 32 orang yang ditahan pada aksi sebelumnya. Aksi tersebut berjalan aman, dan bersamaan dengan aksi tersebut, ke-32 orang mahasiswa yang ditangkap di dua hari sebelumnya dibebaskan¹⁷.

Pada 14 April 1997, digelar sebuah pertemuan nasional yang kemudian melahirkan Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD). Sebuah organisasi nasional yang dimaksudkan sebagai wadah beberapa elemen yang berlawanan mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota yang saat itu banyak menjadi pendukung PDI-Megawati, dan lain sebagainya. Masih di bulan yang sama, tanggal 25 April 1997, sebuah komite bernama Masyarakat Mahasiswa untuk Tragedi Makassar (MAuT), mengadakan Peringatan Tragedi Makassar Berdarah di IAIN Sunan Kalijaga¹⁸. Di sisi lain, jalan kekerasan mulai ditempuh oleh elemen partai penguasa saat itu. Satgas Golkar pada 15 Mei 1997 menyerang masuk ke Kampus Fakultas Hukum UII. Mereka mengintimidasi

¹⁷ Dari berbagai sumber: kesaksian pelaku, selebaran dokumen pribadi, dan dari Muridan S. Widjojo, dkk. *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hal. 150-151.

¹⁸ Dirangkum dari arsip dan dokumentasi pribadi.

mahasiswa, merusak kendaraan, merusak papan pengumuman, melempar dan membanting bangku kuliah, menyeret mahasiswa yang berada di kampus, serta mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung.

Sementara itu, di sekitar IAIN Sunan Kalijaga orang-orang yang ada di sana pun tak luput dari tindakan kekerasan. Pada 18 Mei 1997, sebuah barisan konvoi massa Golkar terdiri dari sekitar 15 motor dan mobil patroli Golkar melintas. Mereka mencabuti bendera PPP di depan Kampus IAIN dan menyeretnya dengan kaki sambil berkonvoi. Penonton pawai yang adalah simpatisan PPP pun mulai kesal dan mengolok-olok pengendara dengan atribut Golkar itu. Aparat Keamanan TNI AD (ARMED) pun diturunkan untuk mengendalikan situasi di Jalan Timoho hingga sebelah timur IAIN. Sedang polisi menutupi ujung jalan Timoho agar tak dilalui arak-arakan pendukung Golkar. Peristiwa tersebut menjadi awal situasi genting yang berlangsung sampai dini hari, dengan keterlibatan lebih banyak pihak dan lebih banyak korban. Peristiwa ini makin menumbuhkan solidaritas antar massa tertindas dan bibit perasaan berlawanan di masyarakat. Beberapa peristiwa terkait kampanye pemilu dibalut kekerasan berdarah pun banyak terjadi di sejumlah tempat lain.

Sementara pada 20 Mei 1997, dua aksi dilaksanakan sebagai pernyataan solidaritas atas kejadian kekerasan di UII dan IAIN. Aksi pertama dilaksanakan oleh DEMA UGM, disusul aksi kedua yang dilaksanakan oleh sebuah komite bernama Komite Mahasiswa Anti-Penindasan (KMAP). Aksi kedua bertajuk “Aksi Mimbar Bebas Menentang Penindasan Rezim Militer”. Menurut mereka, motivasi seluruh kejadian kekerasan baik di UII maupun di IAIN Sunan Kalijaga adalah legitimasi bagi kekuasaan yang menindas lewat pemilu. Aksi ini bermaksud mengajak seluruh rakyat untuk tak gentar menolak segala bentuk penindasan. KMAP menyatakan menolak Pemilu 1997, menyerukan

pencabutan Paket 5 UU Politik, UU Anti-Subversi, dan Dwifungsi ABRI¹⁹.

Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY) menggelar aksi dengan nama Gema Golput (Gerakan Mahasiswa Golongan Putih) pada 21 Mei 1997. Aksi Gema Golput di Yogyakarta dibuat bergiliran di kampus-kampus yang menjadi simpul-simpul pergerakan PPPY, misalnya di IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Atmajaya, dan APMD (Akademi Pembangunan Masyarakat Desa). Mereka menuntut “tegakkan hak untuk tidak memilih, pencabutan Paket 5 UU Politik, UU Anti Subversi, Dwifungsi ABRI, berantas KKN, berdayakan legislatif, tolak pendekatan keamanan, dan bubarkan Bakorstanas²⁰. Selain pernyataan sikap kritis melalui aksi-aksi demonstrasi, mahasiswa juga menyatakan sikap kritisnya melalui *polling*, di antaranya yang diadakan di UGM yang menyatakan 36,6% dari 600 responden menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1997. Juga *polling* yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang menyatakan 39,3% responden tidak akan memilih dalam Pemilu 1997²¹. Namun, Pemilu 1997 tetap berjalan sesuai rencana semula.

Setelah Pemilu 1997 pada 29 Mei 1997, isu bergulir menyoal kecurangan pelaksanaan Pemilu. Sebuah selebaran beridentitas Koalisi Mega Bintang Rakyat untuk Kecurangan Pemilu diakhiri dengan tiga kalimat dengan huruf kapital dan tiga tanda seru: “PPP DICURANGI!!!”, “MEGAWATI DIJEGAL!!!, RAKYAT DIBOHONGI!!!” Pun sebuah selebaran undangan aksi mimbar bebas bertanggal 6 Juni 1997 diakhiri dengan empat kalimat berhuruf kapital dan tiga tanda seru: “PPP DICURANGI!!!”,

¹⁹ Dirangkum dari arsip dan dokumentasi pribadi.

²⁰ Muridan S. Widjojo dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 151–152.

²¹ *Ibid.*, hal. 152.

MEGAWATI DIJEGAL!!!, RAKYAT DIBOHONGI!!! TOLAK HASIL PEMILU 1997!!!”. PPD pun mengeluarkan pernyataan yang intinya menyatakan sikap bahwa Pemilu 1997 tidak sah dan cacat secara hukum. Mereka pun menuntut agar Pemilu 1997 diulang. Tuntutan lain adalah pengembalian kepemimpinan PDI kepada yang berhak, serta menuntut pencabutan 5 UU Politik. Sebuah selebaran beridentitas Gerakan Rakyat untuk Pemilu Demokratis mengeluarkan lima butir pernyataan sikap yaitu intinya: menuntut Pemilu 1997 diulang dengan jujur dan adil, menuntut dicabutnya 5 UU Politik, menuntut pengadilan terhadap Soeryadi dan pengakuan terhadap Megawati, menuntut menindaklanjuti segala ketidakpuasan massa PPP atas pelaksanaan Pemilu, dan seruan kepada rakyat Indonesia untuk bersatu menegaskan sikap atas hak-hak rakyat²².

Sebuah komite bernama Gerakan Rakyat anti Kekerasan (GeRAK) mengadakan sebuah Aksi Seni pada 23 Juni 1997 sebagai protes atas pernyataan Menteri Agama Tarmizi Taher bahwa, darah perusuh adalah halal, dan bahwa para pelaku kerusuhan adalah anak cucu PKI. Menurut mereka, kalimat itu justru dapat menimbulkan kerusuhan karena yang disebut “perusuh” dapat sangat subyektif. Pernyataan ini justru mengaburkan sumber kerusuhan yang sebenarnya dan justru menghambat penyelesaian masalah karena masalah sebenarnya bersumber dari kebobrokan sistem negara yang membelenggu rakyat²³.

Pada 9 Juli 1997, di depan Gelanggang Mahasiswa UGM, kembali muncul aksi perlawanan oleh Gerakan Rakyat untuk Pemilu Demokratis. Aksi ini menyatakan menolak hasil Pemilu yang tidak sah dan menuntut pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Di samping isu penolakan hasil Pemilu yang mewarnai bulan Juli ini, terdapat pula aksi dalam rangka peringatan Peristiwa

²² Dirangkum dari arsip dan dokumen pribadi.

²³ Dirangkum dari arsip dan dokumen pribadi.

Kerusuhan 27 Juli 1996 yang dilakukan oleh KNPD Forda Yogya, Solidaritas Rakyat Yogyakarta Anti Kekerasan (Sorjan), dan Kaum Muda Katolik DIY. Mereka mengadakan aksi bersamaan di pada 27 Juli, tapi di tempat yang berbeda-beda²⁴.

Komite Anak Bangsa untuk Keprihatinan Nasional (Kabakin), pada 9 Oktober 1997, mengadakan aksi menyoal lagi soal penolakan hasil Pemilu. Pada 20 Oktober 1997, Solidaritas Demokrasi untuk Orang-orang Tertindas (SDOOT) turun ke jalan dari IAIN Sunan Kalijaga hendak ke Taman Makam Pahlawan, tapi dicegat di depan Kampus APMD oleh petugas. Mereka menuntut “perbaikan mekanisme pemilihan DPR/MPR”²⁵. Akhir Oktober, berturut-turut aksi mulai 27 Oktober, dilaksanakan oleh Senat-BEM UGM di Fisipol, mengangkat isu soal penurunan spanduk dukungan ke Amien Rais.

Sementara pada 28 Oktober, tak pelak dipadati dengan lima buah aksi yang masing-masing diselenggarakan oleh Sekam (Serikat Mahasiswa) UMY, kemudian di IKIP karangmalang, Komite Anak Bangsa untuk Keprihatinan Nasional (KABAKIN) di UGM, aksi yang dilakukan di Malioboro yang melibatkan mahasiswa dari Kampus ISI Yogyakarta dan Universitas Atmajaya, juga peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY). Kabakin sendiri terdiri dari beberapa elemen di antaranya DEMA-UGM, Kelompok Studi Dialektika (UAJY), mahasiswa UMY, UII, dan KAMMI. Pada 29 Oktober, sebuah aksi diselenggarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya KAM-Prodem yang merupakan jaringan Rhode. Dan Oktober ditutup dengan aksi yang diselenggarakan pada 30 Oktober oleh para mahasiswa UAJY²⁶. Kemudian pada

²⁴ Muridan S. Widjojo dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 152.

²⁵ Muridan S. Widjojo dkk, *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 153.

²⁶ Dirangkum dari laporan organisasi, dokumen pribadi.

1 November, sebuah aksi kembali digelar oleh Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY) dengan massa di antaranya berasal dari Kampus UMY dan Abayo, di Bundaran UGM. Aksi ini didukung pula dengan pembacaan statemen yang mengatasmakan diri KNPD Forda DIY. Sedangkan isu yang diangkat adalah menolak DPR/MPR hasil Pemilu 1997²⁷.

Pada 10 Desember 1997 terjadi aksi peringatan Hari HAM secara serentak di tujuh kota, termasuk Yogyakarta²⁸. Di UGM, barisan aksi berhasil keluar kampus, kemudian dikepung aparat dari arah utara dan selatan di Jalan C. Simanjuntak, antara Mirota Kampus dan Terminal Terban. Aksi dipukul, massa bubar, sebagian berhasil menyelamatkan diri ke perkampungan penduduk sekitar, belasan orang ditangkap, tapi tidak sampai ditahan lebih dari sehari²⁹. Ini juga pengalaman aksi keluar kampus pertama di Yogyakarta.

Pada 1997 pun kemudian ditutup dengan sebuah aksi pada 30 Desember oleh Gerakan Rakyat untuk Keadilan. Beberapa elemen gerakan tercatat sebagai pelaku aksi tersebut yaitu KNPD Forda DIY, KNPD Forda Jateng, DEMA Universitas Sanata Dharma, beberapa Kelompok Studi, salah satunya Kelompok Orientasi Studi Kritis (KOSS), Forum Muda Katolik untuk Demokrasi atau FAKSI, dan Mahasiswa UGM, UII, UAJY, dll. Mereka mengangkat beberapa isu di antaranya: Tolak Soeharto, Turunkan harga pangan, Cabut 5 UU Politik, Cabut Dwifungsi ABRI, UU Anti subversi, Tolak DPR/MPR hasil Pemilu 1997 yang curang, ditutup dengan seruan kepada rakyat untuk membentuk organ-organ perlawanan dan menggerakkan perubahan dengan membentuk perwakilan rakyat independen³⁰.

²⁷ Dirangkum dari sebuah laporan organisasi, dokumen pribadi.

²⁸ Muridan S. Widjojo dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 153.

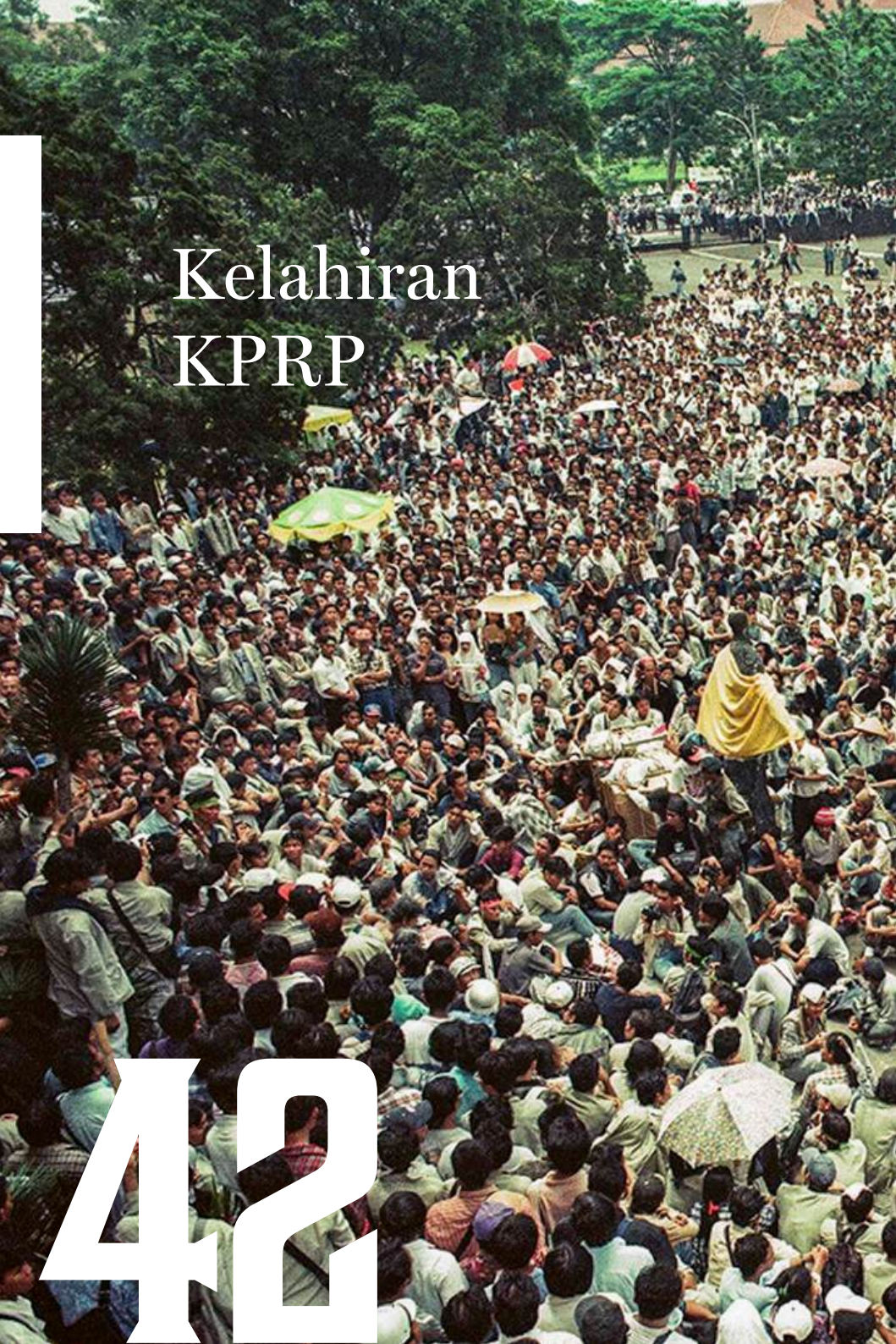
²⁹ Keterangan pelaku aksi.

³⁰ Dirangkum dari arsip dan dokumen pribadi.

Setelah rentetan aksi massa yang terjadi selama 1997, bersamaan dengan perayaan tahun baru 1 Januari 1998, Ramadhan dimulai. Pada bulan ini, situasi mulai kurang kondusif untuk diadakannya aksi-aksi massa dan agenda-agenda politik lain. Di samping masuk waktu puasa, juga akhir semester bagi mahasiswa —ujian, libur semester, dan libur lebaran akan memenuhi jadwal beberapa bulan selanjutnya. Hal itu membuat antusiasme massa berkurang dalam merespons isu-isu politik. Apalagi, ketika tiba-tiba pada 18 Januari 1998, terjadi peristiwa yang seketika menyebabkan situasi “senyap” kembali yakni peristiwa meledaknya bom di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta. Setelah itu, perburuan terhadap para aktivis PRD dan jaringannya kembali terjadi. Namun, sebelum itu terjadi, jaringan PRD lewat “corong organisasi mantelnya”, yaitu KNPD, sudah sempat melontarkan dan berusaha mempopulerkan gagasan “Pemerintahan Sementara”, dengan struktur di tingkatan massa berbentuk Dewan-dewan Rakyat. Usaha mewujudkan Dewan-dewan Rakyat ini mensyaratkan dibentuknya komite-komite atau wadah-wadah perlawanan rakyat di basis-basis massa. Itulah yang sedikit-banyak berusaha diwujudkan beberapa eksponen gerakan di UGM ketika memunculkan ide Aksi Mogok Makan di Filsafat UGM, Februari 1998.



► Aksi boikot Pemilu 1997 di Boulevard UGM. Sumber: AttaSidbarta.

A high-angle photograph of a massive crowd of people, mostly young adults, gathered outdoors. Many are sitting on the ground, while others stand. The crowd is dense and fills most of the frame. In the background, there are lush green trees and a paved area where more people are standing. The overall atmosphere suggests a large-scale public event or protest.

Kelahiran KPRP

42



► Lautan massa memadati Gedung Pusat UGM pada Aksi 11 Maret 1998. Dalam aksi ini patung dengan topeng Soeharto dibakar massa. *Sumber: Dwi Oblo.*



ebisuan gerakan sudah pecah pada 1997 dengan berbagai agenda aksi di Yogyakarta maupun UGM. Namun, aksi-aksi melandai pada akhir Desember sebab bersamaan dengan jadwal Puasa, serta libur semester dan libur lebaran. Karena saat itu Indonesia juga tengah memasuki krisis, ongkos mudik pun tidak terjangkau beberapa mahasiswa perantau. Seorang mahasiswa Filsafat UGM dari Bangka-Belitung, Zul Terry Apsupi, adalah mahasiswa yang terpaksa mendekam di perantauan itu. Ia berkawan dengan Manik Wijil Sadmoko (Filsafat, 1995) dan Danang Ardianta (Filsafat, 1993). Pengalaman menghabiskan libur lebaran di perantauan menjadi salah satu sebab ia sangat bersemangat menyuarakan aspirasi rakyat lewat aksi mogok makan. Admo juga berpikir bahwa berbagai komunitas kampus perlu tempat berkumpul. Keberadaan semacam komunitas amat dibutuhkan agar terus merespons situasi politik jelang SU MPR 1998. Kondisi “adem” kampus, kontras dengan situasi politik nasional yang jelas mengarah ke *status quo*.

Admo yang sering menghuni sekretariat Pijar, suatu pagi *ngopi* ke Kantin Filsafat. Di sana ia bertemu dan mengobrol dengan Irmawati (Filsafat, 1995), Dhohir Farisi, (Filsafat, 1997) dan Ucup (Yusuf Waluyo Jati, Filsafat, 1995). Mereka telat masuk kuliah pagi setelah libur lebaran 1998. Dalam obrolan itu, mereka membicarakan berbagai alternatif bentuk acara yang mampu mendatangkan massa. Acara-acara yang diselenggarakan Persma, misalnya, dinilai belum mampu menarik minat, solidaritas, serta keterlibatan pihak-pihak lain secara luas dan intens. Terlontarlah gagasan untuk melakukan aksi mogok makan, seperti obrolan Admo dengan Terry. Tak lama kemudian, datang Puthut Eko Ariyanto (Filsafat, 1995). Dia pun menawarkan diri sebagai partisipan mogok makan. Beberapa orang datang belakangan dan turut bersedia menjadi peserta aksi: Zul Terry Apsupi (Filsafat UGM, 1987), Esti Sri Rejeki (Filsafat UGM, 1997), dan Sampuran (Filsafat UGM, 1997).

Dari obrolan dengan beberapa kawan itulah Aksi Mogok Makan bermula. Dengan begitu, aksi yang kelak digelar pada 23 Februari 1998 itu bukanlah aksi yang terencana, apalagi melibatkan banyak pihak. Mogok makan dianggap cocok dengan kebutuhan target massa, karena waktu pelaksanaan bisa panjang. Lokasi aksi pun kemungkinan juga menjadi tempat berkumpul. Artinya, punya peluang lebih luas dalam menjaring massa. Perencanaan semakin diperluas dan melibatkan lebih banyak orang. Admo segera menghubungi organisasi sekawan, seperti LPMF Sastra Dian Budaya. Sementara itu, Irmawati dibantu Susilo (Sospol UGM, 1992, aktivis PRD) segera mencari sumber pendanaan. Lantas Faris bersedia membantu menjaga keamanan merangkap seksi acara. Admo juga segera membicarakan aksi dengan Gendhel (Wijaya Harjanata, Filsafat 1993), Danang (Danang Ardianta, Filsafat 1993), dan Arya (Aryaning Arya Kresna, Filsafat 1992) –anggota komunitas musik Sande Monink³¹— Kasino (Wahyu Adi Prabowo, Filsafat 1994). Peran Hamzrut (Sahanuddin Hamzah, Filsafat 1989) sebagai senior juga punya “posisi khusus” di komunitas-komunitas Fakultas Filsafat. Ia cukup berpengaruh dalam proses awal terlaksananya Aksi Mogok Makan. Danang disepakati sebagai ketua dalam kepanitiaan aksi yang mengatasnamakan Keluarga Mahasiswa Filsafat (KMF) itu. Saat itu belum ditentukan jangka waktu berjalannya aksi. Tuntutan aksi juga begitu sensitif kala itu, antara lain Cabut Dwifungsi ABRI, Cabut 5 UU Politik, dan bahkan terang-terangan mengangkat isu anti-Soeharto.

³¹ Didirikan pada 6 Oktober 1996 di UGM oleh Gendhel (Wijaya Harjanata), Gundhul (Roni Hasan), Antariksa dan Kasino (Wahyu Adi Prabowo), Sandhe Monink dibentuk tanpa ada agenda politik apa pun dan hanya ingin silaturahmi dengan peminat musik di kampus. Kegiatan mereka lebih berorientasi pada “kampus, pentas, dan cinta.”. Pijakan dasarnya persahabatan, guyub, dan kegiatan bermusik. Visi Sande Monink adalah “guyub amargo musik, bermusik untuk paseduluran”, sedangkan visinya: pertama, mewarnai dinamika kampus, terutama Filsafat, dengan kegiatan bermusik; kedua, memberi ruang bagi para peminat musik di kalangan mahasiswa filsafat dan fakultas, juga kampus sekawannya.

Seiring waktu, dukungan dan peserta aksi pun bertambah. Selain dari mahasiswa Filsafat UGM, peserta Aksi Mogok Makan berkembang melibatkan beberapa mahasiswa dari kampus lain. Mereka adalah Maharani Candra Dewi IKIP Yogyakarta serta dua orang mahasiswa dari Timor Leste: Calvario Savio (Universitas Widya Mataram) dan Antonio Rangel (Sekolah Tinggi Teknik Nasional/STTNas). Dukungan dan solidaritas mengalir dari berbagai kelompok, baik dari mahasiswa (berbagai fakultas, berbagai komunitas kegiatan, dan berbagai kampus), maupun dari non-mahasiswa (pelajar, seniman, komunitas masyarakat, kelompok pengamen, dan lain-lain). Lokasi Aksi Mogok Makan di depan Fakultas Filsafat berubah menjadi semacam *base camp* bagi para aktivis yang ingin berbagi informasi tentang perkembangan politik mutakhir. Tujuan awal aksi ini perlahan tercapai.

Di halaman depan Fakultas Filsafat tempat berlangsungnya aksi juga cukup strategis karena menghadap ke Jl. Olahraga, Bulaksumur. Trotoar depan gedung fakultas itu juga tempat penumpang bus kota naik-turun. Setiap Minggu, jalan umum itu merupakan jalur padat oleh lalu lalang orang yang sedang berolahraga atau sekadar menikmati libur akhir pekan. Pinggiran jalan sekitar Lembah UGM saat itu banyak dimanfaatkan pedagang kaki lima. Sunday Morning (Sande Morning) disingkat SanMor –sebutan khas aktivitas pada Minggu pagi di seputar UGM— sedikit banyak berperan dalam mempopulerkan aksi. Selain memasang spanduk berisi program tuntutan, panitia aksi juga menyediakan spanduk besar. Spanduk itu disediakan agar orang-orang bisa bebas menulis kemarahan dan unek-unek mereka terhadap Rezim Soeharto. Dari situlah banyak orang dari berbagai komunitas dan kelompok yang tertarik dan bergabung ke posko, banyak terjadi diskusi politik, dan lain sebagainya³².

³² Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

Apakah aksi berjalan lancar? Tentu tidak. Kala malam tiba, situasi aksi kerap menegangkan. Aparat kepolisian tak menganggap enteng aksi itu. Namun, mereka juga tak bisa semena-mena membubarkan aksi. Alhasil baragam cara diusahakan untuk membubarkan aksi —termasuk menempatkan banyak informan dan intel di kampus. Sebab itu, para peserta aksi selalu berjaga-jaga menghadapi kondisi terburuk. Mereka mesti bersiap bila sewaktu-waktu dievakuasi oleh tim yang ditugaskan, atau disembunyikan di salah satu ruang dan dibekali batu atau senjata seadanya, untuk pertahanan diri bila dibutuhkan. Beruntung, salah satu jejaring aksi saat itu adalah para mahasiswa dari Timor Leste. Pada 1998, isu soal kemerdekaan Timor Leste juga tengah mengemuka. Mereka memang tampak lebih siap membela diri, karena kerap membawa pedang, yang dibawa ketika membantu menjaga areal aksi. Dalam konteks demikianlah, terjadi interaksi yang intens antar-fakultas, komunitas, kampus, kelompok, organisasi, dan lain-lain. Situasi ini menjelaskan alasan spektrum aksi dan organ yang terlibat ke depan bisa sangat beragam.

Membakar Patung Soeharto



alah satu agenda SU MPR 11 Maret 1998 adalah melantik Soeharto jadi presiden ketujuh kali. Di UGM, perhelatan itu disambut ‘meriah’ dengan aksi pembakaran patung yang menyerupai Soeharto. Para peserta aksi tercengang, bahkan panitia aksi di pelataran Gedung Pusat UGM itu pun tak tahu akan ada “sisipan berbahaya”.³³ Saking kuatnya cengkeraman rezim di tubuh pers, peristiwa pembakaran patung mirip Soeharto itu tidak diberitakan oleh satu pun media massa dalam negeri.

³³ Terjadi pula penangkapan terhadap aparat intelijen oleh mahasiswa yang tak dapat dicegah dan berbuntut pemukulan terhadap aparat berpakaian preman tersebut sampai berdarah-darah.



► Sesosok patung dengan kepala tertempel muka Soeharto tengah diarak oleh massa aksi, 11 Maret 1998 di Gedung Pusat UGM. Sumber: Dwi Oblo.

Justru peristiwa itu dapat beredar luas di luar negeri berkat laporan kontributor *Associated Pers*, Lexy Rambadeta dan beberapa kawan lain. Meski tak bergema lewat media massa nasional, momen itu mendongkrak keberanian dan militansi massa untuk menyuarkan aspirasinya, terutama di Yogyakarta.

Muridan S. Widjojo, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berpendapat dalam *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98* (1999) ada dua tipe aktivisme mahasiswa waktu itu: Gerakan Anti-Orde Baru (GAOB) dan Gerakan Koreksi Orde Baru (GKOB). GAOB memiliki sejarah panjang ketimbang GKOB. Gerakan ini telah dirintis sejak akhir 1980an, pasca-gerakan mahasiswa dibabat pada 1978. Gerakan ini juga bersifat radikal, independen, menolak dominasi Orde Baru. Mereka memandang bahwa desain politik Orde Baru dengan sengaja merampas hak-hak asasi dan daulat rakyat. Oleh karena itu, mereka menganggap isu-isu seperti pemilu semu, Dwifungsi ABRI, dan Paket 5 UU Politik adalah akar masalah pemerintahan Orde Baru. Sementara GKOB muncul belakangan setelah krisis moneter, ekonomi dan politik. Para pelakunya sering menyebut diri sebagai penganut “Gerakan Moral”. Berbeda dengan GAOB, gerakan moral ala GKOB memandang krisis di berbagai bidang saat itu disebabkan oleh kesalahan dan ketidakmampuan rezim mengatur negara. Mereka tidak menolak sistem politik Orde Baru, tapi mengutamakan koreksi terhadap praktik politik³⁴. Meski bukan yang pertama, tapi dua tipe gerakan ini melebur pada aksi demonstrasi 11 Maret 1998³⁵.

³⁴ Muridan, dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal.155–156.

³⁵ Terjadi semacam “kolaborasi” antara dua jenis Gerakan Mahasiswa ini, meski sebelumnya, tak lama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996, “kolaborasi” sudah pernah terjadi, yaitu pada aksi KOKAM-UGM pada 18 November 1996. Aksi KOKAM-UGM (Komite Keprihatinan Mahasiswa-Universita Gadjah Mada) adalah aksi advokasi sekaligus solidaritas atas digebuknya aksi KAPP 7 November 1996 dan ditangkapnya seorang peserta aksi KAPP ini oleh aparat.

Aksi kali itu dilihat Keluarga Mahasiswa UGM (KM-UGM). Biasanya, mereka cenderung “bersikap hati-hati” terhadap “pengaruh” gerakan mahasiswa radikal (GAOB). Namun, perkembangan situasi saat itu tampaknya membuat mereka tak punya pilihan untuk menolak penggabungan berbagai macam kelompok dalam satu aksi. Para mahasiswa beberapa Perguruan Tinggi lain pun hadir —seperti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Duta Wacana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga³⁶. Hadir juga mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Banking Institute dan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta³⁷. Kelak, unsur GAOB saat itu direpresentasikan dengan jelas oleh sebuah komunitas yang sedang berproses semakin besar, solid dan radikal di Kampus Filsafat UGM. Komunitas ini terbentuk bersamaan dengan diselenggarakannya Aksi Mogok Makan yang, seiring waktu, berubah menjadi *base camp* pengumpul dukungan dan massa, juga menjadi organ multi sektor, multi fakultas, multi kampus, pemintal jejaring pergerakan yang lebih luas dan radikal dalam metode dan tuntutan.

Kepanitiaan aksi saat itu di bawah pimpinan Ridaya La Ode Ngkowe (Ketua SM-UGM sekaligus Ketua Panitia Aksi). Ia sudah menentukan beberapa titik berkumpulnya massa: Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Sebagian lagi

³⁶ Nama-nama Universitas pendukung ini didapat dari Skripsi Angga Apip W.S. “Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia”, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hal. 44–45.

³⁷ Sumber keterangan dari saksi mata dan peserta aksi, Heru Setiawan dan Ikro’.



► Massa di Gedung Pusat UGM pada aksi 11
Maret 1998 Sumber: Dwi Oblo.



► Massa menuju Gedung Pusat UGM pada aksi
11 Maret 1998. *Sumber: Dwi Oblo*

berkumpul di Gelanggang Mahasiswa UGM. Berdasar undangan, aksi dimulai dengan berkumpul di Gelanggang Mahasiswa pukul setengah sembilan pagi, kemudian reli menuju Gedung Pusat UGM. Para peserta juga diimbau memakai jaket almamater, dan juga tambahan informasi yang membesarkan hati mereka karena aksi tersebut akan didukung dosen dan guru besar UGM. Di Gedung Pusat UGM, mereka pun bertemu massa lain dari berbagai arah.³⁸

Di pelataran sebelah utara Gedung Pusat UGM, ribuan massa mahasiswa berkumpul. *Associated Press* (AP) mengestimasi jumlah massa berkisar di atas 10.000 orang. Sepanjang Jalan Kaliurang, sebelah barat Gedung Pusat, aparat bersenjata lengkap tampak berjaga. Di depan teras lantai dua Gedung Pusat sebelah utara, tepat di atas tangga, empat buah spanduk terpasang di antara pilar-pilar besar gedung. Salah satu spanduk berwarna merah bertuliskan “Keluarga Besar Mahasiswa IKIP Yogyakarta”. Ada pula spanduk bertuliskan data hasil jajak pendapat Majalah *Balairung*: “Hanya 14% Mahasiswa UGM Setuju Soeharto. Sisanya?” Sementara sebuah spanduk lainnya berisi tiga tuntutan rakyat yang dirangkum dalam slogan “Tritura: Turunkan Harga; Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Ciptakan Pemerintahan Bersih”. Terpasang pula dua baliho besar di kiri-kanan tangga lantai dua Gedung Pusat. Di sebelah kiri berisi tuntutan berbahasa Indonesia: “Tolak Soeharto” dan “Turunkan Harga”. Lalu di sebelah kanan berbahasa Inggris: “Refuse Soeharto” dan “Lower Price”. Bendera merah putih pun diturunkan setengah tiang. Aksi berlangsung bak sebuah mimbar bebas, diisi orasi-orasi. Beberapa akademisi ikut hadir, di antaranya: Prof. T. Jakob, Prof. Koento Wibisono, Amien Rais,

³⁸ Arsip selebaran aksi (koleksi Asisi) dan keterangan dari Nurhadi (mantan Sekum BEM-UGM yang saat itu bertugas sebagai juru bicara aksi), 15 April 2021.





► Aksi 11 Maret 1998 di Gedung Pusat UGM. Tampak Haris Rusly Moti bertopi putih dan berkemeja kotak. Sumber: Dwi Oblo.

Riswanda Imawan, Jamaluddin Ancok³⁹, Damardjati Supadjar, dan Revrison Baswir.

Di tengah berlangsungnya orasi, sekitar pukul sebelas, tiba-tiba muncul arak-arakan. Mereka memikul figur menyerupai manusia, setinggi sekitar dua meter. Bagian atas figur itu tertutup kain kuning. Sontak perhatian massa tertuju kepada figur yang diarak itu. Ketika sampai di tengah lautan massa, kain kuningpun disingkap. Seketika, tampak wajah yang sangat dikenali seluruh rakyat Indonesia, “The smiling General” —Soeharto. Sontak, gemuruh tepuk tangan terdengar. Patung pun kembali diarak maju dan diletakkan di samping kanan-depan mimbar. Seiring goyangan akibat gerak langkah penggotongnya, patung itu tampak seperti berjalan sambil menari. Ini karena bentuk tangan berjari lima itu dapat ikut bergoyang, layaknya *ogoh-ogoh*. Patung itu diikuti atribut berupa baliho besar berisi gambar dan tulisan: “Tolak Soeharto”. Setelah orasi dari Damardjati Supadjar, Amien Rais, dan Revrison Baswir selesai, patung bergambar wajah Soeharto itu pun dibakar. Massa aksi menyambut dengan tepuk tangan meriah. Selepas pembakaran patung dan pembacaan pernyataan yang dibacakan ketua panitia aksi, seorang mahasiswa Ajjianto D.N. kemudian memimpin diikrarkannya Sumpah Mahasiswa⁴⁰.

³⁹ Nama-nama akademisi pendukung ini didapat dari Skripsi Angga Apip W.S., Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hal. Tambahan dua nama terakhir (Damardjati Supadjar, dan Revrison Baswir) merupakan keterangan saksi mata dan peserta aksi, Antonino Delimas.

⁴⁰ Dalam sejarahnya, sumpah ini dibacakan pertama kali pada 29 Oktober 1988 dalam acara peringatan Sumpah Pemuda (yang karena hambatan teknis, lewat sehari dari tanggal biasanya dia diperingati). Sumpah Mahasiswa sebenarnya adalah sebuah puisi ciptaan seorang mahasiswa Hukum UGM, 1984 bernama Afnan Malay. Dalam acara OPSPEK Universitas mahasiswa baru angkatan 1995, sumpah ini pernah membuat seorang pemandu di Gugus Balairung (Nining) harus menghadapi sidang panitia OPSPEK lain karena pemandu tersebut meminta salah satu mahasiswa baru memimpin seluruh peserta dalam satu gugus untuk mengikrarkannya. Sumpah Mahasiswa sebelum tahun 1998 dianggap “berbau radikal kiri”, dilarang keras dibacakan di lingkungan Senat-BEM, sebagaimana juga himne “Darah Juang” sebelumnya tak pernah diizinkan untuk dinyanyikan di lingkungan tersebut.



BUAH JAMBU
BUAH KEDONDONG
turunkan
SOEHARTO
DONG!

HI-GRADE

► Massa menuju Gedung Pusat UGM pada aksi 11 Maret 1998. Sumber: Dwi Oblo.



► Sisi lain dari aksi 11 Maret 1998 di Gedung Pusat UGM. *Sumber: Dwi Oblo.*





► Massa menuju Gedung Pusat UGM pada aksi 11 Maret 1998. *Sumber: Dwi Oblo.*

Lalu, siapa yang menyiapkan aksi pembakaran itu? Itu adalah buah tangan para (calon) seniman muda dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang biasanya berkumpul di bekas Kampus ISI-Gampingan (Komunitas Gampingan)⁴¹. Menurut keterangan beberapa saksi yang terlibat dalam Aksi Mogok Makan, mereka memang sudah mempersiapkan aksi pembakaran itu. Sementara patung itu telah disiapkan pada malam sebelum aksi. Patung itu terbuat dari material mudah terbakar dan dibuat dari rangka bambu berlapis kertas tebal, kemudian dicat warna hitam. Bentuk anyaman berujung membulat menyerupai kepala di bagian atas lalu sekadar ditemplei sobekan poster Soeharto yang biasa dipasang di dinding depan kantor-kantor resmi instansi pemerintah. Di bagian bawah sebelah dalam rangka bambu diikatkan beberapa kantong plastik kecil berisi minyak tanah yang dibeli saat pagi menjelang patung ditarak. Aktivis mahasiswa asal Timor Leste, Lirio, yang menyiramkan minyak ke patung sebelum api dinyalakan.

Gesekan, tarik menarik, serta pengaruh antar elemen gerakan sebagaimana yang terjadi antara GAOB dan GKOBB saat itu menghasilkan resultan ke arah gerakan yang makin membesar dalam jumlah massa, makin inklusif dari segi kepesertaan, dan sasaran politik yang lebih strategis. Pernak-pernik ketegangan tentu masih terjadi akibat “belum tuntasnya perdebatan” dan masih terus terjadinya dialektika. Kadang diperlukan semacam

⁴¹ Komunitas Gampingan ikut bergabung turun ke jalan dalam aksi massa, serta membantu pembuatan perlengkapan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di kampus-kampus lain seperti di UGM, Sanata Dharma, UMY, UII, selain aksi demonstrasi yang bertitik kumpul di (bekas gedung) kampus mereka sendiri tentunya. Kadang, mereka bergerak sendiri-sendiri. Baliho besar pertama kawan-kawan Komunitas Gampingan pada waktu itu dibuat sebagai salah satu perlengkapan aksi demonstrasi cikal bakal KPRP. Gaya baliho semacam ini kemudian menjadi semacam “ciri” bentuk baliho selanjutnya kawan-kawan Komunitas Gampingan, yang selanjutnya pasca Soeharto mundur, mengorganisir diri menjadi Lembaga Budaya Kerakyatan “Taring Padi” (LBK Taring Padi).





► Patung seperti Soeharto dibakar massa pada aksi 11 Maret 1998. *Sumber: Dwi Oblo.*

“faith accomply” yang, menurut tinjauan *post factum*, justru bersifat progresif, semakin meradikalisir gerakan, memajukan tingkat kesadaran politik massa. Contoh yang dimaksud sebagai *“faith accomply”* di sini misalnya dalam aksi 11 Maret 1998 ini. Pihak panitia aksi sudah mempersiapkan susunan acara, atribut dan perlengkapan aksi, estimasi siapa saja yang akan hadir, dan aturan bagi peserta aksi (salah satunya memakai jaket almamater). Pembakaran Patung Soeharto bukanlah hal yang sudah disepakati, tak ada skenario itu dalam perencanaan acara. Demikian juga soal kepesertaan aksi. Jika pada pengujung 1996 pihak birokrat kampus melarang mahasiswa non-UGM ikut serta dalam aksi demonstrasi di areal kampusnya⁴², maka pada aksi 11 Maret 1998, hal demikian tak terbandung.

Peristiwa Pembakaran Patung Soeharto itu layak disebut sebagai salah satu tonggak penting demistifikasi rezim Soeharto. Apalagi, membakar patung menyerupai tokoh pemimpin negara itu amat berisiko. Sebagai pembanding, pembakaran foto presiden Indonesia kelima (Megawati) dan wakil presiden (Hamzah Haz) pada 2003, lima tahun pasca-Reformasi, dalam aksi demonstrasi FPRM di Bundaran UGM mengakibatkan dua pelakunya Ignatius Mahendra Kusumawardhana (Ketua LMND) dan Yoyok (aktivis

⁴² Tentu dengan bahasa yang diperhalus: jika mahasiswa non UGM ikut aksi di UGM, pihak kampus (rektorat), menyatakan “tidak akan bertanggungjawab” jika aparat memukul aksi mahasiswa (seperti terjadi pada aksi KAPP pada 7 November 1996, aksi dipukul, satu orang (Harris Sitorus) ditangkap, dibawa ke Garnisun.) Pernyataan rektor ini tercatat dalam dokumen kronologi aksi KOKAM-UGM, 18 November 1996, dalam sesi dialog antara mahasiswa dan Rektor. Aksi KOKAM-UGM adalah aksi protes atas kejadian dalam aksi KAPP. Dalam perkembangannya, sikap ini tak bisa dipertahankan. Beberapa hal berpengaruh terhadap perubahan sikap ini. Faktor utama adalah dorongan arus bawah (tuntutan mahasiswa, terutama yang radikal) yang tak tertahankan lagi. Sedang faktor pendukung adalah perubahan kepemimpinan yang terjadi di Rektorat. Ichlasul Amal dilantik pada 23 Maret 1998, menggantikan Sukanto Reksohadiprodjo (memimpin sejak 1994). Ichlasul Amal mengambil sikap lebih longgar dalam arus pasang naik Gerakan Mahasiswa. Proses pelantikannya pun diiringi aksi mahasiswa yang menuntut Mendikbud, Wiranto Arismunandar mencabut tudingannya bahwa mahasiswa amatiran dalam soal politik.

SPI) divonis dengan tiga tahun bui di Penjara Wirogunan, Yogyakarta. Beberapa nama lain mengalami nasib serupa di tahun yang sama, misalnya Ignas Nong Mau di Surabaya, serta Kiastomo dan Bilal di Jakarta. Meninjau sejarah lebih jauh ke belakang pun banyak aktivis masuk penjara karena mengkritisi Soeharto, misalnya: para aktivis FAMI yang harus dihadapkan ke pengadilan karena melakukan aksi pada 14 Desember 1993 di Jakarta yang menuntut diselenggarakannya SI agar Soeharto mempertanggungjawabkan segala penyelewengannya⁴³. Dua aktivis Pijar-Jakarta dijerat dengan pasal 134 KUHP, “Penghinaan Presiden”: *pertama*, kasus Nuku Sulaiman, karena stiker “SDSB: Soeharto Dalang Segala Bencana” dan *kedua*, kasus Tri Agus Susanto Siswomihardjo, karena tulisannya dalam terbitan mereka “Kabar dari PIJAR”. Sebagaimana dikatakan di awal: Tak satupun media dalam negeri memberitakan Peristiwa Pembakaran Patung Soeharto tersebut. Namun momen itu justru memicu keberanian dan militansi massa.

KPRP Dibentuk



emula Aksi Mogok Makan diketuai oleh Danang Ardianta, tapi suatu kali keluarganya di Gunungkidul mendapat ancaman dari aparat. Mereka diminta ke Polda DIY dan ditanyai seputar kegiatan Danang, baik di rumah di Gunungkidul, maupun di Kampus Filsafat, UGM. Orang tuanya diminta mengarahkan Danang untuk menghentikan aksi dan fokus berkuliah. Pihak Polda memang masih menggunakan bahasa halus dan perlakuan wajar. Namun hal itu berubah intimidatif ketika indekos Danang disatroni intelijen. Danang pun terpaksa hidup “bergerilya”, terus berpindah-pindah tempat

⁴³ Irene H. Gayatri dalam Muridan, *Penakluk Rezim Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 102.

tinggal⁴⁴. Situasi kian riskan membuat posisi Danang sebagai ketua aksi harus diganti. Maka itu, posisinya diganti Helmi (Fisipol, 1994 sekaligus aktivis Dema UGM).

Aksi sempat dihentikan kepolisian pada 2 Maret. Para peserta pun diberitakan berpindah ke tengah lingkungan Fakultas Filsafat UGM. Pihak kepolisian mengatakan bahwa aksi itu “disusupi pihak luar”, terbukti dengan keterlibatan Maharani Candra Dewi, seorang mahasiswa IKIP dan Antonio Rangel, mahasiswa Timor Timur. Polisi menganggap aksi itu “tidak murni” mahasiswa UGM lagi. Tindakan panitia menyediakan spidol dan kertas yang dapat digunakan masyarakat juga dikategorikan “membentuk opini umum” dan “membahayakan keamanan pelaksanaan SU MPR yang sedang digelar di Senayan, Jakarta.” Sri Soeprapto, Dekan Filsafat waktu itu, juga menyaksikan pembubaran aksi. Ia mengatakan bahwa pihaknya berusaha memberikan pengertian kepada mahasiswa maupun aparat. Ia sebenarnya tidak keberatan dengan aksi tersebut jika aksi dijalankan di dalam kampus dan tanpa “pihak luar” ikut serta. Soeprapto juga mengatakan jika ia bertanggung jawab atas aksi.⁴⁵ Namun ternyata aksi hanya pindah tempat, dan baru dihentikan pada 9 Maret karena alasan medis.

Usai aksi berhenti, mempertimbangkan dukungan massa dan organ yang telah terkumpul, para aktivis merasa perlu wadah organisasi yang lebih solid. Untuk itu, dibentuklah organisasi baru dengan struktur kepemimpinan berbentuk presidium bernama Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Struktur presidium ini beranggotakan wakil dari beberapa organ yang menyatakan siap mendukung secara organisasional. Presidium KPRP diketuai Haris Rusly Moti (merangkap anggota),

⁴⁴ Wawancara dengan Bagus “Aus” Kris Bawono, adik kandung Danang Ardianta, 14 April 2025.

⁴⁵ *Jawa Pos*, 3 Maret 1998, “Aksi Mogok Makan Dibubarkan Aparat”.

dan empat anggota lain: Bayu Kusuma (FNE-UGM 1994), Danang Ardianta, Joko Kanigoro (Serikat Pengamen Indonesia), dan Victor Yasadhana (Administrasi Negara, sekarang MKP, UGM 1992). Mahasiswa Timor Leste juga mendukung, tapi tidak bersedia tercatat secara formal.

Sebelum kecamuk Kudatuli 1996, PRD dan SMID Yogyakarta juga telah mengorganisir basis organisasi di kampus-kampus. Pasca-Kudatuli, kampus-kampus yang dulunya menjadi basis PRD-SMID, tetap mempertahankan api pergerakan dengan bertransformasi membentuk komite-komite aksi taktis. Di luar itu ada banyak kekuatan politik Pro-Demokrasi (intelektual, NGO dan organisasi perjuangan) dan gerakan mahasiswa lainnya, ikut menggalang jaringannya masing-masing. Komite-komite aksi yang dipicu oleh PRD-SMID inilah beberapa di antaranya yang kemudian ikut menginisiasi berdirinya KPRP, atau setidaknya berjejaring menjadi himpunan atau menjadi irisan-irisan dalam turut menyemarakkan khasanah pergerakan di Yogyakarta. Sementara itu, PRD-SMID-Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) di tingkat akar rumput dan basis rakyat, juga berhasil membangun basis massa di kalangan PDI Pro-Mega, Gerakan Rakyat dan kalangan pekerja seni, atau paling tidak memengaruhi di lapisan luas massa rakyat. Mereka-mereka ini juga ikut membangun himpunan KPRP atau ikut beririsan massa dan pengaruh dengan KPRP. Dua level lapisan massa Rakyat dan Mahasiswa inilah yang membidani KPRP sebagai komite taktis organ perlawanan rakyat, manakala PRD-SMID-JAKKER absen di permukaan politik riil.

Basis utama KPRP adalah UGM, dan berusaha memperluas jejaring di tempat lain, seperti Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Wangsa Manggala (UWM), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN “Veteran”), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya (UAJY), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

“Syariah Banking Institut” (STIE “SBI”), dan lain-lain. Bukan hanya kampus, komite-komite rakyat seperti Serikat Pengamen Indonesia (SPI), adalah organisasi yang diajak terlibat secara struktural dalam Presidium KPRP. KPRP adalah suatu upaya untuk memperluas spektrum perlawanan terhadap rezim Soeharto. Waktu itu, yang melakukan perlawanan terhadap Presiden Soeharto masih hanya “segelintir”, dalam arti hanya dilakukan oleh “PRD dan kawan-kawan”. Organ-organ formal seperti organisasi Cipayang, dan organisasi internal seperti Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa belum melakukan perlawanan secara terbuka kepada Pemerintah Soeharto. Mereka masih mengambil sikap moderat dan tidak mau mengambil sikap radikal dan konfrontatif.⁴⁶

KPRP berusaha memperluas organisasi dalam dua cara: *Pertama*, perluasan secara programatik berbagai macam organisasi, formal maupun non formal, kampus maupun non-kampus, agar terlibat dalam gerakan menjatuhkan Soeharto. Kekuatan moderat yang tadinya masih ragu-ragu, takut-takut dalam melakukan perlawanan konfrontatif terhadap Soeharto dicoba untuk digalang. Dalam perluasan ini, bisa saja secara programatik setuju, tapi tidak bersedia masuk dalam struktur KPRP, seperti yang terjadi terhadap Komunitas Gampingan. *Kedua*, KPRP juga mencoba melibatkan organ lain secara struktural, yaitu mengajak organisasi-organisasi formal maupun non-formal dan organisasi-organisasi intra kampus menjadi bagian KPRP. Banyak juga organisasi mahasiswa intra-kampus tingkat fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Pers-pers Mahasiswa Fakultas, unit-unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, juga komite-komite aksi di kampus-kampus untuk masuk, menjadi bagian anggota Presidium KPRP.

⁴⁶ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

Kelak, setelah aksi deklarasi yang diwarnai bentrok massa-aparat pada 2 April 1998, struktur Presidium KPRP dinilai tidak efektif mengomando gerakan dan memenuhi tuntutan keputusan-keputusan taktis. Sistem presidium pun diganti struktur yang lebih efektif, sehingga programnya lebih cepat, yakni ketua langsung memimpin gerakan organisasi. Ketika masih berbentuk presidium, pengambilan keputusan harus mengumpulkan seluruh organ yang terlibat untuk rapat, sehingga bergerak lambat. Bentuk komite dipilih sebagai organ taktis perjuangan karena mampu merespons secara cepat kondisi sosial politik dan budaya masyarakat dan menuntut perubahan yang cepat. Komite serupa kepanitian perjuangan sementara, berjangka waktu pendek dan bersifat darurat dan cepat untuk memperjuangkan isu tertentu. KPRP tidak perlu merumuskan ideologi atau garis politik apa yang akan dipakai sebagai landasan perjuangannya, serta merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Maka itu KPRP bisa bergerak amat luwes. Manakala melakukan kerja berjejaring atau membangun aliansi, koalisi atau front aksi, tidak terlampau sulit memutuskan ikut bergabung atau tidak, dan terlibat dalam agenda bersama yang dipandang strategis dan taktis. Hal ini menguntungkan KPRP, sebab bisa menerima siapa saja untuk bergabung menjadi simpatisan atau pun partisipan sehingga bisa mewadahi masyarakat luas. Organ-organ yang sebelumnya mempunyai wakil di presidium dilibatkan dalam struktur baru KPRP di bawah Sekjen, dan dikoordinasikan dalam Divisi Pengembangan Organisasi⁴⁷. Struktur anyar KPRP dipimpin Haris Rusly Moti sebagai Ketua, Fendry Ponomban sebagai Sekretaris Jenderal, Manik Wijil Sadmoko menempati Divisi Pengembangan Organisasi; Divisi Agitasi dan Propaganda

⁴⁷ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

dipimpin oleh Puthut Eko Ariyanto serta Divisi Dana dipegang oleh Irmawati.⁴⁸

Admo, sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Organisasi sudah memiliki dan mengumpulkan hampir semua kontak massa sejak Aksi Mogok Makan. Lewat semua jaringan yang sudah dipunyai, didoronglah pembentukan komite-komite lain di berbagai kampus dan komunitas. KPRP mendorong banyak pembentukan organisasi dengan memanfaatkan keberadaan aktivis-aktivis lama maupun orang-orang baru yang datang ke Fakultas Filsafat. Mereka didorong untuk kembali mengorganisir di kampusnya masing-masing, membuat organisasi-organisasi yang satu spektrum dan segaris dengan KPRP.⁴⁹ Untuk memperluas jangkauan, KPRP membuat media sendiri. Ada tiga jenis media yang dibuat saat itu: Selebaran yang setiap hari harus ada; media internal di posko (semacam majalah dinding) untuk memberikan informasi perkembangan politik –yang biasanya disusun dari informasi di koran; dan *Bongkar*, semacam tabloid mini, terinspirasi dari *Wa'Isлама* yang selalu ada di masjid-masjid saat salat Jumat. Kelak, *Bongkar* diperjualbelikan dan banyak menyumbang bagi keuangan KPRP.

KPRP menjadi magnet bagi jiwa-jiwa merdeka kalangan muda. Komite ini tidak pernah terjebak dalam ideologi tunggal yang dogmatis dan kaku. Siapa saja, dengan pandangan politik apa saja, boleh masuk KPRP —bahkan yang tidak politis dan

⁴⁸ Ada juga Divisi Perlengkapan, tapi tidak ada yang ingat siapa yang menjabat, begitu pula data pendukung. Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

⁴⁹ Mereka tak hanya dari UGM, tapi juga dari Sanata Dharma (Ian dan Anto 'Profesor'), ada IKIP (Edi Sutopo), ada UII (Koko dan Iwan), ada Atmajaya (Heru Setiawan), ada Taman Siswa, Widya Mataram, Wangsa Manggala (Nanang), juga siswa Muhammadiyah I (Darwin), dan lain-lain. Kemudian terbentuklah SOMASSI di Sanata Dharma, AMUKRA di UPN, Gapci di lingkaran pelajar Muhammadiyah, dan lain-lain. Organ-organ ini akan selalu diajak ketika diadakan aksi.

ideologis pun juga boleh bergabung. Partisipasinya juga sangat cair —bahkan tidak mengenal sistem keanggotaan. Ada macam-macam “ideologi dan kecenderungan tendensi “ideologi” di KPRP, tetapi hal itu tidak menjadi faksi yang memecah kesolidan organisasi. Bahkan, yang sekadar ikut-ikutan sebagai penggembira juga banyak. Hal lain yang dapat membuat pergerakannya luwes adalah karena KPRP tidak secara tegas memilih garis politik dan tidak menyatakan diri sebagai organisasi massa, melainkan hanya sebagai komite. Pilihan semacam ini disorongkan oleh kenyataan yang kuat, bahwa entitas KPRP adalah gerakan politik sekaligus gerakan budaya. Bila KPRP hanya terjebak menjadi hanya gerakan politik, maka akan kurang luwes bergerak. Dengan berada dalam matra gerakan politik dan gerakan budaya, KPRP mampu mengkreasi pergerakan politik yang kreatif dan bertenaga politik yang kuat, dan tidak menjemukan. Hampir semua aksi massa yang dilakukan KPRP selalu bersalut matra gerakan budaya, walaupun waktu itu mungkin tidak disadari dan diniatkan begitu.

Lantas apa hubungan antara PRD dan KPRP? Usai peristiwa 27 Juli 1996, PRD merampingkan struktur menjadi dua komite: pusat dan kota. Tidak pernah ada arahan dari Komite Pimpinan Pusat PRD agar melakukan Aksi Mogok Makan di Fakultas Filsafat UGM. Pun tak ada pula arahan dari KPK PRD Yogyakarta. Sebelum terbentuknya Dewan Nasional (DN) PRD pada Agustus 1997, pengorganisan PRD dibagi dua level: di kaum miskin kota dan mahasiswa. Admo saat itu didapuk sebagai ketua komite pengorganisan mahasiswa Yogyakarta. Sementara, DN PRD memutuskan konsentrasi pengorganisan dipusatkan di Jakarta.⁵⁰ Sebab itu, PRD memindahtugaskan kader besar-besaran dari berbagai kota ke Jakarta untuk menyambut momentum SU MPR

⁵⁰ Pernyataan ini Nining Wahyuningsih dikutip dari hasil transkrip diskusi dalam *chatting* WAG KPRP, dikerjakan Yeri Nicolaus Borang, *Op. Cit.*

1997. Sementara itu, daerah-daerah di luar Jakarta diarahkan sebagai penyangga untuk memanaskan atmosfer politik. Bisa jadi lontaran itu murni inisiatif Admo, yang sedang menjalankan fungsi pengorganisasian di kalangan mahasiswa, seperti penugasan atau wewenangnya, ingin menciptakan panggung pergerakan sesuai anjuran DN PRD.⁵¹ Yang jelas tidak ada instruksi dari PRD saat itu, yang ada hanyalah buat sebanyak mungkin kegiatan.⁵² Jadi, berdirinya KPRP bukan instruksi langsung atau agenda tersembunyi PRD yang dijalankan oleh Admo, melainkan sekadar membentuk wadah pergerakan untuk merespons momentum saat itu.

Antara Gerakan dan Iklim Pers Mahasiswa



Sebelum masuk pada jalannya aksi-aksi yang dimotori KPRP, akan disinggung terlebih dulu soal peran pers mahasiswa. Dimulai pada 1978, proses eliminasi perpolitikan mahasiswa pada 1978 ikut berimbas terhadap dunia pers mahasiswa⁵³. Bersama dewan mahasiswa, pers mahasiswa juga ikut dibekukan pada awal 1978. Meski enam bulan kemudian pers mahasiswa diizinkan aktif lagi, karena muncul kembali protes-protes mahasiswa, tak genap setahun pers mahasiswa kembali dibredel rezim. Ada kaitan antara pers mahasiswa dengan timbul dan berlangsungnya protes-protes mahasiswa menolak diberlakukannya NKK/BKK⁵⁴.

⁵¹ Sayangnya, hal ini tidak bisa diklarifikasi oleh Admo, karena saat proses penulisan, kontak dengannya telah terputus.

⁵² Namun menurut Nining tidak ada instruksi soal bentuk aksi. “Yang ada hanya merespons agenda SU MPR dan memang butuh sebanyak mungkin kegiatan,” Pernyataan Nining Wahyuningsih ini dikeluarkan dalam FGD Tim Produksi Buku KPRP, dikutip dari transkrip FGD.

⁵³ Obrolan via Whatsapp dengan mantan Pemimpin Umum *Universum*, Achmad Charris Zubair, 18 Januari 2021.

⁵⁴ Disarikan dari Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 25-27.

Namun, selama kepemimpinan Rektor Koesnadi Hardjasoemantri (menjabat 1986–1990) mahasiswa UGM leluasa berkegiatan. Ia memberi waktu dan juga melibatkan mahasiswa sebagai pembicara di setiap diskusi atau seminar yang diselenggarakan fakultas. Momentum keterbukaan itu dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan aktivis mahasiswa. Selain momentum yang mendukung, Majalah Balairung, pers mahasiswa tingkat universitas di UGM, punya andil besar memberi semangat bagi tumbuhnya kegiatan pers mahasiswa di tingkat fakultas. Selepas kegiatan Pendidikan Pers Mahasiswa se-Indonesia yang diselenggarakan lembaga pers itu pada awal 1987, kegiatan pers mahasiswa di UGM tumbuh subur. Majalah-majalah mahasiswa yang semula vakum hidup kembali. Fakultas-fakultas yang belum mempunyai lembaga pers mahasiswa segera merintisnya. Salah satu peserta pendidikan itu adalah Yayan Sopyan, mahasiswa Filsafat UGM, 1984. Bersama beberapa kawannya saat itu –di antaranya Sugeng Bahagijo, Andi Munajat, Hari Subagjo, dan Badrus Salam— menggagas pers mahasiswa di Fakultas Filsafat, UGM⁵⁵.

Yayan lekas mengonsolidasikan pengurus Senat Mahasiswa dan sejumlah mahasiswa Filsafat yang cukup berminat terhadap kegiatan intelektual dan aktivisme. Tidak sulit menemukan mahasiswa jenis ini, karena Yayan juga aktif di forum-forum diskusi di fakultasnya. Tak begitu lama, terbentuklah Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat (BPMFF) UGM. Biro ini menerbitkan sebuah majalah bernama *PIJAR*. Beberapa pengurus pertamanya antara lain: Yayan Sopyan, Baskoro, Hari Subagyo, Sugeng Bahagijo, Drajat, Herlambang Yudo, Erwin Nizar, Badrus Salam dan Andi Munajat.⁵⁶ BPMFF Pijar resmi berdiri pada 1987.

⁵⁵ Disarikan dari obrolan via Whatsapp dengan Yayan Sopyan, 18 Januari 2021.

⁵⁶ F.X. Rudy Gunawan dkk., *Menyulut Laban Kering Perlawanan*, Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009, hal. 93-94.

Kelahirannya bersamaan dengan dua momentum: *Pertama*, momen terpilihnya Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat yang baru: Sugeng Bahagijo; dan *kedua*, mulai menggeliatnya aktivitas pers mahasiswa di tingkat universitas, berkat sejumlah kegiatan Balairung. Sebelum ada BPMFF Pijar, tidak ada penerbitan “resmi” mahasiswa Fakultas Filsafat yang hidup. Yayan dan koleganya memang pernah menerbitkan buletin *Dialogika*, terbitan Lingkungan Belajar Dialogika, tapi bukan majalah “resmi”⁵⁷. Terbitan resmi Mahasiswa Fakultas Filsafat sebelumnya adalah *Universum* (1970–1977), yang saat itu tak lagi terbit.

Mengambil momentum terpilihnya ketua senat baru, Yayan mendorong munculnya media baru mahasiswa Fakultas Filsafat yang “resmi” atau berasal dari lembaga yang diakui birokrasi. Semua itu demi keberlanjutan pendanaan dan tradisi formal. Namun, demi independensi, jangan sampai media itu hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi senat mahasiswa maupun birokrasi Fakultas Filsafat. Yayan paham, tidak mungkin membentuk lembaga resmi mahasiswa selain Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Filsafat saat itu. Maka, siasatnya adalah lembaga itu menjadi bagian dari Senat Mahasiswa, tapi tidak punya garis koordinasi langsung dalam struktur organisasinya. Itu sebabnya kegiatan pers mahasiswa jangan sampai berada di tangan Seksi Publikasi Senat Mahasiswa. Seksi Publikasi hanya serupa Departemen Penerangan saja, sedangkan mahasiswa seharusnya bekerja dengan prinsip jurnalisme yang independen. Untuk mengantisipasi, Yayan mendorong penggunaan nama “biro”. Penyebutan ini berurusan dengan sejumlah kepentingan: *pertama*, menarik asosiasi pikiran ke arah independensi; *kedua*, terdengar lebih menarik alias lebih “seksi”; dan *ketiga*, menarik asosiasi pikiran ke persepsi organisasi yang lebih aktif

⁵⁷ Disarikan dari obrolan via Whatsapp dengan Yayan Sopyan, 18 Januari 2021.

dan dinamis. Waktu itu tidak ada fakultas lain yang memakai penyebutan “biro” untuk lembaga-lembaga kemahasiswaannya. Menurut Yayan, itu pilihan sadar politik bahasanya.

Berbeda dengan pendapat umum bahwa pers harus netral, para aktivis pers mahasiswa saat itu justru mengondisikan agar pers mahasiswa lebih berani berpihak pada keadilan dan kebenaran. Jika rakyat menjadi korban ketidakadilan, maka pers mahasiswa harus berpihak kepada rakyat. Jika penguasa korup dan sewenang-wenang, maka pers kampus harus menyerang dan membongkar kasus tersebut. Sejarah pers Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sudah mencatat bahwa pers yang ideal harus berperan sebagai pilar keempat demokrasi dengan menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan.⁵⁸ Pers mahasiswa pada era itu memang bukan menjadi tempat para mahasiswa berlatih menulis artikel atau berita semata. Pers mahasiswa juga menjadi “ajang” mengasah kepekaan sosial-politik dan menjadi corong idealismenya. Lewat aktivitas ini pula jalinan komunikasi para aktivis mahasiswa antar-fakultas bisa terjalin. Pada praktiknya, yang terlibat dalam jaringan itu bukan melulu aktivis pers mahasiswa, melainkan mereka yang berminat kepada isu-isu sosial dan politik.

Begitu pula dinamika yang terjadi dengan Dian Budaya, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Sastra yang didirikan sekitar 1986 oleh beberapa mahasiswa, di antaranya: Ahmad Rapanie, Marsis Sutopo, Ismail Luthfie, dan Iwan Siswanto.⁵⁹ Ketika ramai terjadi kasus Kedung Ombo (akhir 1980an–awal 1990an), tempat mayoritas aktivis gerakan mahasiswa juga terlibat di dalam aksi solidaritas kepada masyarakat Kedung Ombo, para aktivis Dian Budaya pun terlibat di sana. Ketika gerakan mahasiswa

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 105 dan dilengkapi data dari obrolan via whatsapp dengan dengan Yayan Sopyan, 19 Maret 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Ahmad Rapanie. Rapanie kini berprofesi sebagai kepala perpustakaan Sumatera Utara, Marsis Sutopo adalah ketua Ikatan Arkeolog Indonesia, sedangkan Ismail Luthfie adalah seorang filolog.

di Yogyakarta merapikan struktur pengorganisasian dan kemudian mendirikan KM-UGM, Ngarto Februa, aktivis Dian Budaya, juga tercatat adalah salah satu pendirinya. Selanjutnya, mereka yang setuju “ide kiri” atau “progresif” berhimpun di KM-UGM, sedangkan yang “demokratik” berhimpun di Komite Pembela Mahasiswa (KPM-UGM)—organisasi ini lebih banyak mengorganisir isu kampus seperti isu kapitalisme di dunia pendidikan, isu uang kuliah, isu organisasi mahasiswa dan rektorat yang tidak independen, dan lain-lain. Salah satu aktivis Dian Budaya, Danuri (Sastra, 1991), adalah pemimpin KM-UGM sekaligus KPM-UGM pada 1993, menggantikan Edy Haryadi yang saat itu sakit⁶⁰. Pada Agustus 1993, ketika diadakan konferensi Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi di Indonesia (SMDI), Danuri menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan. Kelak nama SMDI disepakati diubah menjadi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), jejaring PRD yang anggotanya turut jadi buron pasca Kudatuli 1996⁶¹.

Yul Amrozi (Sastra Arab, 1992, aktivis Dian Budaya) berkisah bahwa pada sekitar 1993, KM-UGM menempatkan pengorganisasian pers mahasiswa sebagai prioritas pertama. Hasil kerja telaten beberapa orang, di antaranya Yulianto Sigit, Alm. Jojo (Suyono Prihantoro), keduanya Filsafat, 1990— Ojik sendiri, dan beberapa kawan lain saat itu, berhasil membuat elemen KPM yang tadinya minoritas di B-21 (Kantor BPPM UGM, Bulaksumur), sampai kemudian muncul organ baru bernama Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima). Tegaklima terdiri dari “pentolan-pentolan” pers mahasiswa fakultas, beberapa orang dari Tabloid Bulaksumur, dan beberapa orang dari Majalah Balairung. Tegaklima adalah hasil konsolidasi pers mahasiswa. Sepeninggal kepemimpinan Andi Arief dan Nezar Patria karena

⁶⁰ *Ibid.*, hal.75–78.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 48–50.

menjadi pengurus SMID, Ojik dan Ricardo menggantikan posisi mereka sebagai ketua dan sekjen Tegaklima UGM. Jaringan pers mahasiswa menyumbang banyak bagi kader SMY yang kemudian menjadi SMID. Hadirnya Tegaklima menyediakan “darah baru” bagi geliat gerakan mahasiswa di UGM, melanjutkan isu KPM, tetapi dengan kemasan lebih “ramah”⁶².

Pasca-Kudatuli 27 Juli 1996 di Jakarta, sekretariat bersama PRD, SMID, dan organisasi lain di bawahnya yang terletak di daerah Sendowo, Sleman, Yogyakarta, harus ditinggalkan. Barang-barang dari sekretariat Sendowo, selain dievakuasi ke tempat lain atau ditiptikan ke rumah kawan, juga dievakuasi ke sekretariat Dian Budaya. Pertemuan-pertemuan juga lebih aman dilakukan di kampus. Sekretariat Dian Budaya seperti “diakuisisi” para aktivis gerakan mahasiswa yang tidak semuanya adalah mahasiswa Sastra UGM —bahkan juga bukan mahasiswa UGM. Ruang di sekretariat ini cukup lega dibanding sekretariat Pijar di Filsafat atau sekretariat Sintesa, pers mahasiswa Fisipol UGM. Belum lagi posisinya yang strategis menghadap langsung ke jalan yang waktu itu masih bebas dilalui kendaraan umum termasuk bis kota. Tinggal menerobos lapisan pagar hidup berupa tanaman perdu yang sudah “bolong” karena terlalu sering diterobos, sambil menunduk, karena masih ada pagar kawat berduri di lapisan luarnya. Posisinya yang di belakang juga mendukung “keamanan” ketika dipakai untuk menginap. “Wajah bangun tidur dan bau iler” tak harus tiba-tiba bersirobok pagi-pagi dengan sivitas akademika lain yang sudah rapi dan wangi, siap beraktivitas di kampus.

Aktivitas gerakan mahasiswa pasca-Kudatuli banyak terpusat di sekretariat dua lembaga pers mahasiswa Pijar-Filsafat dan Dian Budaya-Sastra. Rapat-rapat awal pengonsolidasian kembali gerakan pro-demokrasi dan rapat aksi politis pertama pasca-Kudatuli (aksi

⁶² *Ibid.*, hal. 88.

KAPP dan KOKAM) juga dilakukan di sekretariat Pijar. Setelah dua aksi itu, rapat-rapat dan koordinasi lebih banyak dilakukan di Dian Budaya. Sementara pertemuan dan diskusi dengan peserta lebih luas sering menggunakan ruang Senat Fakultas Sastra yang lebih lega. Saat itu, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sastra, Haris Rusly Moti, juga sudah semakin “dekat” karena konsolidasi, koordinasi dan kerja-kerja yang dilakukan sebelumnya.

Kerja-kerja dan agenda berjalan terus, sampai diselenggarakan Aksi Mogok Makan di Fakultas Filsafat, Februari 1998. Dua dari inisiator aksi mogok makan adalah juga aktivis BPMFF Pijar yaitu Irma dan Admo. Mereka kemudian bertindak sebagai motor aksi dengan mengambil peran masing-masing: Irma menjadi salah satu panitia aksi, sedang Admo menjadi salah satu pelaku mogok makan. LPM Dian Budaya juga “menyumbangkan” para aktivisnya untuk ikut mendukung Aksi Mogok Makan tersebut. Kelak, lebih jauh para aktivisnya juga ikut menginisiasi pendirian Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Secara organisasional, Pijar dan Dian Budaya dan KPRP adalah entitas yang berbeda. Namun, dalam konteks saat itu, ketiganya mengusung semangat dan tendensi yang sama: perubahan sistem masyarakat yang kondusif bagi terciptanya kehidupan yang lebih demokratis. Dan jalan menuju tendensi tersebut adalah dengan cara mengusung program bersama yaitu: Pencabutan 5 UU Politik, Pencabutan Dwi Fungsi ABRI, dan penolakan Soeharto kembali menjadi presiden.

Siapa KPRP?



Motor KPRP umumnya adalah para pemuda yang doyan baca buku serta gemar berdiskusi. Selain hiburan, aktivitas membaca buku juga untuk menempa pengetahuan dan kematangan sikap mereka. Buku bacaan mereka beragam —merentang dari topik agama, filsafat, sejarah, sosial-

politik, budaya, sastra, cerpen, puisi hingga gaya hidup seperti astrologi. Dari aktivitas itu, mereka juga turut membaca fenomena sosial dan sejarah sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada yang membaca buku *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib* (1981). Wahib adalah salah satu tokoh pemikir Islam alternatif pendobrak. Selain Wahib, ada pula Soe Hok Gie, dengan karya *Catatan Seorang Demonstan* (1983), sebuah catatan harian mahasiswa UI pada 1960an. Selain catatan hariannya, dua karya lain Gie juga mereka baca: *Di Bawah Lentera Merah* dan *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Pada 1990-an sosok Wahib dan Gie dipopulerkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) —salah satu LSM di Indonesia yang bergerak pula di bidang penerbitan. Terbitan lainnya yang moncer adalah jurnal *Prisma*, terbit sejak 1972, yang banyak dibaca pula oleh aktivis KPRP. LP3ES adalah lembaga berpengaruh terhadap pemikiran progresif mahasiswa saat itu. Terbitan mereka banyak mengeksplorasi teori kritis dan emansipatoris. Boleh dikata sebagian aktivis KPRP menjadi kritis dalam bersikap karena adalah “kader-kader” pemikiran dari *Prisma* dan LP3ES. Aktivis KPRP juga memburu bacaan fiksi, seperti karya-karya penulis progresif Pramoedya Ananta Toer —terutama karya Tetralogi Pulau Buru. Apalagi, saat itu membaca buku Pram dilarang rezim. Dari karya Pram yang tersebar dari tangan ke tangan dalam bentuk fotokopi, mereka belajar kritis —belajar berani dan belajar tak gampang tunduk. Bagi KPRP, Pram adalah simbol perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh rezim Soeharto.

Selain membaca buku, harian, jurnal, tabloid seperti telah disinggung, para anggota KPRP juga membaca *apakabar.com*. Pada 1997–1998 sedang terkenal *mailing list* (milis) atau daftar alamat surel yang digunakan mengelola komunikasi dalam sebuah grup. Kala itu, *apakabar.com* adalah pemasok bacaan-bacaan

berita alternatif tentang berita nasional teraktual dan rumor-rumor politik. Melalui kanal ini kemudian populer menjadi bahan bacaan dan obrolan. Generasi 1990an mulai turut menikmati kemajuan di bidang informasi dan komunikasi, terutama perkembangan komputer. Dengan kemuncula *mailing list*—seperti *apakabar.com* yang menyuplai berita dan rumor politik termutakhir— generasi ini mulai menginjakkan kaki pada ketersediaan informasi yang lintas batas. Teknologi informatika dan komputer menjadi wahana yang menyodorkan cakrawala yang membuka pemikiran. Memang waktu itu tidak semua orang sudah mampu membeli komputer, tetapi paling tidak ada beberapa kawan di antara anggota dan simpatisan KPRP yang mampu membeli, memiliki dan menguasai program-program komputer. Banyak warnet-warnet dan rental komputer—tempat yang kerap kawan-kawan KPRP sewa.

Kesukaan anggota KPRP dalam membaca bahan bacaan yang beragam, tidak melulu soal politik, kadang membaca sekadar untuk memuaskan hobi dan hiburan. Mungkin juga, tak dapat dimungkiri, di antara kami ada yang tidak terlalu suka membaca—bahkan hanya suka membaca kolom “Sungguh-sungguh Terjadi” di *Kedaulatan Rakyat*. Namun, dari praksis membaca itu, membaca buku apa saja, ini menunjukkan bahwa semboyan umum yang diterima di kalangan KPRP: “Buku, Aksi dan Senang-senang”, bukanlah semboyan kosong. Slogan ini cukup menggambarkan bagaimana watak dan esensi komunitas yang menamakan dirinya KPRP ini. Satu ciri khas yang terdapat di komunitas KPRP, adalah cara berpikir yang nakal dan *slengekan*—yakni segala persoalan dipikirkan dengan cara nakal, dimainkan, dan tidak mudah menerima sesuatu yang dianggap ‘kebenaran’ begitu saja. Semua perlu dikritisi terlebih dulu, yang serius ‘dimainkan-mainkan’. Dengan demikian ada kesempatan memasang jarak dengan pemikiran dan persoalan yang dihadapi

dan dikritisi. Suatu pendapat atau “kebenaran” pemikiran dikritisi dan tidak diterima begitu saja secara mentah-mentah.

Mari kita tengok bagaimana evolusi beberapa pentolan KPRP. Pertama dari ketua KPRP Haris Rusly Moti. Ia adalah mahasiswa Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra UGM, 1994. Sebelum didapuk menjadi ketua KPRP, Moti telah bergiat di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), salah satu organisasi Cipayung, gabungan organisasi ekstra kampus —HMI, PMII, GMKI, PMKRI, GMNI dan seterusnya. HMI dikenal sebagai pendukung rezim saat itu, susunan kabinet Soeharto juga banyak diisi orang-orang HMI. Karena berkuliah di Fakultas Sastra, membuat Moti sering bergaul dengan “aktivis-aktivis kiri”. Pandangannya pun terbentuk karena pergaulan di kampus. Dia juga dilibatkan dalam berbagai macam aktivitas ideologis, apalagi saat Moti sudah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sastra. Lambat laun, cara berpikirnya berubah dan berakibat pada caranya bertindak.

Fendry, sang sekjen, masuk Filsafat pada 1994 —sisanya, Puthut, Irma, dan Admo mereka kawan seangkatan Filsafat 1995. Pada saat Fendry masuk UGM, dia langsung di-OPSPEK oleh dedengkot aktivis, semacam Nezar, Antun, Edy Haryadi —para pentolan PRD. Dia juga langsung disambut dengan aksi Tegaklima UGM, yang kebanyakan berisi anak-anak Filsafat juga. Namun selain itu, Fendry juga dipicu hal personal. Ayahnya adalah seorang guru SMP dan bertugas di salah satu desa di Sulawesi Tengah. Suatu kali, sang ayah melawan Kepala Desa yang mengorupsi dana Bantuan Desa (Bandes). Sang ayah menulis surat sampai ke tingkat gubernur, bahkan hingga ke Menteri Dalam Negeri. Tak disangka, hal itu justru jadi heboh hingga ayahnya didatangi anggota Babinsa. Padahal, sang ayah adalah simpatisan Golkar, anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Hal itu membuatnya merasakan ketidakadilan, padahal ia merasa ayahnya bertindak benar. Kesempatan kuliah

di Yogyakarta membuatnya bersentuhan dengan teori, jejaring perkawanan, dan berdiskusi yang membuat pemahamannya kian jernih. Ketika hari pertama kuliah pun ternyata dia sudah “dikader” oleh angkatan sebelumnya. Para senior itu menawarkan tempat diskusi. Tak tahunya, mereka digiring ke Sendowo, sekretariat SMID-PRD. Maka itu, lingkungan baginya berperan penting dalam membentuknya menjadi aktivis, sebab bermula dari lingkungan dia memperoleh panduan dan jawaban atas kegelisahannya. Belum lagi, iklim akademis saat itu tumbuh begitu subur. Hampir setiap hari ada diskusi, debat ilmiah — singkatnya tradisi belajar saat itu cukup ketat. Bahkan, orang yang tidak baca buku akan merasa tertinggal secara intelektual. Percampuran situasi macam itulah yang membuatnya memilih menjadi “kiri” —terlepas dari variannya.

Lain lagi kisah Puthut. Ia memulai kegiatan politik pertama beberapa minggu setelah masuk kuliah. Saat itu, ia dengar bahwa akan ada kursus politik. Ternyata kursus politik itu diisi oleh Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, dan Nezar Patria di sebuah pesantren di Bantul. Sejak itu, Puthut hampir tak pernah absen dalam setiap aksi unjuk rasa. Pada 1996, sebagaimana para aktivis lain ketika Kudatuli pecah di Jakarta, semua lari tak terkecuali dirinya. Namun, kasus yang dialaminya agak berbeda. Saat itu, hanya dia orang berkuliah di UGM dari salah satu kecamatan di Rembang. Kedua orang tua Puthut adalah guru. Saat para aktivis PRD dan jejaring jadi buron, keduanya dipanggil oleh ketua guru dan Danramil. Dia harus pulang kampung karena konon “sudah disusupi para komunis”. Akhirnya dia pulang hingga selesai Pemilu 1997. Jelang Aksi Mogok Makan dia baru kembali.

Sementara Irma, seperti kawannya yang lain, mulanya ia juga apolitis. Namun, pengalaman sejak pertama masuk UGM menempa mereka. Mereka mulai diperkenalkan serba-serbi aktivisme dan gerakan —mulai dari lagu, lambang, hingga peta gerakan.

Begitu masuk kampus, dia merasa memasuki “gerbang alternatif informasi” yang selama ini ia kenal. Apalagi, kuliah di Filsafat membuatnya lekas mengenali bahaya 5 Undang-Undang Politik, mengapa Dwifungsi ABRI harus ditolak, hingga mengapa harus kritis terhadap Rezim Soeharto. Mahasiswa Filsafat juga sedikit, bahkan yang bergiat di hampir semua unit kegiatan mahasiswa orang itu-itulah saja. Saat itu, *nongkrong* di mana pun semua diskusi kritis, semua anti-Soeharto. Perdebatan sehari-hari diwarnai hal-hal kritis, materi belajar di kampus pun soal kritik sosial.

Panggung Rakyat

udaya adalah salah satu segi aktivisme KPRP. Maka, mereka juga menggelar panggung seni. Sesuai dengan selebaran, acara panggung budaya “Parade Seni Perlawanan: Mendobrak Budaya Bisu” berlangsung pada 23 Maret–1 April 1998, dari pagi sampai malam. Acara diisi dengan pentas musik, pameran seni rupa, seni instalasi, seni vokal, pembacaan puisi, teater, dan pentas band. Berlangsung semarak, acara ini dihelat bersamaan dengan Aksi Mogok Makan. Keseluruhan aksi itu bertahan hingga diserbu dan dirazia polisi. Seperti namanya, tujuan acara ini adalah menjaga agar tetap ada aktivitas pergerakan politik budaya walaupun bukan gerakan politik riil, “memecah kebisuan” itu sendiri. Aksi-aksi sepanjang April 1998 memberikan keyakinan bahwa gerakan kepeloporan mahasiswa sudah benar. Hal ini dilihat dari semakin masifnya dukungan terhadap gerakan. Kepercayaan diri semakin meningkat. Timbul pula pemikiran bahwa gerakan harus dimajukan. Posko jangan hanya “terkucil” di Fakultas Filsafat, tapi harus maju ke tempat yang lebih terbuka agar makin banyak massa datang dan saling berinteraksi menggagas persoalan bangsa, persoalan negara, menjaga agar atmosfer yang sudah terbangun tidak



► Fendry Ponomban tengah berorasi pada Aksi Panggung Rakyat KPRP, 23-25 April 1998 di Boulevard UGM. Sumber: *Dwi Oblo*.

menurun. Maka, digagaslah untuk membuat “Panggung Rakyat” di Bundaran UGM⁶³.

Banyak dukungan masuk untuk penyelenggaraan Panggung Rakyat ini. PDI pro-Mega menyediakan perlengkapannya. *Back drop* di belakang panggung bertuliskan salah satunya “Adili Soeharto” selain beberapa program tuntutan lain yaitu: Turunkan Harga, Bubarkan DPR/MPR hasil Pemilu 1997, Tolak dialog dengan ABRI/pemerintah, Bentuk DPR Independen, Bentuk organisasi perlawanan rakyat⁶⁴. Panggung Rakyat berlangsung tiga hari penuh, dimulai pada jam 9–5 sore. Orator bergantian dari berbagai kalangan, tidak ada pembatasan. Beberapa tokoh masyarakat juga hadir dan berorasi di Panggung Rakyat tersebut, di antaranya Romo Yatno, Butet Kartaredjasa, serta Kyai Muhaimin. Di panggung itu pula, Butet meniru gaya bicara Soeharto yang kemudian jadi salah satu ciri aksi panggungnya dalam beberapa waktu kemudian. Kelak Aksi Panggung KPRP digagas lagi pada 23–25 April 1998, di depan Graha Sabha Pramana. Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI), jejaring KPRP, kelak juga mengadakan aksi panggung sendiri. Mereka menggandeng grup band yang saat itu mulai naik daun, Sheila on 7.⁶⁵

Pendidikan politik ke massa dinilai sangat efektif melalui Panggung Rakyat. Dalam setiap orasi-orasinya, aktivis KPRP dan para koordinator lapangan, selalu menyelipkan pemahaman untuk tidak melakukan kekerasan, baik SARA atau bukan, dan konflik horizontal sesama rakyat. Konflik harus selalu diarahkan vertikal, semua yang orasi mengarahkan kemarahannya fokus ke rezim: “Musuh kita bukan Cina, bukan Kristen, bukan sesama rakyat jelata, musuh kita penindas rakyat, Soeharto dan antek-

⁶³ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

⁶⁴ Selebaran KPRP dan dokumen foto KPRP.

⁶⁵ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.



► Panggung Demokrasi Bongkar KPRP.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, April 1998.



► Seseorang tengah berorasi pada Aksi
 Panggung Rakyat KPRP, 23-25 April 1998.
Sumber: Dwi Oblo.

anteknya”. Mungkin itu salah satu sebab mengapa di Yogyakarta tak satu pun toko dijarah dan dirusak ketika 1998. Satu hal yang sangat perlu dicatat adalah bahwa gerakan mahasiswa dan rakyat di Yogyakarta berjalan sangat tertib. Satu-satunya kota dengan sejarah gerakan yang sama sekali tidak ada kerusuhan berbasis SARA. Keberhasilan gerakan mahasiswa Yogyakarta adalah berhasil mengangkat kesadaran masyarakat untuk melihat persoalan dari segi struktural, kesalahan ada pada pemerintahan Soeharto, sehingga tidak melakukan suatu tindakan dan memicu konflik berbasis SARA. Yang menjadi sasaran kemarahan massa adalah simbol-simbol kekuasaan negara, seperti kantor polisi⁶⁶.

Oleh-oleh dari Solo



eski aksi demonstrasi telah berlangsung di beragam titik di Yogyakarta, bahkan telah diikuti puluhan ribu massa, tapi hingga akhir Maret 1998 aksi massa dianggap belum berdampak. Krisis ekonomi 1997–1998 terjadi sangat parah. Faktor krisis ekonomi membuat ketersediaan sembako berkurang, biaya hidup yang melonjak tinggi dan terjadi PHK besar-besaran, melahirkan ketakutan akan ancaman kelaparan. Sementara, di kalangan aktivis korban rezim makin berjatuh. ⁶⁷

⁶⁶ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

⁶⁷ Itu adalah rangkaian perburuan kedua PRD, sesudah periode pertama yakni pasca-Kudatuli 1996. Perburuan, penangkapan dan penculikan aktivis kali itu terjadi usai peristiwa bom meledak di Rusun Tanah Tinggi, 18 Januari 1998. Dalam peristiwa ini, satu-satunya yang tertangkap adalah Agus ‘Jabo’ Priyono, (FKIP UNS, aktivis PRD). Momen ini jadi pemicu “usaha pengamanan” makin intensif oleh aparat keamanan. Lihat juga mingguan *Tempo* edisi 17 Mei 1999. Lihat pemberitaan *Tempo* “Bom Misterius Tanah Tinggi”. Beberapa kawan sesama mahasiswa telah ditangkap dan diculik aparat sepanjang Februari–Maret 1998 —Raharja Waluya Jati dan Nezar Patria dari Fakultas Filsafat UGM, Mugiyanto dan Faisol Riza dari Fakultas Sastra UGM, Andi Arief dari Fisipol UGM, serta beberapa kawan dari berbagai kota lain seperti Aan Rusdianto dari Fakultas Sastra UNIP, Herman Hendrawan dan Bimo Petrus Anugerah dari Fisipol

Perlahan, akumulasi hal-hal di atas menyulut frustrasi dan menjadi bara amarah. Saat itu kepercayaan pada rezim merosot tajam, rasa marah masyarakat sangat tinggi, berdampak pada menipisnya rasa takut pada hukum, kuasa dan represi rezim. Oleh sebab itu, sebagian aktivis menilai jika aksi massa masih terlokalisir di dalam kampus, apalagi masih memakai metode-metode pasif tanpa “greget perlawanan”, maka aparat keamanan akan makin represif terhadap pihak yang dinilai “menggerogoti stabilitas nasional”. Atmosfer perlawanan harus ditingkatkan lagi derajatnya dengan aksi-aksi demonstrasi yang lebih mewujudkan resistensi massa atas penindasan. Beberapa komite aksi di kota di luar Yogyakarta berusaha menyatukan aksinya dengan elemen rakyat. Mereka mengusahakan aksi ke luar kampus. Aksi-aksi mereka berakhir bentrok dengan aparat karena dihalau dengan kekerasan, seperti dialami oleh Komite Pemuda dan Mahasiswa Surakarta (KPMS) di Bundaran UNS, akhir Maret 1998.⁶⁸ Demikian juga aksi di Universitas Udayana, Bali, dan aksi di Universitas Lampung⁶⁹. Aksi-aksi tersebut justru dinilai berhasil menaikkan derajat perlawanan menjadi lebih tinggi.

Mendengar kabar kawan sesama aktivis bentrok dengan aparat di Solo, beberapa aktivis dari Yogyakarta justru ingin mengorganisir aksi yang dipandang “lebih maju” dengan belajar mengalami aksi serupa. Mereka adalah Samsul Prihatmo (FNE UGM, 1994, aktivis PRD); Agung “Helm” (Agung Wibowo

UNAIR, Suyat dari Fisipol UNISRI. Beberapa aktivis lain “hilang” pada bulan-bulan selanjutnya. Gilang (Leonardus Iskandar, pengamen, aktivis PRD), bahkan diketemukan telah jadi mayat di tengah hutan di Saradan, Madiun, Jawa Timur pada sekitar Mei 1998. Wiji Thukul (buruh, penyair, aktivis PRD) pun dikabarkan hilang beberapa waktu kemudian dan hingga sekarang belum ditemukan. Sementara, beberapa lainnya masih dalam kondisi “buron” —Sahanuddin Hamzah (Filsafat UGM, 1989), Nur Widi Atmaka (AN-Fisipol UGM, 1990), Nining Wahyuningsih (Filsafat UGM, 1992).

⁶⁸ Keterangan dari Prijo Wasono, aktivis PRD, salah satu pendiri KPMS, via Whatsapp

⁶⁹ Octo Lampito, dkk., *Lengser Keprabon*, Yogyakarta: P.T. Grafika Wangsa Bakti, 1998, hal. 3.

Budiono, Ekonomi Akuntansi UII, 1993); Joko Purwanto (Fisipol UAJY 1996, aktivis PRD), Dhyta Caturani (Sosiologi, Fisipol UGM 1996), dan rombongan Lexy Rambadeta yaitu Gimin, Purbo dan Dita Alangkara.⁷⁰ Inilah yang lantas membuat rombongan aktivis dari Yogyakarta bertolak ke Solo pada Jumat, 27 Maret 1998, sehari setelah aksi bentrok Solo diberitakan pada 26 Maret 1998 di *Jawa Pos*.

Sesampainya di Solo, di markas demonstran di Kampus Sastra UNS, tepatnya di Sekretariat Majalah Mahasiswa Kalpadruma⁷¹, suasana masih sepi. Juanda (Fakultas Hukum UNS 1996, aktivis PRD) juga tampak masih terlelap. Mendengar beberapa orang datang, ia kaget dan terbangun. Rombongan mahasiswa dari Yogyakarta itu lantas mengajak Juanda aksi secara spontan. Mereka lantas berkeliling UNS. Sampai menjelang Jumatan, kondisi masih sepi tidak ada pergerakan apa pun. Akhirnya, di Bundaran UNS mereka berhenti dan mendirikan shalat Jumat di jalanan. Tak berapa lama usai Jumatan, muncul beberapa truk aparat dan berbaris di depan Kampus UNS.⁷² Ternyata, kehadiran aparat menjadi semacam undangan, hingga ratusan mahasiswa UNS dan orang-orang sekitar spontan turut berbaris bersama mereka.

Prijo Wasono yang terlibat aksi sekaligus mahasiswa Sastra UNS, 1993, saat itu, menambahkan keterangan, “Aksi itu bisa jadi memang spontan, bisa jadi juga tidak spontan, karena memang ada agenda aksi rutin yang dilaksanakan seminggu dua kali. Nah, pas Samsul dan kawan-kawan datang, kondisinya belum siap, masih pada tidur. Lah, masih sekitar jam tujuh pagi, sementara kebiasaan kita tidur sampai larut. Saya pun masih di kost waktu itu, maka saya minta mereka langsung menuju ke

⁷⁰ Kisah ini kemudian dituliskan di laman *Facebook* sebuah akun bernama Samsul Joyobintoro, diunggah pada 11 Maret 2023, dalam dua kali unggahan. Teks seizin penulis dengan perubahan dan penyuntingan.

⁷¹ Tambahan info dari Joko, via Whatsapp, 15 April 2023.

⁷² Seperti kisah Samsul dalam unggahannya di akun Facebook pada 11 Maret 2023.

Sekretariat Kalpadruma di Kampus”, demikian keterangan Prijo.⁷³ Namun berbeda dengan keterangan Prijo, Samsul yakin bahwa aksi tersebut spontan. “Aksi yang didahului sholat di Bundaran UNS itu aku yakin spontan karena tidak ada mobilisasi massa sedikit pun. Dan seingatku, Juanda juga ngomong tidak ada rencana aksi hari itu karena aksinya sudah dilakukan kemarin”. Keterangan dari Gimin alias Matheus Dwi Hartanto, pada masa-masa itu kemudian, mereka kru dokumentator *Associated Press*, selalu berangkat ke Solo setiap hari Jumat untuk meliput aksi demonstrasi yang bisa dipastikan selalu berakhir bentrok. Jelang maghrib, usai “berpesta” menghirup gas air mata di UNS, rombongan ini balik ke Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, mereka berpikir bagaimana menyiasati agar semangat perlawanan terhadap aparat yang menjadi benteng kokoh Orde Baru saat itu, juga semakin naik derajatnya di Yogyakarta.

Bentrok Perdana di Yogyakarta



emonstrasi berujung bentrok pada 2 April 1998 bukan tiba-tiba terjadi. Itu sudah masuk perhitungan. Bentrok merupakan pilihan bentuk aksi. Sebelum aksi, beberapa personel KPRP telah diminta untuk melakukan “studi banding” ke markas gerakan mahasiswa di Solo, sebab di sanalah yang pertama kali mengalami aksi bentrok pada 1998. Lalu sepulang dari Solo, diadakan semacam simulasi bentrok yang dilakukan beberapa kawan. Moti pun sempat ikut, di suatu tempat di pinggir Selokan Mataram dan dinilai cukup jauh dari permukiman

⁷³ Menurut keterangan Prijo Wasono via Whatsapp pada 16 April 2023, Juanda merupakan ketua KPMS periode ketiga menggantikan Edi Suseno yang adalah Ketua KPMS periode kedua. Edi Suseno adalah mahasiswa Hukum UNS angkatan 1994 yang juga aktivis PRD. Semasa pandemi kemarin, Edi meninggal dunia, menjadi salah satu korban Covid-19. Sedangkan ketua KPMS periode pertama bernama Ignatia Sinta Murti, mahasiswa Kedokteran UNS angkatan 1994, juga aktivis PRD.

warga. Di situ mereka belajar merakit dan melempar bom molotov. Penilaian KPRP atas situasi dan kondisi saat itu jelas bahwa meski aksi-aksi mahasiswa semakin memuncak bersamaan dengan akumulasi penderitaan rakyat akibat krisis, tapi tanpa keterlibatan rakyat, perubahan mustahil dicapai.⁷⁴ KPRP dibentuk untuk memenuhi tuntutan kondisi obyektif yang mengharuskan aliansi mahasiswa dan rakyat.

Dalam sebuah undangan rapat, tergambar jelas rencana KPRP untuk menyelenggarakan sebuah aksi massa yang tidak eksklusif hanya diikuti mahasiswa dan berlokasi di dalam kampus —hal yang selama ini berusaha keras dicegah aparat negara. Rapat yang rencananya diselenggarakan di lantai II Fisipol UGM itu akan membahas segala keperluan aksi KPRP pada 2 April 1998. Tuntutan serta seruan aksi ini dicantumkan dalam selebaran undangan aksi: “Turunkan harga, Turunkan Soeharto, Tolak hasil Sidang Umum MPR 1998, Tolak dialog dengan ABRI, Bentuk wadah perlawanan rakyat, serta Bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Independen”. Selain itu, program tuntutan dan seruan ini juga dituangkan dalam poster dan spanduk.

Namun, aksi bentrok pertama di Yogyakarta itu tampaknya tidak berlangsung tepat sehari setelah kunjungan “studi banding” ke Solo. Kemungkinan besar rombongan pergi ke Solo terjadi Jumat, 27 Maret 1998, sehari setelah aksi bentrok oleh mahasiswa UNS diberitakan pada 26 Maret 1998 di *Jawa Pos*. Lantas, aksi bentrok pertama di Yogyakarta terjadi pada 2 april 1998. Berdasar hasil penelusuran dokumen yang dapat diakses, aksi 2 April tersebut telah dipersiapkan dalam rapat aksi pada 28 Maret 1998, berdasar dokumen undangan rapat aksi tanggal 27 Maret 1998 atas nama KPRP. Meski mungkin terdapat kekeliruan ingatan tentang waktu, tapi keberadaan peristiwa “studi banding”

⁷⁴ Rapat KPRP pada 28 Maret 1998, berdasar undangan pada 27 Maret 1998.

tersebut terkonfirmasi berdasarkan kesaksian-kesaksian para narasumber seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya.

Dalam aksi kali itu, terlibat pula Sastro Gempur yang mengorganisir diri melakukan perlawanan. Mereka menyiapkan ‘alat tempur’ berupa pentungan dan batu-batu. Pentungan mereka samarkan dalam perlengkapan aksi seperti tiang bendera, rangka poster, dan sebagainya, yang sengaja dibuat lebih besar dan lebih panjang dibanding ukuran biasa. Batu-batu pun dikumpulkan di beberapa titik di sekitar Bundaran UGM. Dalam aksi kali itu, mereka mengatur orang yang berada di barisan depan memasok batu. Skenario dan metode semacam itu berlanjut di aksi pada tanggal-tanggal berikutnya pada April dan Mei, baik aksi UGM maupun Aksi Gejayan.⁷⁵

Sastro Gempur dikondisikan selalu siap tempur. Bila aksi dimulai dari suatu fakultas kemudian reli keliling UGM, biasanya mereka bergabung bila massa sudah sampai Bundaran. Bila masih berorasi, mereka akan ambil posisi di belakang sembari berteduh. Tapi, jika agitasi-agitasi sudah mulai memanass, barulah mereka ambil posisi di depan. Mereka juga memiliki korlap sendiri. Ada

⁷⁵ Nama ini berakar dari tradisi di Fakultas Sastra UGM yang acap menyematkan kata ‘Sastro’ di awal nama komunitas. Misalnya Sastro nDalu bagi komunitas mahasiswa yang acap beraktivitas pada malam; Sastro Moeni, komunitas mahasiswa Sastra yang gemar bermusik; Sastro Senja, komunitas mahasiswa yang suka beraktivitas di senja hari. Penamaan Sastro Gempur pun berdasar tradisi ini. Mereka adalah gabungan antara mahasiswa yang suka beraktivitas malam sekaligus aktif di Kapalasastra (Keluarga Pencinta Alam Fak. Sastra). Mereka sebenarnya tidak begitu tertarik politik, tapi terpantik simpatinya kepada sesama mahasiswa yang mengalami kekerasan, penangkapan, serta penculikan akibat aktivitas politiknya. Keputusan tentang ‘bentuk solidaritas’ pun hanya terjadi dari obrolan di lorong kampus, tidak lewat, bukan rapat atau semacamnya. Karena mereka mengambil peran sebagai pasukan penggempur, maka nama depan identitas ‘Sastro’ disatukan dengan spesialisasi yang mereka pilih —mahasiswa fakultas sastra yang doyan menggempur saat aksi tiba. Selain Sipey, penggagas lain Sastro Gempur di antaranya Witek (Widi Asmara, Arkeologi 1995) dan Adi ‘Jenggot’ (Cahyadi Joko Sukmono, Sastra-Jepang 1996). “Gempur”, menurut Adi ‘Jenggot’ adalah akronim dari Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi. Sastro Gempur adalah kesatuannya, sedangkan aksi-aksinya bernama Sastro Goegat.



► Menjelang aksi bentrok 2 April 1998.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, April 1998.

tim *supply* (makanan dan batu ketapel). Ada juga tim komunikasi via HT, poskonya di ruang Keluarga Mahasiswa Diploma Pariwisata (KAMADIPA). Sebagian berkeliling menggunakan motor dan memberi informasi via HT di mana titik-titik aparat disiapkan; memberi info jika terjadi bentrok, ke mana jalur evakuasi yang aman. Info itu diteruskan ke korlap di lapangan, kemudian disebar ke kawan-kawan lain. Bagian molotov dan ketapel juga ada. Pasukan ketapel menyebut dirinya Pasukan Ketapel Indonesia (PKI). Mereka berinovasi bagaimana membuat ketapel, membuat peluru, sampai membuat zona latihan ketapel lengkap dengan sasaran tembak di depan sekretariat Dian Budaya. Tak hanya Sastro Gempur, terlihat unsur mahasiswa dari Timor Leste terlibat dalam aksi bentrok. Memang sebelumnya, terjadi perundingan antara Sastro Gempur yang diwakili Sipey dan Jon dengan pasukan dari Timor Leste di bawah kepemimpinan Pedro (Pedronov Loivacho Nelukala Vieira, Fisipol UGM, 1990).

Dalam laporan *Kedaulatan Rakyat* (KR), edisi 3 April 1998 menulis, bentrok antar massa aksi dan aparat keamanan terjadi





► Aksi bentrok pertama KPRP, 2 April 1998 di Boulevard UGM.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, April 1998.

dan berbuntut perang batu di Bundaran UGM. Puluhan mahasiswa luka-luka di bagian kepala, juga karena tembakan gas air mata yang mengakibatkan radang selaput mata. Dalam *KR* secara jelas menulis bahwa aksi itu diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri KPRP. Selain itu, juga disebut elemen dari pelajar GAPCI dan pengamen. Semula massa hendak menuju DPRD di Jalan Malioboro, tapi diadang aparat di Wisma Kagama. Massa berhasil menjebol pagar betis dan merangsek ke Bundaran UGM. Namun segera terhenti karena di sana telah dijaga aparat. Massa makin membludak, banyak yang bergabung, termasuk GAPCI. Hampir tengah hari, massa masih hendak melanjutkan *long march* menuju DPRD melalui Jl. Terban. Di sinilah, tiba-tiba, terjadi aksi saling dorong. Menurut amatan wartawan *KR*, “Dari sinilah insiden terjadi karena petugas mulai memainkan tongkat serta menyemprotkan air dan gas air mata.”

Massa aksi yang panik lantas bubar dan berlarian menuju kampus. Dari kampus, mereka melempar batu ke arah aparat. Beberapa petugas memungut batu itu dan melempar balik ke arah mahasiswa. Meski telah mundur hingga area kampus, aksi terus berlangsung. Lempar batu-gas air mata belum berhenti. Bentrok ini menimbulkan banyak korban luka, beberapa kendaraan rusak, serta kerusakan barang dagangan para pedagang kaki lima di sekitar lokasi akibat situasi ricuh. Aksi kali itu kelak menjadi rujukan pengembangan metode berlawanan Sastro Gempur. Hasil evaluasi atas aksi kali itu adalah bahwa mereka dibabat habis karena beberapa personel ada yang tidak siap bentrok, selain juga karena jarak yang terlalu dekat. Tercatat 17 orang pingsan, 26 korban dirawat di R.S. Panti Rapih, dua korban lain dirawat di RSUP Dr. Sardjito, 43 orang luka ringan dan dirawat di P3K UGM.

Pasca-aksi sempat terjadi kebingungan tentang cara memper-tanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kerusuhan. Moti

berkata bahwa seperti dikutip *KR*, pihaknya bertanggung jawab terhadap segala akibat dari aksi massa. KPRP juga tidak akan lepas tangan begitu saja dan akan mengusahakan bantuan dana bagi korban yang dirawat di rumah sakit. Setelah aksi bentrok itu, begitu banyak wartawan media massa hadir di Posko KPRP di Filsafat dan ingin mewawancarai Moti. Sore itu, wartawan radio *BBC* bertanya: “Apakah Anda siap bertanggung jawab?” Moti saat itu pun tegas menjawab: “Kami bertanggung jawab atas segala akibat dari aksi hari ini. Menurut kami, ini adalah kehendak negara, kehendak pemerintah Orde Baru, karena sebetulnya, kami menghendaki aksi damai, tapi itu tidak dikehendaki oleh negara, maka terjadilah aksi kekerasan ini”.

Selain dukungan kesehatan, dukungan masyarakat terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa juga tampak dalam bentuk lain. Ditemani Faris dan Ucup, Irma, berkeliling menemui para pedagang di sekitar Bundaran UGM untuk mengurus proses ganti rugi. Menurut Irma, para pedagang yang merugi akibat situasi kaos menyatakan tidak mau diganti. Sore hingga malam hari setelah bentrok juga ada bagian dari tim advokasi aksi massa KPRP yang bertugas mengurus, mendampingi dan mengadvokasi korban aksi yang perlu mendapatkan pengobatan dan mengusahakan bagaimana cara membiayai pengobatan mereka. Dibentuk juga tim khusus yang melakukan lobi ke berbagai pihak: rumah sakit (terutama Panti Rapih) dan ke pihak-pihak lain untuk mencari solusi pendanaan untuk menutup dana yang dibutuhkan guna pengobatan jika diperlukan. Untungnya, karena bantuan beberapa pihak yang digerakan oleh solidaritas kemanusiaan, akhirnya pengobatan digratiskan oleh pihak rumah sakit, karena sudah ada yang mau menanggung. Tak lama pasca-aksi, datang dukungan moril berupa kiriman karangan bunga ke *base camp* mereka di Filsafat bertuliskan kalimat simpati: “Turut Berduka Cita atas Matinya Demokrasi”.

Aksi KPRP pada 2 April 1998 ini monumental ditinjau dari dua segi. *Pertama*, aksi tersebut adalah juga dalam rangka deklarasi pendirian KPRP kepada masyarakat luas. *Kedua*, aksi tersebut adalah aksi pertama di Yogyakarta pada tahun 1998 yang diwarnai korban luka dan kerugian material beberapa pihak. Meski demikian, hal ini justru mampu memberikan gambaran bahwa usaha mahasiswa melalui unjuk rasa-unjuk rasa nya berhasil menarik dukungan dan simpati masyarakat atas program-program tuntutan nya seperti diceritakan di atas. Aksi itu juga diberitakan secara nasional di media massa dan ikut menyumbang naiknya derajat perlawanan dalam atmosfer politik nasional serta semakin menguatkan semangat perlawanan terhadap rezim Orba. *KR*, 3 April 1998, misalnya, menulis bahwa aksi kali itu adalah aksi bentrok pertama di Yogyakarta.

Para aktivis KPRP mengalami aksi bentrok dengan sadar. Apa yang terjadi pada 2 April itu terencana. Ini berdasarkan pemikiran dan pandangan bahwa aksi moderat itu tidak memperluas spektrum perlawanan gerakan mahasiswa. Sebaliknya, aksi bentrok akan mempercepat eskalasi perlawanan gerakan mahasiswa secara keseluruhan dan akan mempengaruhi spektrum secara nasional. Keputusan untuk melakukan bentrok pada aksi 2 April betul-betul merupakan titik balik yang sangat mempengaruhi gerakan mahasiswa secara keseluruhan, gerakan perlawanan secara nasional. Bentrokan terbuka itu merupakan pengalaman pertama KPRP. Moti sendiri cukup gugup dengan aksi bentrok tersebut, karena ia khawatir akan mengarah kepada mentersangkakan kawan-kawan —seperti terjadi kawan-kawanya di PRD dan jejaring pada Peristiwa Kudatuli.

Memang terdapat perdebatan cukup alot, baik di internal KPRP maupun dengan organ-organ yang datang setelah aksi bentrok itu, apakah selanjutnya mereka akan melanjutkan aksi-dengan metode bentrok, atau akan beralih ke metode yang lebih

simpatik. Tapi, ternyata massa justru menghendaki metode bentrok. Itu membuat KPRP makin percaya diri bahwa benar sudah saatnya, bahkan warga masyarakat pun mendukung⁷⁶. KPRP memaknai aksi bentrok itu sebagai tindakan kepeloporan yang berdampak luar biasa memengaruhi dan menginspirasi gerakan di kota-kota lain. Aksi tersebut mendapat liputan secara nasional dan internasional. Rupanya, diam-diam, aksi bentrok ini banyak diinisiasi oleh “ronin-ronin” PRD jaman itu (Samsul, Jemek, Susilo, Jerry, Jon), mereka sering mengadakan pertemuan “tidak resmi” di bawah pohon ketepeng, di samping ruang kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Filsafat merencanakan gerakannya⁷⁷.

Para aktivis itu baru agak tenang ketika pada sore harinya, ketika Komandan Korem membuat pernyataan yang tidak terlalu keras. Pihak Rektorat pun tidak terlalu mengecam tindakan aksi hari itu. Padahal, bentrok sekeras itu belum pernah terjadi dalam sejarah gerakan mahasiswa pada 1998. Aksi 2 April itu luar biasa berpengaruh secara politik. Benar-benar suatu kepemimpinan dari sisi program maupun dari sisi tindakan dan metode gerakan⁷⁸. Sempat terlintas kekuatiran di benak Moti bahwa aksi tersebut akan menimbulkan ketakutan massa untuk turun ke jalan lagi. Ia salah. Aksi bentrok justru memperluas spektrum perlawanan. Efek positif dari Aksi 2 April adalah membangkitkan keberanian dan kepercayaan diri massa mahasiswa. Massa mahasiswa yang tadinya pasif, tidak ideologis melawan Soeharto, menjadi percaya diri dan berani melawan. Analisis kawan-kawan sebelumnya, bahwa aksi kekerasan atau aksi bentrok akan memperluas

⁷⁶ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

⁷⁷ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

⁷⁸ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

spektrum perlawanan, menambah daya radikal gerakan mahasiswa, memang terbukti⁷⁹.

Pada hari berikutnya, 3 April 1998, dalam aksi yang diselenggarakan oleh Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), para aktivis yang terlibat dalam aksi 2 April pun kembali turun ke jalan memperkuat barisan. Aksi tersebut kembali diakhiri bentrok peserta aksi dengan aparat. Korlap berusaha menarik massa mundur ke dalam kampus, tetapi ditolak oleh massa. Dampak dari aksi sebelumnya, kepala massa sudah terisi hasrat untuk “menikmati adrenalin”, bentrok, “buang stress”. Istilah massa waktu itu “melempar jumrah”. Mereka datang sudah dengan ransel berisi batu.

Metode aksi bentrok memang mungkin mendapatkan relevansinya dalam kerangka besar membongkar monumen ketakutan dan atau traumatik, tapi jika digunakan secara berlebihan dan kebablasan juga akan menjadi bangunan sosial spiral kekerasan yang baru. Inilah tragis dan ironisnya “si tertindas”. Si tertindas ingin menghapus penindasan, tapi terpaksa menggunakan cara-cara kekerasan yang dipakai penindasnya, dan tanpa sadar bisa menciptakan penindasan baru yang pada hakikatnya ingin dilawan dan dihapuskan. Dalam dimensi ini, perlawanan dengan menggunakan kekerasan yang awalnya muncul sebagai katalisator untuk membangkitkan keberanian dan semangat perlawanan/resistensi ini, kental berlumur libido mortalitas. Motif melawan dengan metode kekerasan adalah wujud tertinggi dari frustrasi sosial, batas terakhir untuk tunduk kalah, ketika rakyat tertindas memutuskan melawan penindasnya, karena tidak ada pilihan lain yang tersisa, si tertindas tidak akan kehilangan apa-apa, kecuali kehilangan ketertindasannya itu saja. Melawan atau mati, melawan atau tertindas sampai mati. Adagium inilah yang

⁷⁹ Wawancara via zoom dengan Haris Rusly Moti, Fendry Ponomban, dan Irmawati, 5 April 2025.

mungkin menyebabkan perlawanan dengan metode kekerasan atau bentrok dan lain-lain mendapatkan momentumnya.

Kala Pelajar Yogyakarta juga Turun ke Jalan



etika aksi massa sering berlangsung, pada April 1998 berdiri sebuah organisasi pelajar di Yogyakarta bernama Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI). Organisasi ini dibentuk secara spontan dan beranggota para pelajar sekolah menengah. Mereka semula tak tahu-menahu peta organisasi gerakan mahasiswa saat itu. Yang mereka tahu banyak aksi demonstrasi berlangsung menuntut Soeharto turun di beberapa titik di Yogyakarta. “Yang terpikir oleh kami adalah masa kami diam saja?” tutur Abhisam Demosa, salah satu inisiator GAPCI.⁸⁰ Pada 1998, ia bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta (MUHI). Alhasil, mereka secara spontan mengumpulkan siapa saja kawan yang mau diajak berdemonstrasi. Ajakan itu bersambut sekitar 100 siswa turut dalam aksi. GAPCI lantas ikut turun dalam aksi yang dimotori KPRP pada 2 April 1998 yang berujung bentrok hebat.

Pada aksi 2 April 1998 GAPCI melakukan *long march* dari SMA 1 Muhammadiyah menuju Bundaran UGM, lewat Jembatan Sardjito, Jetis. Berseragam SMU, membawa atribut dan bendera serta membentuk barisan sendiri. Mereka datang dengan tuntutan “Turunkan Soeharto”. Para pelajar ini begitu menarik perhatian media. *Solopos* edisi 3 April 1998, misalnya, menulis berkat

⁸⁰ Pada 1998, Abhisam kemudian masuk Fakultas Hukum UGM dan meneruskan kiprah politiknya di KPRP. Darwin melanjutkan Pendidikan ke ISI Yogyakarta jurusan teater, setahun kemudian masuk juga ke jurusan komunikasi UMY. Didit masuk ke Fakultas Teknik UGM jurusan Fisika Teknik, Andik masuk ke Universitas Brawijaya, Hanafi Rais masuk ke UGM, Irfan Yusuf masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY, Kunta masuk ke UGM, Moh. Falahi masuk ke UMY, Zulfan Kurniawan masuk ke IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga dan Yanuar Sidharta masuk ke UII. Wawancara via WA dengan Abhisam, April–Mei 2023.

keikutsertaan para pelajar ini membuat aksi semakin “ingar-bingar”. “Kami agak kaget karena sambutan dan respons yang luar biasa. Mungkin karena kami pelajar, ya. Waktu rombongan kami masuk, barisan membuka, terus kami disambut tepuk tangan. Kami jadi merasa spesial. Dan ternyata aksinya bentrok, tapi posisi kami agak di belakang, jadi tidak menanggung resiko terlalu parah”, lanjut Abhi. Selang sepekan usai aksi bentrok itu, muncul organisasi lainnya, Pelajar Islam Indonesia (PII) yang ikut aksi di Bundaran UGM.

Keikutsertaan GAPCI dalam aksi 2 April itu juga ditulis dalam “Gema”, rubrik bagi jurnalis pelajar di Koran Bernas, yang diasuh oleh Femi Adiningsih Soempeno.⁸¹ Kelak, berkat tulisan Femi, tersambunglah jejaring dengan sekolah lain. Femi, siswa SMA Santa Maria, saat itu bersama sesama jurnalis “Gema”. Mereka adalah Hendra (SMA Kolese De Britto) dan Taka (SMA 6 Yogyakarta). Sementara Ambara Muji, kerap disapa Yoko, siswa SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, adalah aktivis media sekolah bernama Bisma (Buletin Siswa SMKS Marsudi Luhur). Ia saat itu juga sedang meliput untuk buletin sekolahnya. Yoko berteman dengan para jurnalis “Gema” sekaligus teman dekat Femi. Yoko dan Femi pernah satu sekolah di SMA Pangudi Luhur Van Lith, Muntilan, Magelang. Semula, keterlibatan mereka pada aksi pertama GAPCI hanya sebagai peliput. Namun berikutnya, mereka sudah terlibat dalam aksi, berkat perkenalan dengan Darwin Nugraha. Dalam aksi berikutnya, Femi bahkan bergabung dalam perangkat aksi dan bertugas sebagai pencatat kronologi. Jadi, sejak aksi kedua GAPCI

⁸¹ “Gema” adalah rubrik khusus dari pelajar, oleh pelajar dan untuk pelajar. Koordinator laporan utamanya dipegang oleh Femi dan Hendra. Dalam salah satu tulisan di “Gema”, “Siswa Menebar Aksi, Kepala Sekolah Menuai Instruksi” ditulis oleh Arif Rahmanulloh, Hendra Kusuma, Dian Lestariningsih, Femi Adiningsih, dan Erita Christiani itu menulis bahwa keterlibatan para pelajar SMU waktu itu menarik sebab baru pertama kali terjadi. Terhitung GAPCI telah terlibat dalam enam aksi telah diikuti sejak April 1998. Lihat *Bernas*, 3 Mei 1998.



► Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI).
Sumber: Kedaulatan Rakyat, April 1998.

telah terjadi perluasan, tak hanya siswa SMA Muhammadiyah 1 yang terlibat, tapi juga dari beberapa sekolah lain.

Sempat terjadi pembicaraan serius di internal MUHI: ‘Terus kita mau *ngapain?*’ Mulai muncul pertanyaan: ‘Apakah akan membawa bendera Islam atau plural?’ Saat itu, secara tiba-tiba, datanglah Koko (Waskito Giri Sasongko, IESP UII, 1994) dan Dewi (Dewi Ayu Pratiwi, Filsafat UGM, 1993) membantu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mulai bermunculan. Itu kali pertama anggota KPRP berkunjung ke tempat GAPCI. Zulfan Kurniawan masih ingat persis para siswa MUHI yang hadir dalam rapat pembentukan GAPCI yaitu Abhisam, Didit Muhammadie, Darwin Nugraha, Andik Yaanziar, Hanafi Rais, Irfan Yusuf, Muh. Kunta Biddinika, Falahi Mohammad, Yanuar Sidharta, dan Zulfan sendiri. Mereka berada di sebuah ruang temaram. Sumber cahaya hanya berasal dari sebuah lampu gantung yang menyala sayup-sayup di tengah. Cahayanya tak sanggup menjangkau sudut. Mereka berdiskusi di dalam kamar dengan pintu tertutup. Semua merokok, tak terkecuali Dewi. Kamar menjadi sumpek, pengap. Obrolan sangat serius. Saking seriusnya, suasana diskusi itu



► Aksi GAPCI menggotong keranda bertuliskan "Mayat Demokrasi" memeringati 1 Suro. Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, April 1998.

mengingatkan Dewi pada sebuah adegan film *Pengkhianatan G30S/PKI* besutan sutradara Arifin. C Noer. “Mengingatkan pada satu momen saat Aidit berkata pada koleganya: Jawa adalah kunci...!” kenang Koko akan pertemuan awal mereka. Dewi menambahkan, “Jika dikenang memang terasa lucu. Padahal saat itu, aku sungguh deg-degan. Kita seperti PKI beneran. Jika saat itu tiba-tiba digerebek, wah, beneran kayak PKI!”

Meski KPRP bukan inisiator GAPCI, tapi KPRP-lah yang pertama merespons kemunculan organ pelajar itu. Padahal, GAPCI cukup terekspos media, karena fenomena pelajar membuat organ sendiri dan turut berunjuk rasa waktu itu adalah hal langka. Oleh karena itu, Abhisam menilai sikap KPRP responsif. Entah mendapat informasi dari mana, tiba-tiba dua orang anggota KPRP itu, Dewi dan Koko, datang ke indeksos Darwin, tempat biasa anggota GAPCI berkumpul. “Kami yang waktu itu hanya bereaksi spontan terhadap situasi dan kemudian bingung mau berbuat apa, seperti mendapat bimbingan”, ungkap Abhi. Dari situlah awal GAPCI sering bergabung dengan kerap *main* ke



► GAPCI dalam suatu aksi massa.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, April 1998.

Fakultas Filsafat, *base camp* KPRP sejak terbentuk setelah Aksi Mogok Makan, Februari 1998. Kepemimpinan KPRP waktu itu dipegang Haris Rusli Moti sebagai ketua dan Fendry Ponomban sebagai Sekjen. Di situlah, GAPCI banyak mendapatkan “perspektif ke depan” dari Kiswondo dan Admo. Admo bahkan sampai berjudul “Kepala Sekolah-nya GAPCI”.

Aktivitas GAPCI-KPRP perlahan tercium Kodim yang terletak bersebelahan dengan MUHI. Kodim pun mendatangi sekolah. Wakil Kepala Sekolah saat itu, Sutaji, kemudian memanggil beberapa siswa yang dikenali sebagai inisiator GAPCI. Dalam logat Jawa kental, Sutaji menyampaikan beberapa hal: “Ini sekolah sudah *nutupi*, tapi, kalian tolong kerjasamanya, tidak usah ikut-ikut lagi yang *kayak gitu*, *mundhak koyo* Budiman Sudjatmiko...”⁸² Selain itu, waktu itu sekaligus mendekati ujian tahap akhir atau EBTA/

⁸² Ini sekolah sudah menutupi (nama-nama inisiator GAPCI), tapi, kalian diminta bekerja sama, tidak usah ikut (kegiatan) seperti itu lagi, jangan sampai nanti seperti Budiman Sudjatmiko. Budiman, yang saat itu dipenjara karena aktivitas politiknya, juga alumnus MUHI.

EBTANAS. Sutaji pun menambahkan: “Pokoknya *deal* ini ya, nggak ada demo-demo lagi sampai kalian selesai EBTA/EBTANAS”.

Melawan di Gejayan⁸³



nstitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanata Dharma adalah perguruan tinggi yang mencetak tenaga guru yang jauh dari ingar-bingar aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi, sebut salah satu pejabatnya saat itu, ibarat “aktivitas tukang becak dan tidak bernuansa akademik”. Namun pada medio April 1998 mitos di kampus “Seribu Jendela” itu patah oleh sebuah aksi demonstrasi yang diinisiasi sekelompok mahasiswa internal. Mereka membentuk organ bernama Solidaritas Mahasiswa Sanata Dharma untuk Demokrasi (SOMASSI). Kala itu, atmosfer perlawanan terhadap hal yang berbau otoriter begitu kuat. Justru terasa janggal jika sebuah kampus tidak melakukan aksi demonstrasi. Tuntutannya pun bisa macam-macam — menuntut Soeharto turun, mencabut 5 UU Politik, menuntut pencabutan Dwifungsi ABRI, atau sekadar agar harga kebutuhan pokok turun.

Sebelum aksi berlangsung, konsolidasi panjang dilakukan oleh mahasiswa Sanata Dharma. Sebagai inisiator, aktivis UKM Penalaran mengundang berbagai rekan dari Fakultas Teologi (calon pastor dan suster), mahasiswa pecinta alam (Mapasadha), Korps Sukarelawan (KSR, semacam PMI), hingga Resimen Mahasiswa (Menwa). Rapat-rapat diadakan UKM Penalaran, ruangan sempit sebelah ruangan LPM Natas, Penerbitan Kampus USD, dan dekat dengan kantin kampus (koperasi mahasiswa).

⁸³ Ingatan atas Peristiwa Gejayan ini (5–6 dan 8–9 Mei 1998) disunting dari tulisan Lorensius Mayensi, biasa dipanggil Ian. Ian adalah mahasiswa Sanata Dharma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma angkatan 1995. Sejak awal kuliah, Ian sudah aktif terlibat dalam Gerakan pro Demokrasi melawan kediktatoran Soeharto.



► Massa berkumpul pada aksi di Jalan Gejayan 8 Mei 1998. *Sumber: Dwi Oblo.*

Rapat selalu penuh sesak oleh para mahasiswa yang ingin terlibat dalam sejarah perubahan politik di Indonesia.

Ujung dari konsolidasi itu disepakatilah komite aksi bernama SOMASSI. Nama ini diusulkan Maximus Ayun Djati, mahasiswa Teknik Elektro 1993 sekaligus oleh seorang mantan ketua OPSPEK 1996. Jelas Maximus waktu itu, nama SOMASSI dipilih sebab bisa pula bermakna teguran (somasi) kepada penguasa agar terjadi demokratisasi yang berkeadilan sosial di Indonesia. Banyak aktivis lain terlibat dalam pembentukan SOMASSI dan kemudian terus aktif sampai tahun-tahun berikutnya seperti Anggun (Ekonomi), Nita (Yohanita Irene, Pendidikan Bahasa Inggris 1996), Panjang, Gentong, Anto ‘Profesor’ (Teknik Elektro 1995), Tata (Sintia Novi Arthayani, Psikologi 1997), Bejo, Arya, dan masih banyak nama lain.

Untuk persiapan aksi, diadakan diskusi “tata cara mengadakan aksi” mengenai bagaimana mengadakan demonstrasi, kelengkapan aksi, dan juga berbagai skenario aksi. Diskusi itu dipantik oleh L.A. Aris Hartono (Filsafat UGM, 1991). Perangkat aksi yang

disusun melibatkan mapala, kelompok seni, dan aktivis UKM. Ditunjuk dua orang sebagai koordinator lapangan (korlap), Nanang Marjianto dan Arya. Sementara, Ian (Lorensius Mayensi, FKIP/PBI 1995). Disepakatilah aksi demonstrasi akan berlangsung pada 5 Mei 1998. Sayangnya, Senat Mahasiswa USD yang didukung PR III, tidak setuju dengan aksi tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak ikut campur.

Hampir di setiap aksi massa yang diadakan organ sejawat, KPRP juga selalu melakukan rapat persiapan aksi. KPRP selalu menyiapkan perangkat: ada penyusun kronologi, perlengkapan ada, keamanan, titik-titik massa hingga jalur evakuasinya. Demikian juga pada aksi Gejayan I. Pada akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh kawan-kawan KPRP. Jadi walaupun aksi itu bukan aksi KPRP, tapi mereka telah juga mempersiapkan perangkat untuk memimpin jika terjadi bentrokan.⁸⁴

Pagi, 5 Mei 1998. Demonstrasi dimulai sekitar pukul sembilan. Massa berkumpul di depan Kampus Sanata Dharma di Mrican yang berhadapan dengan Kampus Atmajaya. Panggung didirikan di samping gerbang kampus. Orasi-orasi digelar, termasuk dari para Frater (calon pastor). Kelak, para Frater ini juga menggelar aksi sendiri beberapa hari kemudian. Beberapa penarik becak dan tukang ojek yang setiap kali bicara akan teriak: “Oyeeee...!” Aksi pun menjadi semakin meriah berkat lantunan lagu-lagu perjuangan dari para pengamen jalanan yang tergabung dalam Serikat Pengamen Indonesia (SPI)⁸⁵.

⁸⁴ Keterangan Moti, 5 April 2025.

⁸⁵ Serikat Pengamen Indonesia (SPI) atau Teater Kanigoro berdiri pada 1996 diinisiasi oleh Joko Nugroho dan Rahmad Pribadi.. Mereka mengadvokasi pengamen/pekerja seni jalanan sebagai profesi/pekerjaan yang sah. Namun, seni dan berkesenian juga mestilah media untuk melawan Orde Baru. Berbasis massa Kaum Miskin Kota (KMK) dalam bidang kesenian/kebudayaan rakyat. KPRP dan SPI mempunyai tujuan yang sama: merebut demokrasi sejati, juga sama dalam ideologi perjuangan. Salah satu inisiator SPI adalah juga salah satu anggota Presidium KPRP dan terlibat dalam pembentukan KPRP.

Setelah massa membludak, dilakukan *long march* dari depan kampus USD menuju Lapangan Realino dan masuk ke Jl. Gejayan yang berhadapan dengan IKIP Yogyakarta. Di ujung Realino, masuk ke Gejayan, barisan polisi lengkap dengan pentungan sudah siap menghadang. Namun, karena jumlah massa yang terlibat cukup besar, sekitar 5.000an, justru membuat polisi terkepung. Barisan polisi berhasil didobrak dan massa melanjutkan reli hingga depan Hotel Radisson (sekarang Plaza Hotel Yogyakarta), persis di sebelah kanan Gedung Perpustakaan USD.

Massa lantas dihadang oleh polisi di depan Hotel Radisson. Koordinator aksi dan korlap memutuskan mengadakan aksi mimbar bebas di depan Perpustakaan USD, di tengah Jl. Gejayan. Berbagai elemen aksi berorasi di sana, termasuk rekan-rekan dari UGM (KPRP), dan dari kampus lain. Tengah hari, datang ketua DPRD Yogyakarta sekaligus dari fraksi ABRI, Subagyo Waryadi. Korlap memberi kesempatan kepadanya bicara lewat megafon. Koordinator aksi dan korlap sempat berselisih paham karena tidak setuju dengan tindakan tersebut. Koordinator aksi khawatir tindakan itu akan menurunkan semangat perlawanan massa. Namun ternyata saat berorasi, Waryadi hanya mendapat cemooh dari massa karena lebih banyak mengatakan: “Akan menyampaikan aspirasi yang tersebut dalam tuntutan dan meminta massa untuk pulang”. Menjelang sore, Waryadi disandera massa sebagai jaminan untuk memastikan beberapa kawan yang ditangkap polisi segera dilepas. Namun setelah bernegosiasi, massa akhirnya melepas Waryadi.

Melalui pelantang suara, polisi memperingatkan massa aksi harus bubar pukul setengah enam petang. Sekitar pukul lima, korlap dan mayoritas perangkat aksi memutuskan menyudahi

SPI ikut menginisiasi terbentuknya KPRP. Salah satu inisiator SPI adalah salah satu anggota Presidium KPRP (Joko Nugroho), terlibat dalam proses terbentuknya KPRP.



► Para suster turut dalam aksi sambil membentangkan poster bertuliskan "Marilah Menjadi Manusia yang Tanggap". Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, Mei 1998.

aksi. Namun, massa tidak mau bubar dan terus menduduki Jalan Gejayan. Bahkan massa tampak mulai membakar kertas di tengah jalan. Senat USD, melalui pelantang suara dari dalam perpustakaan, meminta para mahasiswa yang turut dalam aksi agar segera masuk kampus. Barisan aktivis dari FPPI dari UAJY bergandengan tangan dan bergerak serentak, untuk menggiring massa aksi ke dalam kampus dan area perpustakaan USD. Namun, atas perintah PUREK III pintu gerbang perpustakaan justru ditutup. Tindakan itu disambut makian dari para demonstran. Tak lama kemudian, dalam temaram senja, meriam air dan polisi berpentungan mulai menyerbu. Barisan massa terjepit di antara gerbang, sedangkan pasukan polisi dari arah depan Radisson, dan barisan Polisi Huru Hara (PHH) dari arah Gang Guru.

Meskipun sore itu panitia aksi USD telah mengakhiri aksi, tapi massa tidak mau bubar. Mereka masih berkumpul sampai malam,

bahkan hingga membakar ban. KPRP lantas mengambil alih kepemimpinan. Sastro Gempur lekas bersiap turun ke jalan untuk memperkuat barisan di lampu merah depan Hotel Radisson. Menjelang malam, listrik di Kampung Karangmalang dimatikan. Beredar kabar bahwa Karangmalang dikepung polisi dari empat penjuru. Sebagian besar anggota Sastro Gempur sudah bentrok dengan polisi di halaman IKIP Yogyakarta. Mereka dipukul mundur hingga di halaman depan Gang Guru. Sastro Gempur berpikir untuk memperkuat halaman belakang dari arah selatan. Memberi kode kalau ada pergerakan masuk. Begitu barisan *fiberglass* tameng polisi nampak bergerak ke utara, suasana langsung tegang. Setelah saling tunggu selama beberapa saat, hingga ada lemparan molotov meledak di udara. Tak lama kemudian, pasukan polisi merangsek dan berhasil merusak barikade Sastro Gempur. Akhirnya, mereka lari menuju perumahan di Karangmalang. Yang tak disangka, banyak warga membantu massa aksi, baik warga lokal maupun warga kost. Dalam keadaan gelita, massa yang saat itu berlarian lantas disembunyikan ke rumah atau indekos untuk sembunyi ketika aparat masuk kampung. Seseekali terdengar teriakan semangat dari rumah-rumah penduduk, 'Selamat berjuang!'. Baru ketika masuk tengah malam, tim Sastro Gempur dapat ditarik ke Kampus Sastra karena aparat di Gejayan juga sudah mundur.

Ketika eskalasi meningkat, di sudut lain area kampus Sanata Dharma, Mozes Gatotkaca, salah satu mahasiswa kampus itu, hendak mencari makan malam dengan rekannya terjebak di dalam kerumunan massa aksi. Ia tidak sempat lari ketika pasukan polisi berpentungan merangsek. Dia ditangkap, tangannya ditelikung ke belakang dan dihujani pukulan tongkat rotan dan kayu. Kepala Moses pun pecah kena pentungan dan tangannya patah. Petugas KSR Kampus USD yang mendapat kabar dari massa aksi segera menolong dan membawanya ke mobil ambulans hendak dibawa ke RS Pantirapih atau Sardjito. Nahas, dalam

perjalanan ke rumah sakit Moses meninggal. Belakangan, waktu persis meninggalnya Moses menjadi simpang siur. Beberapa media memberitakan bahwa Moses meninggal pada Aksi Gejayan II pada 8 Mei. Namun, Ian dan beberapa rekan lain, ditambah data dari hasil kronologi kejadian yang diungkap di Pengadilan Negeri Sleman dalam kasus terbunuhnya Moses, yakin bahwa Moses tewas pada malam 5 Mei 1998, ketika Aksi Gejayan I. Mungkin media terlambat mendapat informasi. Sesudah meninggalnya Mozes, dengan LBH dan keluarga Mozes, Ian dan kolega (UKM Penalaran USD, aktivis dari kampus) masih melakukan demo-demo advokasi di Pengadilan Negeri Sleman. Ian sendiri tidak pernah absen untuk demo ini dan sering menjadi korlapnya, untuk mengawal proses pengadilan terhadap polisi yang membunuh Moses Gatotkaca.

Sekitar pukul empat dini hari, pada 6 Mei, aksi baru agak mereda. Sekitar sejam kemudian, aksi sudah berhenti sama sekali. Ian masih menyaksikan bekas ceceran darah korban yang sudah ditutupi pasir oleh orang warung yang juga jadi saksi pemukulan Mozes di jalan tersebut. Pada hari yang sama, Adi Jenggot juga mengambil motor di Jl. Alamanda, dia baru melihat situasi di Jl. Gejayan yang kacau-balau, sisa aksi tadi malam. Dia juga baru tahu bahwa kepolisian juga melakukan *sweeping* sampai ke rumah-rumah di Jl. Alamanda, dekat Selokan Mataram.

Demonstrasi di ruas Jalan Gejayan ini tercatat sebagai aksi massa terpanjang dalam sejarah di Yogyakarta. Massa yang berlawanan pun tidak hanya mahasiswa, tapi melibatkan rakyat sekitar Jalan Gejayan. Muncul pula berita di koran bertajuk “Gejayan Kelabu”, karena banyak fasilitas umum rusak, seperti lampu lalu lintas, batako jalan yang berceceran, pot bunga, dan lain-lain, yang waktu itu memang diletakan di tengah jalan untuk menghadang laju gerak meriam air dan pasukan motor trail

polisi. “Gejayan kelabu” adalah sebutan dari media massa, tapi bagi Ian peristiwa itu sama sekali tak kelabu. Gejayan yang merah dan marah terhadap diktator. Kelabu bagi penguasa, karena rakyatnya tidak lagi mau ditindas dan diintimidasi —itulah Gejayan yang melawan.

Gejayan (Tak) Kelabu

Tewasnya Mozes tidak menyurutkan aksi massa di Gejayan. Selang dua hari kemudian, aksi massa digelar lagi pada 8–9 Mei 1998. Kali ini dimotori oleh mahasiswa IKIP Yogyakarta (sekarang UNY). Korlapnya aktivis dari penerbitan kampus UNY, LPM Ekspresi, Edi Sutopo. Pada awal 1998, Edi membentuk dan koleganya dari mahasiswa IKIP membentuk organ bernama Komite Aksi Mahasiswa IKIP untuk Demokrasi. Program komite itu adalah melakukan penyadaran akan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dan beragenda menuntut pencabutan 5 UU Politik, penghapusan Dwifungsi ABRI, dan turunkan Soeharto. Komite ini independen, dan bervisi menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang maju dan bermisi mengartikulasikan kepentingan rakyat serta menggerakkan mahasiswa untuk peduli dengan nasib bangsanya. Komite ini juga merupakan organisasi mahasiswa, tapi dalam hal tuntutan dan isu, memiliki kesamaan sikap dengan KPRP. “Ide yang diusung KPRP pun tak berbeda dengan kita,” terang Edi.⁸⁶

⁸⁶ Sebelum KPRP terbentuk, Edi juga sudah berteman dengan Haris Rusli Moti. Keduanya adalah aktivis di HMI Bulaksumur. Mereka jadi dekat karena sering melakukan aksi bersama, isu yang sama, dan kedekatan emosional dan perkawanan antar eksponen gerakan mahasiswa. “Jauh sebelum KPRP [dibentuk], kami sudah sering aksi bersama. Kawan-kawan UGM sering datang di aksi IKIP Yogyakarta, begitu juga sebaliknya; serta juga bila ada aksi-aksi lain —dengan begitu mereka membuat jaringan aksi sendiri,”. Disarikan dari wawancara via Whatsapp dengan Edi Sutopo, 5 Desember 2021.

Di tengah kondisi jalan porak poranda bekas aksi pada 6 Mei, massa kali itu berteriak lantang melalui megafon. Beberapa rekan lain memukul-mukul tiang listrik untuk memanggil massa. Namun, massa aksi yang ikut tampak sangat sedikit, hanya sekitar sepuluh orang, terdiri dari beberapa panitia dan massa lainnya sekadar menonton. Peserta aksi bahkan kalah ramai dengan mahasiswa yang mengantre di loket Kantor Pos (bank) di depan kampus, karena waktu itu adalah sudah masuk waktu tenggat pembayaran SPP.

Ian dan aktivis KPRP saat itu baru pulang dari aksi di UGM berjalan kaki lewat Lembah UGM. Mereka lantas bergabung dengan aksi demonstrasi tersebut. Tidak lama kemudian, polisi menyerbu membubarkan aksi. Bentrok pun tak terhindar. Massa menjawab serbuan polisi dengan lemparan batu. Polisi balas menyerang, menghujani massa dengan gas air mata berkaleng-kaleng, dengan jenis yang kelihatannya berbeda dengan yang biasa dilepas di UGM. “Jauh lebih perih di mata dan bikin mual,” kata Ian. Ian dan beberapa massa aksi terdesak hingga masuk ke halaman kampus IKIP. Dari sana, mereka terus melempar batu ke arah polisi. Namun, polisi semakin menyerbu ke dalam kampus. Ian keluar lewat jalan tikus masuk ke Gang Guru, dan berkumpul dengan massa di dekat Hotel Radisson.

Ian kemudian bergabung dengan teman-teman lain di sebelah Hotel Radisson melempar batu dan bom molotov bersama pasukan yang memang sudah disiapkan, yaitu Sastro Gempur. Sampai tengah malam, mereka masih mengendap-endap di Gang Narada yang menghadap ke Gejayan, melempari pasukan motor yang menembaki demonstran. Sekitar pukul sebelas malam, karena lapar, Ian dan dua rekan makan di angkringan depan indekosnya, di Jl. STM Pembangunan. Sehabis itu, kami ambil batu lagi dan melempari mobil patroli dan pasukan motor

bersenapan laras panjang yang mondar mandir di Gejayan. Demo ini juga berlangsung sampai pagi. Sekitar jam pukul lima keesokan harinya aksi baru berhenti.

Mengapa perlawanan di Gejayan pada aksi 5 dan 8 Mei bisa meluas dan terjadi dalam waktu lama, bahkan hingga dini hari? Ada kemungkinan perlawanan di Gejayan terjadi keras karena: *Pertama*, ada banyak kampus di wilayah Gejayan: IKIP Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, dan beberapa universitas dan sekolah tinggi lain yang lokasinya dekat dari Gejayan. *Kedua*, kampung-kampung di kiri-kanan (Timur dan barat) Jl. Gejayan adalah daerah strategis dan sentra kost-kost mahasiswa UGM, IKIP Yogyakarta (UNY Sekarang), Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, UPN, Stipper, Universitas Proklamasi, IAIN Sunan Kalijaga (UIN Yogyakarta sekarang), dll. *Ketiga*, daerah ini strategis dan selalu ramai, jadi kemungkinan mobilitas dan pengumpulan massa terbuka luas atau tinggi. *Keempat* dalam kasus bentrok perlawanan Gejayan 5 dan 8 Mei, masyarakat kampung-kampung dan massa luas masyarakat ikut terlibat aksi dan bersolidaritas untuk melawan. Ketika melihat mahasiswa yang direpresi dengan keras, sehingga Mahasiswa dan rakyat tidak bisa dipecah atau dipisahkan. *Keenam*, karena banyak kampung yang tak terpisah dengan kampus di sekitaran Jl Gejayan, meskipun dibatasi jalan raya, sehingga bisa digunakan untuk “aksi gerilya”, melawan-memukul lalu mundur ke dalam kampung-kampung dan kalau di-sweeping aparat menjauh lagi, massa keluar lagi dari kampung-kampung menuju ke Jl. Gejayan, massa berkumpul lagi, melawan lagi, dan seterusnya. *Ketujuh*, bentrok terjadi di malam hari, serta massa dalam jumlah ribuan, sehingga aparat mungkin kesulitan mengidentifikasi dan melakukan penanganan terhadap massa aksi. Gabungan situasi dan kondisi ini yang menyebabkan aksi massa sukar tuntas diatasi. Butuh waktu lama untuk mengatasinya, sebab hanya

massa yang bisa menyudahinya, manakala mereka sudah kelelahan dan membubarkan diri sendiri dan masing-masing pulang. Usai kedua aksi itu, Jalan Gejayan memang porak-poranda, tapi api perlawanan berkobar kian menyala-nyala.

Aksi Rakyat Bersatu



ak berselang lama usai pecah aksi massa di Gejayan, dimulai lagi aksi besar pada 13 Mei. Rapat awal aksi dilaksanakan di bawah tangga Gedung Dekanat Fakultas Filsafat yang dulu lebih populer disebut sebagai “Gedung Yunani”, sebuah bangunan menghadap lembah UGM dengan pilar-pilarnya yang dominan seperti kuil-kuil Yunani. Dalam rapat itu, Fendry Ponomban ditunjuk sebagai koordinator lapangan. Rapat juga memutuskan bahwa aksi akan menargetkan ke luar kampus, menuju Gedung DPRD dengan melewati Mirota Kampus ke arah Terban, melewati Jl. C. Simanjuntak. Berdasarkan dokumen, tampak bahwa unjuk rasa KPRP pada 13 Mei 1998 memang sudah diagendakan sebelumnya, bukan agenda spontan merespon tragedi penembakan aparat terhadap enam mahasiswa Trisakti, Jakarta, sehari sebelumnya. Persiapan cukup matang terlihat dari atribut yang cukup lengkap dan representatif, satu spanduk ukuran besar dan lima umbul-umbul *people power*⁸⁷ —bahkan disebutkan dalam kronologi resmi KPRP. Selebaran undangan aksi KPRP juga sama sekali tak menyebutkan tragedi penembakan enam mahasiswa Trisakti, sehingga bisa disimpulkan bahwa selebaran itu memang dibuat sebelum peristiwa penembakan di Trisakti itu terjadi. Tentu saja penembakan mahasiswa Trisakti itu menjadi pemicu semangat massa, sehingga aksi 13 Mei menjadi semakin militan dan penuh tekad. Tragedi Trisakti berefek

⁸⁷ Kronologi Aksi Rakyat, Rabu, 13 Mei 1998, hal. 1.

memperbesar jumlah massa secara signifikan, baik mahasiswa dari UGM sendiri maupun dari luar UGM.

Sebuah organ baru juga dibentuk bernama Kesatuan Aksi Rakyat Gunungkidul (KARAG). Organ baru tersebut diketuai oleh Danang Ardianta (UGM). Keanggotaan KARAG berisi para pemuda Gunungkidul, kebanyakan kuliah di Yogyakarta, sebagian lagi tidak kuliah. Dalam aksi 13 Mei di UGM, KARAG diatur tiba terakhir, dan langsung diposisikan berada paling depan sebelum akhirnya terjadi bentrok.⁸⁸

Dibangun pula ruang komunikasi radio di loker Keluarga Mahasiswa Diploma Pariwisata (KAMADIPA). Keesokan hari, mereka ikut memantau komunikasi aparat. Mereka berbagi tugas. Ada yang keliling naik motor untuk memantau situasi dan melaporkan situasi termutakhir via *handy talky*: di mana titik-titik aparat disiapkan, di mana saja ada konsentrasi Dalmas, memberi info jika terjadi bentrok, ke mana jalur evakuasi yang aman, dll. Info itu diteruskan ke korlap di lapangan lewat pesan berantai, kemudian disebar ke kawan-kawan lain. Setiap akan diadakan aksi, bom molotov juga Sastro Gempur disiapkan. ‘Peralatan tempur’ ini kemudian banyak dipakai dalam aksi-aksi yang melibatkan KPRP. Molotov itu didistribusikan dengan diwadahi ransel.⁸⁹

Ikhsan, Ketua Senat Sastra saat itu, lantas diangkat menjadi koordinator negosiator. Alasannya sederhana, ia menjabat sebagai Ketua Senat Sastra. Andai ia ditangkap saat aksi, posisi formalnya akan memberi tekanan politis tersendiri karena

⁸⁸ Anggota KARAG terdiri dari Krisna “Nana” Wijayanto, (Universitas Kristen Immanuel-UKRIM), Ibnu Raharja (UII), Agung Wijayadi (STTNas), Danur Sasana (UPN Veteran), Heri Supadmo Riyanto (API), Johan Iskandar (STIEKer), Septiawan “Iwan” Arif Wibowo (AA YKPN), Bagus “Aus” Kris Bawono (D3 Ekonomi UGM), Astuti “Tutik” Purwaningsih (USD), Wahyu Wuri Wiriatmaji (API), Bakti Handoko Dewanto (Univ. Janabadra), Hardiyanto “Abrax”, Suparman “Maman”, Alm. Setyo Budi Wibowo “Bowo Cubung”, dan lain-lain, dengan jumlah total sekitar 40 orang. Beberapa orang kemudian tidak aktif lagi di KARAG.

⁸⁹ Keterangan dari Yerry Nico Borang.



▶ Menjelang aksi 13 Mei 1998 di Perempatan Mirota. *Sumber: Dwi Oblo.*



kedudukannya itu. Aksi kali itu juga tidak boleh ada *celometan* massa untuk provokasi. Arah aksi menuju ke Gedung DPRD DIY, bukan bermaksud untuk mengadukan masalah, tapi ini simbol politik bahwa aksi harus mengarah ke institusi politik atau negara.

Ada dua pilihan rute unjuk rasa dari UGM menuju DPRD. *Rute pertama*, dari Bundaran UGM ke selatan sampai perempatan Gramedia di Jl. Sudirman, untuk orasi di depan Kantor Golkar, lantas belok kanan, dan seterusnya. *Rute kedua*, dari Bundaran UGM belok kanan, sampai di depan Mirota Kampus, kemudian belok kiri, lewat Terban, dan seterusnya. Panitia saat itu memilih rute kedua untuk dapat "menyeret" massa lebih banyak karena di daerah itu banyak berdiam kaum miskin kota yang telah lama menunggu saluran "aspirasinya", tapi aksi kali ini berbeda. Bundaran UGM sudah dipenuhi Brimob, sudah dibarikade oleh massa aksi. Entah ide siapa, tapi ide ini dianggap cerdas secara teknis. Posisi garis lurus itu posisi kekuatan yang besar untuk bentrok, terarah, dan lebih mudah dalam komando. Barisan bergerak dari Bundaran UGM berbelok di depan Kantor Pos atau Bank BNI, lalu belok kiri, dan masuk Jl. Kaliurang, ke arah menuju Jl. C. Simanjuntak. Barisan berada di utara Perempatan Mirota Kampus, memanjang hingga Purna Budaya.

Koordinator lapangan kemudian memainkan komando 'mundur dua langkah, maju tiga langkah'. Sementara, helikopter sudah berputar-berputar di atas massa aksi. Melalui pelantang suara, polisi meminta massa aksi membubarkan diri dengan tenang dan damai. Tentu saja imbauan itu diabaikan massa. Massa aksi sudah menumpuk hingga Graha Sabha Pramana. Berjarak sekitar 20 meter, antara Brimob dan massa, Ikhsan dipanggil untuk negosiasi. Ia pun maju. Negosiasi, seperti aksi kebanyakan, mentah saja. Helikopter masih meraung-raung di

angkasa. Massa semakin panas. Lalu, koordinator lapangan memainkan ‘mundur dua langkah, maju tiga langkah’, dan... bentrok pun terjadi.

Sebagian massa sudah menyiapkan bungkusan oli dan cat sebagai bagian dari “senjata”. Beberapa waktu sebelum aksi, telah terjadi diskusi antara para anggota KPRP dengan seorang peneliti bernama Hermawan “Kiki” Sulistyono, seorang anti-kekerasan yang menyarankan agar tidak melawan aparat dengan lemparan batu, melainkan dengan lemparan cat dan oli saja. Hasilnya, aparat jauh lebih jengkel karena seragamnya bakal lebih susah dibersihkan.⁹⁰ Orang tak dikenal tiba-tiba merangsek ke arah panzer, kemudian sambil berdiri di atas panzer memberi semacam komando, meminta massa aksi untuk mundur dan kembali masuk ke kampus. Massa protes karena merasa orang tersebut bukan pimpinan mereka. Dua orang petugas keamanan dari kepanitiaan aksi mendekati panzer dan meminta identitas si pelaku, tapi dihalangi aparat. Orang tersebut kemudian turun dan pergi entah ke mana.⁹¹

Jelang Magrib, massa aksi dipukul mundur. Di area kampus, mereka tidak bisa lari ke selatan, ke arah perumahan UGM, karena aparat juga masuk dari sana. Aparat juga sampai masuk ke ruang kuliah D3 Sastra. Beberapa mahasiswa kena pukul, beberapa disuruh jalan jongkok sampai depan Fakultas Filsafat. Dalam bentrok saat itu, banyak pula yang terkena gas air mata, termasuk para jurnalis. Massa baru berhasil dibubarkan jelang maghrib, setelah dihalau pasukan bermotor (gegana). Sampai malam sekitar jam tujuh–delapan, anak-anak Timor Leste dan massa lain masih bakar ban di perempatan Selokan Mataram, Jl. Kaliurang. Kemudian polisi mengusir massa sampai ke daerah Karang Bendo, Klebengan, dan Pogung Lor. Beberapa kawan

⁹⁰ Keterangan Yerry Nico Borang.

⁹¹ Kronologi Aksi Rakyat, Rabu, 13 Mei 1998, hal. 2.

menghindar masuk Kampung Karang Bendo. Polisi tidak berani mengejar masuk kampung karena listrik di setiap rumah penduduk dimatikan. Keadaan gelap gelita dan sepi untuk beberapa saat. Setelah polisi mundur, baru lampu-lampu kembali dinyalakan.⁹² Ketika bentrok semakin brutal, beberapa massa aksi sempat lari dan terjebak di sekitar Jl. C. Simanjuntak, yang ternyata berada di gang buntu. Larilah mereka ke Gelanggang UGM, lompat pagar, kemudian lari lagi lewat perkampungan Kuningan. Melawati kampung Kuningan, mereka disambut penduduk kampung dengan kata-kata penyemangat untuk terus berjuang.

Setelah aksi, massa aksi menyisir daerah sekitar, mencari data korban jika ada yang belum kembali, atau korban luka berat. Bagaimanapun, aksi 13 Mei itu sangat represif.⁹³ Dokumen yang ada menunjukkan profesionalitas dan tanggung jawab panitia aksi dan KPRP. Pernyataan Sikap KPRP atas apa yang terjadi dalam aksi ditandatangani pukul 20:38 WIB, hari itu juga. Selain selebaran undangan aksi, kronologi, dan pernyataan sikap KPRP pasca-aksi, ada juga selebaran pasca-aksi, juga kumpulan data dari Divisi Advokasi dan Investigasi KPRP yang begitu lengkap meliputi daftar korban kendaraan roda dua dan roda empat yang rusak lengkap dengan nomor polisi, daftar gedung yang mengalami kerusakan, juga daftar nama 145 orang yang ditangkap aparat. Untuk memberikan gambaran lebih utuh, berikut kronologi resmi yang disusun dan dikeluarkan KPRP. Beberapa Dokumen lain berkaitan dengan Aksi 13 Mei 1998 kami cantumkan pula sebagai lampiran buku, antara lain: Selebaran undangan aksi 13 Mei 1998, pernyataan sikap dan selebaran KPRP pasca aksi, serta Laporan Tim Advokasi dan Investigasi KPRP terkait insiden yang terjadi dalam Aksi 13 Mei 1998.

⁹² Keterangan Antonino Delimas, Peternakan UGM, 1990.

⁹³ Keterangan Antonius Hendro Rahtomo alias Hendro "Tuhan".

KOMITE PERJUANGAN RAKYAT UNTUK PERUBAHAN KRONOLOGI AKSI RAKYAT, RABU 13 MEI 1998

123

09.45 — (Satu spanduk ukuran besar, lima umbul-umbul *people power*, massa berkumpul kurang lebih 100 orang). Aksi dimulai di Fakultas Filsafat. Sebagian massa bergerak ke Fisipol dan sebagian lagi menunggu di Filsafat.

09.50 — Aksi berlanjut di Fisipol dengan orasi-orasi mengenai harus digulingkannya Soeharto dengan cara rakyat bersatu dan imbauan melakukan mogok umum. Orasi kedua mengenai berkabung nasional karena ada enam orang mahasiswa Trisakti, Jakarta, yang tewas dalam Aksi Keprihatinan, ditembak aparat. Dilanjutkan mengheningkan cipta dan menyanyikan “Hymne Darah Juang”.

10.07 — Ajakan berdiri untuk melakukan rally dan menyanyikan lagu “Gantung Soeharto”.

10.30 — Melakukan rally dan melewati Fakultas Filsafat, Fakultas Sastra, sambil terus menyanyikan “Gantung Soeharto”, dan orasi harus tergulingnya Soeharto.

10.45 — Sampai di Boulevard, dan menghentikan barisan untuk melakukan orasi.

11.00 — Kembali mengheningkan cipta untuk mengenang perjuangan enam orang mahasiswa Trisakti, Jakarta, yang tewas dalam Aksi Keprihatinan, Selasa, 12 Mei 1998, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Hymne Darah Juang”.

11.10 — Panitia aksi mengajak massa untuk bergerak, berbelok ke jalan depan Bank BNI dan masuk ke ruas Jl. Kaliurang sambil terus melakukan orasi dan menyanyikan lagu “Gantung Soeharto”.

11.20 — Aparat keamanan datang dan memblokade perempatan jalan depan Mirota Kampus. Datang helikopter berkeliling di atas massa beberapa kali sambil terus melakukan provokasi dari pelantang suara yang diarahkan ke massa aksi.

12.35 — Setelah diselingi orasi-orasi mengenai harus menggulingkan Soeharto dengan cara turun ke jalan, panitia aksi membawa massa bergerak maju hingga akhirnya berhadap-hadapan (kontak) dengan aparat keamanan di perempatan jalan depan Mirota Kampus.

13.00 — Datang panser dan melakukan tembakan kosong sebagai provokasi dilanjutkan dengan provokasi aparat memaksa massa untuk membubarkan diri.

13.25 — Ada provokasi keributan di ruas jalan sebelah timur (depan toko komputer Chika). Sementara, peserta aksi semakin mendesak ke arah aparat yang melakukan barikade dengan komande koordinator lapangan.

13.30 — Seorang (mengaku) mahasiswa masuk panser aparat dan berpidato dari sana untuk menyuruh massa kembali masuk ke kampus. Massa protes karena merasa orang tersebut bukan pimpinannya. Dua orang petugas keamanan dari kepanitiaan aksi mendekati panser dan meminta identitas si pelaku tapi dihalangi aparat. Orang tersebut kemudian turun dan entah ke mana.

13.40 — Aparat kembali berpidato dari mikrofon panser menyuruh massa bubar.

14.05 — Pidato aparat yang memberikan batas waktu sekitar setengah jam untuk massa membubarkan diri.

14.10 — Massa diarahkan untuk maju lagi dan kembali terjadi saling dorong dengan aparat. Pukul-memukul terjadi sebelum panitia aksi berhasil menguasai kembali massa agar berhenti dan mengatur strategi.

14.15 — Aparat mengingatkan kembali mengenai batas waktu agar massa membubarkan diri. Massa kembali mendesak, hingga akhirnya aparat melakukan penyemprotan air dari panser sehingga barisan chaos dan berlarian. Mereka kemudian membalas perlakuan aparat dengan melemparkan batu. Kemudian panser masuk ke ruas Jl. Kaliurang sambil terus menyemprotkan air. Untuk sementara massa terdesak mundur.

14.18 — Provokasi dengan tembakan kosong dan pasukan bermotor disiapkan di perempatan jalan depan Mirota Kampus sehingga massa kembali mundur menghindari penyerbuan.

14.25 — Pembakaran sampah di tengah Jl. Kaliurang mulai dilakukan oleh massa.

14.30 — Panser masuk kembali ke ruas Jl. Kaliurang setelah mundur, dan massa membalasnya dengan lemparan batu dari arah depan dan samping (depan UPT Perpustakaan UGM).

14.35 — Tembakan gas air mata sebanyak empat kali mulai dilakukan. Dua buah masuk ke ruas Jl. Kaliurang, dan dua buah lagi masuk ke halaman depan UPT Perpustakaan UGM.

14.40 — Kembali ada tembakan kosong sebagai bentuk provokasi aparat.

14.50 — Aksi lemparan batu terjadi kembali karena pihak aparat kembali menyembrotkan air dari panaser ke arah massa aksi. Aksi itu kemudian mereda. Dan di depan UPT Perpustakaan, massa aksi menyelamatkan mobil milik rakyat agak ke samping agar terbebas dari tangan-tangan jahil dan anarkis.

15.00 — Massa kembali duduk tenang di ruas Jl. Kaliurang untuk mendengarkan orasi. Antara lain dikemukakan mengenai aturan-aturan mengikuti aksi KPRP yang antara lain dilarang melempar aparat terlebih dahulu, dilarang membelokkan isu ke arah SARA dengan misalnya melempar toko atau fasilitas umum, serta untuk menangkap orang-orang yang diduga memprovokasi agar massa menjadi anarkis. Orasi sempat istirahat untuk mendengarkan adzan Ashar.

15.10 — Pembacaan “Sumpah Rakyat Indonesia”. Kemudian massa dikomando untuk mundur perlahan-lahan sebelum disuruh duduk kembali di ruas Jl. Kaliurang.

15.15 — Dicapai kesepakatan aparat dengan tim negosiasi bahwa aparat akan mundur sekitar seratus meter dan massa aksi mundur sampai pertigaan KOPMA UGM. Hal ini dilakukan untuk strategi mengingat ruas jalan itu tidak memiliki lorong untuk melarikan diri bilamana diserbu oleh aparat. Panitia mengumumkan bahwa aksi akan terus berlanjut, bahkan sampai malam, untuk tetap memperjuangkan tuntutan mereka sekaligus penghormatan terhadap pejuang reformasi yang telah gugur (Mozes dan mahasiswa Trisakti).

15.18 — Untuk mengenang mereka, dinyanyikan lagu “Gugur Bunga”.

15.25 — Mundur kembali beberapa langkah sambil menyanyikan lagu “Gantung Soeharto”, untuk mengatur strategi aksi.

15.30 — Massa diajak mundur masuk ke Lorong KOPMA. Panitia aksi mengumumkan bahwa untuk Sementara Jl.Kaliurang tidak aman karena telah dikepung oleh aparat keamanan. Mereka mengajak massa aksi masuk ke Boulevard UGM. Sebagian massa menolak dan sebagian lagi telah menduduki boulevard. Akhirnya massa aksi turun semua ke boulevard dan mendudukinya. Di Boulevard, kemudian terjadi perang batu dengan aparat keamanan yang mengejar sampai bunderan dengan memasang pasukan bermotor yang telah bersiap dengan lampu menyala.

15.40 — Massa masih menduduki boulevard. Kemudian, ada tembakan gas air mata dari samping Gelanggang. Panser telah diparkir di pertigaan Gelanggang—Jl. Kaliurang.

16.00 — Aparat keamanan mengepung Boulevard UGM dari arah selatan (Bunderan), barat (ruas Jl. Kaliurang), dan timur (Jl.Colombo). Panitia aksi memberitahu agar massa jangan lari ke samping, tapi jika ingin menyelamatkan diri, lari ke Gedung Graha Sabha Pramana arah utara). Ada tembakan gas air mata sehingga massa kemudian mundur ke Gedung Graha Sabha Pramana.

16.15 — Massa menguasai jalan depan Purna Budaya.

16.20 — Aparat menyerbu dari arah selatan diikuti pasukan bermotor. Massa aksi masuk ke lapangan Grha Sabha Pramana. Terjadi penembakan dari arah Jl. Kaliurang oleh pasukan bermotor. Dua orang aparat (Dalmás) dengan senjata pentungan dan senapan masuk ke Purna Budaya. Massa merasa tidak terima dan menyerang mereka dengan batu sehingga keduanya kemudian mundur kembali.

16.30 — Massa aksi kembali menduduki Jl.Kaliurang dan membuat barikade. Mereka menemukan bukti-bukti selongsong peluru tajam yang telah digunakan oleh aparat keamanan dalam menindak peserta aksi.

16.50 — Panser masuk lewat samping Gelanggang, sementara aparat berjalan ke arah utara di ruas Jl.Kaliurang. Kembali terjadi lemparan batu dari dalam lapangan Grha Sabha Pramana.

16.54 — Aparat mundur kembali ke selatan. Massa aksi turun kembali ke ruas Jl. Kaliurang dan membuat barikade-barikade dari kayu-kayu yang ditumbangkan serta membakar sampah-sampah. Massa aksi telah bertambah sehingga mencapai perempatan Pos Polisi Depok. Massa semakin mendesak hingga kembali menguasai depan Gedung UPT Perpustakaan UGM.

17.15 — Aparat keamanan berbasis di depan Mirota Kampus dan tetap berjaga di sana dengan membuat pagar betis di ruas jalan ke arah utara dan arah timur di mana peserta aksi berada. Pasukan baru datang dengan diiringi sebuah panser, dan berbasis di utara Pos Polisi Depok.

17.50 — Aparat keamanan menyerbu masuk ke Kampus UGM. Massa aksi sempat melawan sebelum terdesak mundur, masuk ke lorong-lorong kampus. Aparat semakin masuk ke wilayah otonomi kampus ke Lapangan Grha Sabha Pramana, dan bahkan masuk jauh sampai halaman Gedung Pusat UGM.



PRESENSI

1. Nining
2. Thaman H.
3. Dudy H.
4. Asrochman M
5. Winda W
6. Muhammad Nur Rizal
7. HARI S Resky
8. ADI
9. Gynardi
10. Dhuha
11. Titok
12. Agus
13. MEDHY AGINTA H
14. Muhammad Amon Ridlo
15. DAVIS RISWAR
16. TUTUR HARI N
17. IRMA
18. HIRMAH
19. Fahriral
20. LIMARO
21. Anang Karniawan

PIJAR / FI
ABDINISAPOL

SM-UGM
SMCI - AM TISIPOL

SMUGM
SM UGM
SM Costa

Demo

DB Soutro
Alimudris

Demo

SME
SME

KT
SMU

PIJAR / FI
PIJAR

- 11 -

SMF FI

SMF FI

BENU

1. Huda
2. Huda

3. Huda
4. Huda

5. Huda

6. Huda

7. Huda

8. Huda

9. Huda

10. Huda

11. Huda

12. Huda

13. Huda

14. Huda

15. Huda

16. Huda

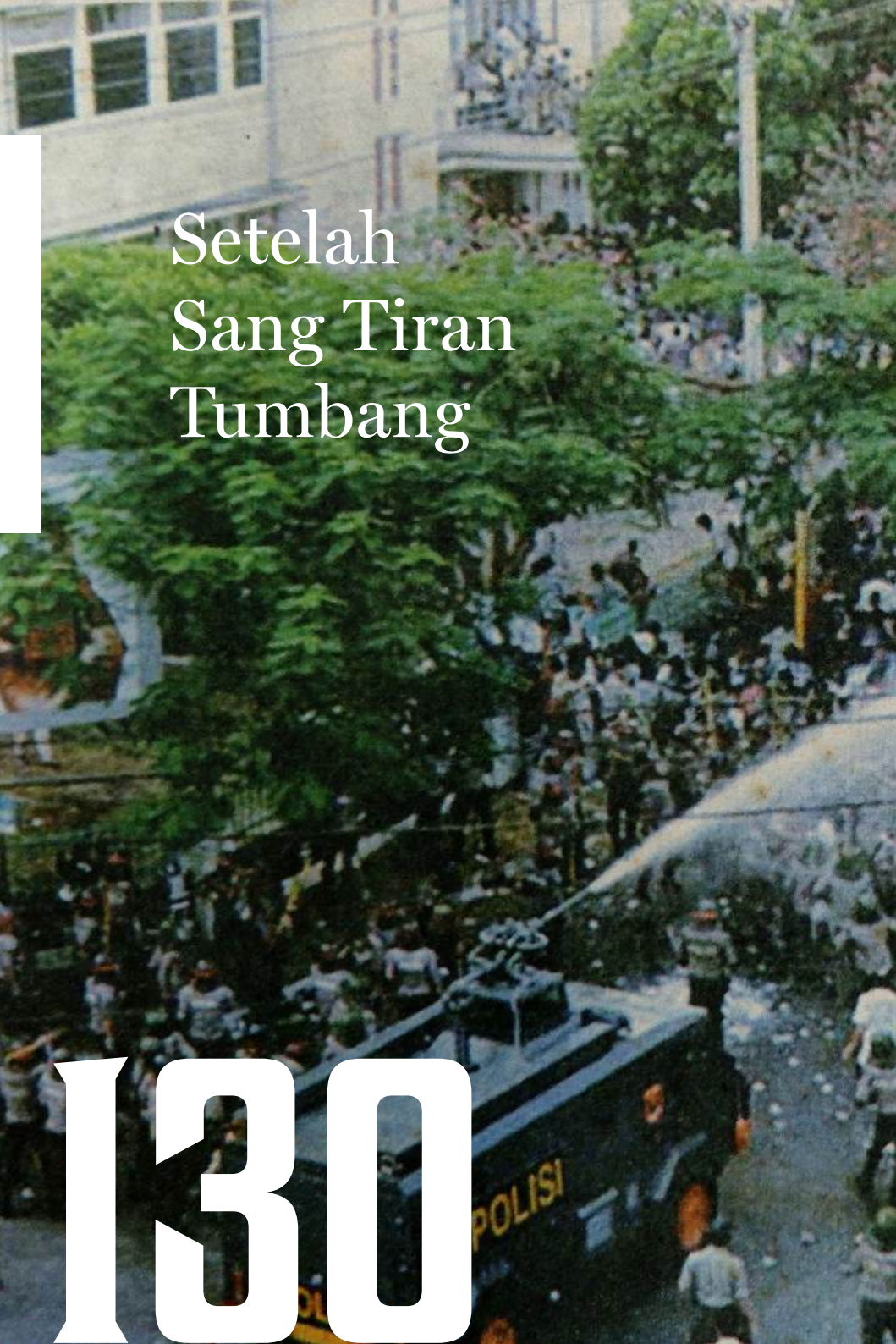
17. Huda

18. Huda

19. Huda

20. Huda

21. Huda

An aerial photograph showing a large crowd of people gathered on a street. A police vehicle, equipped with a water cannon, is positioned in the lower right, spraying water towards the crowd. The word "POLISI" is visible on the side of the vehicle. In the background, there are trees and a building with a statue on top. The scene appears to be a protest or a public demonstration.

Setelah Sang Tiran Tumbang

130



► Aksi Bentrok KPRP, 13 Mei 1998 di Perempatan Mirota. Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, Mei 1998



iapa sangka Tiran Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Wakilnya, Bacharuddin Jusuf Habibie, naik ke tampuk kekuasaan. Dengan begitu, apakah membuat yang diperjuangkan para aktivis tercapai? Jawabnya tidak. Pengunduran diri Soeharto bahkan tak membuat gembira aktivis KPRP. Begitu mendengar kabar itu mereka justru terkejut karena tidak menduga Soeharto mundur secepat itu. Saat pengumuman disiarkan lewat stasiun televisi nasional, kebanyakan dari aktivis KPRP berada di posko Sekretariat Pijar. Beberapa wartawan sempat mengontak KPRP dan bertanya tentang respons usai Soeharto menyatakan mundur. Mereka hanya bisa memberi jawaban sekadarnya, bahwa mereka perlu berkoordinasi karena KPRP terdiri dari banyak organ yang berjejaring dengan kota-kota lain. Namun tak butuh waktu lama untuk KPRP bersikap. Berdasarkan selebaran undangan pada 22 Mei 1998, KPRP mengadakan aksi mimbar bebas di Boulevard UGM. Mereka mengusung tiga tuntutan, yaitu: “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, Rakyat bersatu adili Soeharto, dan Rakyat bersatu menuju perubahan”.

Bagi KPRP, Soeharto adalah “simbol sistem” yang despotik. Tanpa perubahan mendasar, jaringan Orde Baru berpotensi bangkit lagi di kemudian hari. Selain itu, ketika orang-orang masih euforia dan menerima Habibie, KPRP berpandangan perlu menyeret Soeharto ke pengadilan. Waktu itu yang diinginkan KPRP—seperti juga komite-komite mahasiswa lain di kota lain—adalah membentuk kabinet rakyat, pemerintahan koalisi pergerakan rakyat di luar pemerintahan Soeharto. Namun, gelombang euforia itu cukup kuat dan berlangsung dari Mei–Agustus 1998. UGM bahkan juga membuat panggung cukup besar untuk merayakannya. Baru kemudian memasuki September–November mulai gencar penolakan pertanggungjawaban Habibie di SI MPR. Meski dalam suasana euforia, tapi KPRP tetap berdiskusi apakah menerima atau menolak Habibie. Akhirnya, keputusan saat itu

KPRP tegas menolak Habibie. Pada akhirnya, menurut pandangan KPRP, Habibie tak lain adalah murid yang selalu “berbakti” pada gurunya, dan akan selalu bersikap “*mikul dhuwur mendhem jero*” —kepada Soeharto.

Tak begitu lama setelah Soeharto jatuh, KPRP mengadakan rapat di Fakultas Sastra UGM. Rapat itu direncanakan untuk mencopot Fendry Ponomban selaku sekjen. Saat itu ia sudah jarang terlihat. Situasi organisasi memang agak runyam. Meski sempat mengadakan aksi setelah Soeharto mundur, KPRP tampak kebingungan. Yang terjadi adalah posko semakin hari kian kosong. Orang-orang hanya sering nongkrong, main gitar dan nyanyi-nyanyi. Penyebabnya tidak tunggal. Para aktivis KPRP sedang kelelahan secara psikis ditambah pula mereka dan jejaringnya mengalami disorientasi, tak tau harus berbuat apa. Sementara itu, banyak pula di antara kawan-kawan mereka mulai aktif kuliah kembali. Belum lagi organ-organ yang sebelumnya ada di bawah koordinasi KPRP mulai melempem, karena banyak aktivis dan penggeraknya kembali berkuliah yang membuat euforia perlawanan juga hampir padam. Beberapa dari para aktivis waktu itu bahkan mulai ikut Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang waktu itu marak di Yogyakarta.

Kondisi itu sepertinya membuat beberapa orang resah dan berujung pada rapat itu. Sepertinya, Jemek (Wibowo Arief) mendengar hal itu, lalu dia mulai melakukan manuver politik dengan beberapa kawan lain yang berujung pada rapat di Fakultas Sastra itu. Saat itu, Puthut dikehendaki oleh peserta rapat menggantikan Fendry. Dia tak bisa menolak, sebab semua orang di forum itu setuju. Sejak itulah, Puthut menjadi sekjen. Sebagaimana karakter gerakan kiri, posisi sekjen memang strategis, karena Moti mengurus berbagai pendidikan, mengisi diskusi di berbagai tempat, konferensi pers, dll. Keputusan kerja-kerja strategis, apalagi melibatkan pengurus dan anggota, ada di bawah

wewenang sekjen.⁹⁴ Itulah mengapa kelak ketika pindah dan tinggal di posko di luar kampus, aktivis lama tinggal beberapa gelintir saja. Selebihnya adalah aktivis baru di antaranya: Amerta Kusuma, Abhisam Demosa, Sabinus Moa, Daru Supriyono, Veronica Kusuma, Elisabet Ida, para angkatan baru yang waktu itu baru lulus SMA⁹⁵.

Tak lama kemudian, posko KPRP di sekretariat Pijar juga mulai dipertanyakan pihak kampus melalui PU Pijar saat itu, Irma. Pihak rektorat saat itu berkata bila sudah tidak ada alasan lagi untuk KPRP dan jaringan tetap beraktivitas di UGM. Personel KPRP dari luar UGM memang sukar disamarkan, yang paling mencolok tentu saja para mahasiswa asal Timor Leste dan para anggota SPI dengan penampilan khasnya. Apalagi, jumlah mereka cukup banyak. Lantas dibicarakan tentang mencari alternatif tempat sebagai sekretariat komite. Akhirnya, dengan uang sumbangan dan kontribusi banyak pihak yang bersimpati dan mendukung, sekretariat anyar berhasil disewa tak begitu jauh dari UGM – Gg. Pandega Marta VI No. 32, Jl. Kaliurang Km. 6. KPRP pun menempati markas barunya beberapa saat pasca-Soeharto mengundurkan diri. Mau tak mau, fase pindah posko ini menyita waktu mereka juga sehingga agak lambat merespon isu politik terbaru.

Meski kondisi organisasi tak kunjung membaik setelah kepindahan posko, KPRP masih aktif menyuarakan tuntutan dan menggalang perlawanan. Beberapa menyoroti masih bercokolnya Dwifungsi ABRI —seperti diselenggarakannya sebuah diskusi terbuka pada 13 Juli 1998 yang bertema “Korban Penculikan ABRI Angkat Bicara”. Juga sebuah aksi pada 4 September 1998 yang lantang menyatakan bahwa “Dwifungsi ABRI Musuh Demokrasi”. Kelak, untuk isu ini baru pada masa Presiden

⁹⁴ Percakapan pribadi via whatsapp dengan Puthut Eko Ariyanto, 13 April 2025.

⁹⁵ Percakapan pribadi via whatsapp dengan Puthut Eko Ariyanto, 13 April 2025.

Abdurrahman Wahid (1999–2001), yang terpilih usai Habibie, militer secara formal meninggalkan doktrin dwifungsi ini.

Huru-Hara Sidang Istimewa

Pada 10–13 November, SI yang sudah menjadi rutinitas tiap usai pemilu, bergulir. Namun segera menuai berbagai aksi massa. Pada 5 November 1998 unjuk rasa berlangsung di enam kota —Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Solo, Palu, dan Manado. Aksi ini mengangkat isu “Tolak SI MPR, cabut Dwifungsi ABRI, dan Adili Soeharto.” Di Yogyakarta, seperti pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, 6 November 1998, PRD melakukan aksi di depan Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta. Mereka menuntut “Adili pelaku pembantaian umat Islam dan menolak penyelenggaraan SI MPR 10–13 November 1998; Pencabutan Dwifungsi ABRI; dan Adili Soeharto”.⁹⁶ Sementara, KPRP saat itu juga sedang menggelar Kemah Anti Dwifungsi ABRI di Bundaran UGM. Mereka juga diskusi tentang pelanggaran HAM di Aceh yang dilakukan ABRI Ketika daerah itu dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Materi Diskusi diberikan oleh para aktivis dari Forum Solidaritas Mahasiswa Aceh di Yogyakarta (Formasta). Esoknya, 6 November 1998, Aksi Kemah juga menggelar diskusi yang menggagas persoalan militerisme Indonesia di masa mendatang. M. Najib Azca, dosen Fisipol UGM tampil menjadi pembicara utama. Najib adalah salah seorang intelektual Indonesia, penulis buku penting soal militer peran militer di ranah politik, *Hegemoni Tentara* (1998).⁹⁷ Tak hanya diskusi, KPRP mengadakan pemutaran film dokumenter aksi demonstrasi mendesak Presiden Soeharto turun.⁹⁸

⁹⁶ *Kedaulatan Rakyat* (KR), 6 November 1996,

⁹⁷ KR, 7 November 1998

⁹⁸ KR, 8 November 1998.



► Massa Sidang Rakyat Indonesia menuju RRI Yogyakarta.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, November 1998.

Sementara itu, tekanan bertubi-tubi dari Gerakan Mahasiswa terus menghujani SI MPR. Para mahasiswa yang dimotori aktivis Keluarga Mahasiswa UGM (KM-UGM) di Yogyakarta dan UI di Jakarta mengancam akan turun ke jalan jika dalam SI tidak diagendakan pencabutan Dwifungsi ABRI, tolak asas tunggal, serta adili Soeharto dan kroni-kroninya (KR, 7 November 1998 hal. 1) Selain itu, muncul pula tuntutan segera dilaksanakan Pemilu yang demokratis –langsung, bebas, jujur, dan Jurdil.⁹⁹

Pada 7 November 1998, unjuk rasa di berbagai kota turut melibatkan para pelajar. Ribuan pelajar dari Pelajar Islam Indonesia (PII) melakukan aksi unjuk rasa dengan konvoi mengelilingi kota Jakarta. Mereka mengutuk tindakan kekerasan dan mengharapkan SI MPR tidak dijadikan dagelan politik. Di Yogyakarta Dewan Pelajar Yogyakarta (DPY) dan Gerakan Pelajar Revolusioner (Gelar) melakukan aksi di Bundaran UGM dengan berseragam sekolah. Pada garis besarnya, dua kelompok pelajar ini menuntut

agar Dwifungsi ABRI segera dicabut, penghapusan asas tunggal, dan pengadilan terhadap Soeharto.¹⁰⁰ Selain aksi tersebut, masih ada beberapa aksi lain, di antaranya yang diadakan oleh Serikat Pengamen Indonesia (SPI) yang diadakan di depan Benteng Vredenburg dengan nama “Seni Perlawanan di bawah Bayang-bayang Ideologi Kekerasan”.¹⁰¹ Masyarakat pun semakin khawatir bila terjadi bentrokan antar-kelompok yang berseberangan. Sementara itu, ditengarai adanya kelompok ekstrem yang ingin memaksakan kehendak. Kelompok ini menyebar rumor seakan yang mengganggu Habibie sama halnya mengganggu Islam. Siapa pun yang melawan Habibie sama saja melawan Islam.¹⁰²

Di UGM, Sabtu 7 November 1998, tiba-tiba Hamengku Buwono X datang. Ia mendatangi lokasi Kemah Anti-Dwifungsi ABRI oleh KPRP yang dimulai sejak 4 November 1998 dan selesai setelah SI MPR. Tak ada mahasiswa menyambut, karena sedang mengikuti sarasehan di Fakultas Sastra. HB X hanya ditemui dua orang, Fransisco Cancio, mahasiswa Timor Leste, dan Bambang Supriyanto, serta disusul beberapa mahasiswa lain. HB X menginginkan para pemuda dan mahasiswa menuliskan aspirasinya yang akan dibawa ke SI MPR.¹⁰³

Sehari menjelang SI MPR, Jakarta semakin mencekam sekaligus menyeramkan. Kelompok-kelompok yang pro maupun kontra SI MPR mulai unjuk kekuatan. Jalan-jalan macet, masyarakat kebingungan mencari angkutan kota. Pengamanan (Pam) Swakarsa SI-MPR pada Senin, 9 November 1998, melakukan arak-arakan dengan puluhan truk di ibukota. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) —seperti AMPI, PP, Warga Jaya, Pramuka, dan Hansip— dilibatkan dalam

¹⁰⁰ *KR*, 8 November 1998.

¹⁰¹ *KR*, 8 November 1998.

¹⁰² *KR*, 9 November 1998.

¹⁰³ *Kompas*, 9 November 1998

pengamanan SI. Bentrokan pun tak dapat dihindari ketika dua truk Pam Swakarsa mendatangi gedung Universitas Katolik Atma Jaya di Semanggi. Mereka mulai menggoyang pagar kampus saat mahasiswa melaksanakan aksi menyatakan ingin bergabung, tapi ditolak. Hingga malam, masih terjadi mobilisasi massa mahasiswa menuju UI. Jalanan pun macet. Aksi-aksi unjuk rasa semakin marak, tak hanya di ibukota, juga di banyak kota seperti Yogyakarta, Lampung, dan kota-kota lain. Bahasan tentang DwiFungsi ABRI dan tuntutan pencabutannya juga marak dibahas di berbagai forum.¹⁰⁴

Aksi penolakan SI MPR dan menuntut pembentukan Pemerintahan Transisi pun digelar di Purwokerto pada 10 November 1998. Mereka menilai anggota MPR yang bersidang merupakan hasil Pemilu 1997, yang tak lain adalah produk Orde Baru. Setelah aksi selesai, ternyata mereka menuju RRI dan meminta kepala RRI menyiarkan suara berisi tuntutan mereka yang antara lain: “penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal; pencabutan Dwifungsi ABRI; pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya”.¹⁰⁵ Demikian juga di Semarang, terjadi aksi menolak SI MPR, dengan tuntutan yang relatif sama, yaitu: “pencabutan Dwi Fungsi ABRI, pengusutan terhadap dugaan KKN Presiden Soeharto, pisahkan Polri dari ABRI, dicabutnya Pancasila sebagai asas tunggal, dan pencabutan 5 paket UU Politik.” (*KR*, 11 November 1998 hal. 12) Di ibukota, bentrokan massa aksi unjuk rasa semakin hebat. Bahkan seorang mahasiswa berani menabrakkan mobilnya ke aparat yang menghadang demonstran di tengah jalan, akibatnya 5 aparat luka-luka berat, bahkan seorang kritis. Ada juga seorang mahasiswa yang nekat menerobos barikade aparat dengan motornya.¹⁰⁶ Di Yogyakarta,

¹⁰⁴ *KR*, 10 November 1998.

¹⁰⁵ *KR*, 11 November 1998.

¹⁰⁶ *KR*, 11 November 1998.



► Hamengkubuwono X berkunjung ke Aksi Kemah Anti-Dwifungsi ABRI KPRP.
Sumber: Kompas, November 1998.

aksi unjuk rasa pun terus terjadi. Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Amikom Yogya pun mengadakan aksi di depan Mapolda dengan tuntutan “Cabut Dwifungsi ABRI; Tolak Pancasila sebagai asas tunggal; Adili Soeharto dan kronikroninya”.

Di tengah aksi-aksi pro–kontra SI MPR yang kian marak, ratusan mahasiswa dan pelajar mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa/Pelajar Timor-Timur (Impettu) Yogya menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Sasana Dharma Wiratama, Jl. Jenderal Soedirman, 12 November 1998. Aksi yang didukung KPRP ini memperingati tujuh tahun tragedi berdarah di Santa Cruz, Timor–Timur. Aksi yang sama dilakukan oleh mahasiswa Timor-Timur Semarang. Mereka menuntut Presiden Habibie segera membuka kembali kasus pembantaian Santa Cruz, Dili, dan mengumumkan secara terbuka jumlah korban serta di mana

kuburnya.¹⁰⁷ Aksi Impettu Yogya menuntut agar mengusut kembali tragedi ‘Pembantaian Santa Cruz, menarik seluruh tentara Indonesia dari wilayah Timor-Timur, membebaskan seluruh tahanan politik Timor Leste tanpa syarat, dan menyelenggarakan referendum bagi penentuan nasib sendiri bangsa Timor Leste. Referendum tidak akan tercapai jika Dwifungsi ABRI belum dicabut, karena doktrin inilah yang selama ini membelenggu kemerdekaan rakyat, demikian dikatakan Francisco Cancio.

Aksi Impettu berangkat dari Kemah Anti-Dwifungsi ABRI oleh KPRP di Bundaran UGM. Sebelum berangkat, aksi orasi menyatakan mengutuk kejadian 12 November 1991 yang menelan korban 271 jiwa yang sampai sekarang tak jelas nasibnya. Setelah itu mereka menuju Monumen sasana Dharma Wiratama lewat Jl. Cik Di Tiro. Di depan Monumen sasana Dharma Wiratama, mereka berorasi, menunjukkan foto-foto kekejaman ABRI dalam ‘Peristiwa Pembantaian’ itu, pembacaan kronologi ‘Peristiwa Pembantaian’, pembacaan puisi, menyanyikan lagu perlawanan pemuda Timor-Timur *Oele* (Perjuangan), menyanyikan “Darah Juang”, diakhiri menyalakan lilin di sekeliling monumen. Ketua KPRP, Haris Rusly Moti, berorasi mendukung perjuangan rakyat, mahasiswa dan pelajar. KPRP dalam pernyataan sikapnya menuntut 6 poin, di antaranya: pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan akar segala masalah dan bencana di Indonesia maupun di Timor Leste, mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Timor Timur untuk mencapai kemerdekaan, dibebaskannya para aktivis yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Timor Timur. KPRP juga menuntut diseretnya Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.

Selain aksi yang dilakukan mahasiswa Timor Timur dan KPRP, di Yogyakarta juga marak dengan aksi ratusan Mahasiswa IST

Akprind Yogyakarta yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) ISTA. Mereka *longmarch* dari Kampus Balapan Jl. Solo menuju DPRD DIY. Aksi ini Mendapat dukungan langsung dari rektor dan ikut jalan kaki bersama mahasiswa sampai ke DPRD DIY. Dalam aksinya, mereka menuntut dihapuskannya fungsi sospol ABRI, menuntut Soeharto dan kroninya diadili, menuntut dibersihkannya pemerintahan RI dari unsur Orde Baru, membubarkan Golkar. Pada hari itu juga, 4 dari 6 aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) yang sudah melakukan aksi mogok makan selama 3 hari di Kampus STIE YKPN Seturan harus dilarikan ke Rumah Sakit.¹⁰⁸

Sementara di Semarang, selain menuntut pengungkapan Pembantaian Santa Cruz, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mengumumkan dan mengadili pelaku pembantaian. Perundingan intensif antara Portugal-Indonesia serta wakil rakyat dari Timor Timur di bawah PBB agar dibuka kembali guna mencari penyelesaian masalah Timor Leste. Aksi itu juga menuntut pembebasan Presiden Conselho Nacional de Reconstrução de Timor (CNRT/Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor) Kay Rala Xanana Gusmao serta para tapol Timor Leste lain, menuntut dihentikannya politik adu domba antar rakyat Timor Leste. Tuntutan tertulis ditandatangani Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur, Horacio De Almeida MDR, dan sekretarisnya, Maria Graciete, menuntut pasukan ABRI di Timor Leste agar segera ditarik secara menyeluruh. Mahasiswa menganggap ABRI di Timor Leste selama ini telah melakukan pelanggaran HAM, pelecehan terhadap agama, dan bentuk tindakan represif lainnya.

SI MPR itu ditutup dalam suasana mencekam. Sidang yang menghasilkan 12 Ketetapan MPR ini lahir di tengah simbah darah para mahasiswa dan warga masyarakat. Bentrok mahasiswa melawan

¹⁰⁸ KR, 13 November 1998.

aparatus menimbulkan 6 orang korban tewas, 122 orang luka berat-ringan, dan yang masih dirawat di rumah sakit 19 orang. Kabar Terakhir, terjadi kembali bentrokan fisik hingga korban tewas bertambah 3 orang, sehingga total ada 9 orang korban tewas.¹⁰⁹

Kedaulatan Rakyat 14 November 1998 menulis bahwa harga sembako semakin sulit ditebak, sehingga distributor maupun pedagang tidak berani memiliki stok, takut merugi. Sementara, aksi unjuk rasa makin marak. Beberapa aksi massa mahasiswa mulai suka “berkunjung” ke stasiun RRI —seperti yang terjadi di Yogyakarta, Solo, Purwokerto, dan Malang. Forum Bersama Yogyakarta (FBY) yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, masyarakat, menggelar “Sidang Istimewa Rakyat Yogyakarta” (SIRY) di sepanjang Jl. AM Sangaji, depan Kodim 0734/Yogyakarta, Jumat sore, 13 November 1998. Usai sholat Jumat, FBY menggelar aksi di Bundaran UGM, dilanjutkan *long march* menuju Makodim. Aksi ini kelanjutan aksi sehari sebelumnya. SIRY diikuti 30 elemen massa, salah satunya PRD.

Tragedi berdarah selama dan sesudah SI MPR memicu unjuk rasa yang lebih hebat di berbagai daerah pada 14 November, antara lain di Yogyakarta, Solo, Magelang, Semarang, Purwokerto, Jember, Malang, Padang, Bengkulu. Setelah RRI, sasaran aksi unjuk rasa di daerah adalah Markas Kodim dan Korem, terkait tindakan brutal aparat dalam menghadapi massa yang menuntut pencabutan Dwifungsi ABRI.¹¹⁰

Sementara aksi di beberapa kota, seperti Padang dan Bengkulu, masih diliputi bentrokan, di Yogyakarta aksi berjalan damai. Beberapa elemen itu adalah mahasiswa Atma Jaya, Komite KPRP, PRD, KAMMI, DPY), Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus (SOPINK), Front Pendidikan Rakyat (FPR), Mahasiswa ISI Yogyakarta, STIE Kerjasama, Gerakan Mahasiswa

¹⁰⁹ *KR*, 14 November 1998.

¹¹⁰ *KR*, 15 November 1998.

Muslim Yogyakarta (GMMY), Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (P3Y), Pusat Studi Massa Kelas Demokrasi (Pusmaked), Dema UGM, dan KMHR. Aksi massa cukup besar dilakukan KAMMI, KPRP, dan mahasiswa ISI Yogyakarta. Saking banyaknya elemen massa yang turun, jalan utama Yogyakarta macet total. KPRP aksi *long march* dari Bundaran UGM dan berhasil “menduduki” halaman kantor Korem 072 di Ngupasan. Di sepanjang jalan, mereka meneriakkan yel-yel anti-ABRI karena dianggap telah membantai rakyat di Jakarta. “Militer musuh rakyat”, teriak mereka. Memasuki Jl. Malioboro, aksi KPRP banyak mendapat respons masyarakat. Setibanya di kantor Korem 072, mereka segera menurunkan bendera menjadi setengah tiang, kemudian meletakkan karangan bunga di beranda kantor, dilanjutkan menggelar mimbar bebas di halaman Korem. Usai aksi di Korem, KPRP melanjutkan *long march* ke Gedung RRI dan meminta pihak RRI menyiarkan tujuh tuntutan.

Sementara itu, Jakarta dilanda amuk massa dan lumpuh total. Tuntutan agar Pangab Jenderal TNI Wiranto mundur dari jabatannya pun mengemuka.¹¹¹ Setelah hajat negara SI MPR menimbulkan 14 korban tewas dan ratusan luka-luka, situasi Jakarta pada pemberitaan *KR* tanggal (16/11) mulai pulih. Namun, gelombang aksi naik lagi pada 16 November, terjadi di berbagai kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Sasaran utama tuntutan para pengunjuk rasa adalah Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto dan Presiden B.J. Habibie agar mundur dari jabatannya.

Di Yogyakarta, mahasiswa kembali turun ke jalan menuntut secepatnya Dwifungsi ABRI dicabut, Wiranto mundur dari jabatannya sebagai Menhankam/Pangab, menolak sebagian hasil SI MPR, serta perlunya dibentuk kepemimpinan nasional lewat

¹¹¹ *KR*, 15 November 1998.



► Mahasiswa menduduki Markas KODIM di Jalan A.M. Sangaji, Jetis, Jogja, November 1998. Sumber: Jawa Pos, November 1998.

presidium. Gelombang aksi mengecam kekerasan aparat kembali berlangsung pada 18 November di Yogyakarta. Aksi dengan tuntutan yang kurang lebih sama itu menduduki stasiun Tugu.¹¹²

Pada Jumat, 19 November 1998, beberapa kelompok mahasiswa mengadakan aksi *rally*. Tak hanya diikuti oleh mahasiswa, tapi juga para pelajar. Mereka masih mengusung isu yang sama dengan hari sebelumnya. Di antara berbagai kelompok tersebut, KPRP, PRD, SOMASSI, dan KMPD Duta Wacana aksi di Bundaran UGM, kemudian melakukan aksi *long march* ke Makodim. Mereka melakukan mimbar bebas, orasi dan menurunkan bendera menjadi setengah tiang di halaman kantor Makodim. Sementara, organ sekawan KPRP lain yaitu AMUKRA melaksanakan ‘Kemah Keprihatinan’ di depan Rektorat UPN Veteran Yogyakarta, 18–23 November 1998.¹¹³ Hingga pengujung November, hari-hari masih disemarakkan aksi-aksi unjuk rasa. Bahkan pada 26 November, tercatat aksi masih diliputi kekerasan.¹¹⁴

¹¹² KR, 18 November 1998.

¹¹³ KR, 20 November 1998.

¹¹⁴ KR, 27 November 1998.



elain aksi-aksi dan diskusi, euforia demokrasi membuat KPRP secara spontan berubah menjadi semacam “posko pengaduan” bagi rakyat yang ingin ikut serta mengulirkan perubahan. Pendampingan, advokasi dan dukungan atas kasus rakyat yang KPRP jalankan dalam interval masa pasca-Soeharto hingga ke pembentukan organ nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), antara lain: Kesatuan Aksi Rakyat Gunungkidul (KARAG); Kesatuan Aksi Rakyat Peduli Indonesia (KARPI)¹¹⁵; Advokasi Pedagang Pasar Tayu Menolak Relokasi; Advokasi Kasus Tanah di Desa Rawaapu; serta aksi solidaritas pembebasan Timor Leste.

Beberapa waktu menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR, kondisi organisasi mulai dapat mengatur langgamnya kembali setelah sebelumnya para anggota KPRP juga disibukkan dengan agenda-agenda solidaritas atas permintaan advokasi-advokasi di sektor rakyat seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Pakem Sleman, Pasar Tayu di Pati, dan Rawa Apu di Cilacap. KPRP sudah siap tempur lagi di hari-hari menjelang SI MPR yang akan dilaksanakan pada 10–13 November 1998. Mereka pun

¹¹⁵ Informasi tentang KARPI minim, dalam buku ini hanya diperoleh penjelasan seperti berikut. Menurut salah satu pendirinya, Ryan Wuryanto, KARPI resmi berdiri pada 8 Maret 1998 di Pakem, di rumah alm. Kakak Ryan yaitu drs. Suparwoto, Msc., rumah itu kemudian menjadi posko KARPI. Selain Ryan, inisiator berdirinya KARPI yaitu Alm. Dodo, Alm. Ibud Sudarmanto, Alm. Sutrisno (kakak Ryan juga), Nuri, Harry, dan Wowo. Program politik organisasinya adalah memberikan edukasi dan pendampingan tentang hak politik maupun ekonomi warga sekitar Sleman, khususnya warga lereng Merapi. Sedangkan agenda kerja terdekat saat itu adalah mencari solusi terbaik untuk penggunaan air Umbul Wadon bagi warga lereng Merapi. Masih menurut Ryan, KARPI merupakan organisasi rakyat yang memiliki garis politik demokratis-kerakyatan, memiliki visi dan misi untuk dapat menjadi wadah bagi warga lereng Merapi bisa mendapatkan hak politik dan ekonomi secara merdeka, berdaulat, dan berkeadilan. KARPI pun menjadi organ sekawan dan berjejaring dengan KPRP karena kesamaannya memperjuangkan hak-hak politik rakyat.

menggelar aksi Kemah Anti Dwi Fungsi ABRI di Bundaran UGM.

Pasca mundurnya Soeharto, beberapa kawan KARAG yang dianggap paling maju tingkat kesadarannya diikutkan dalam kursus politik yang bertempat di Wisma HMI di Ringroad Timur. Beberapa waktu kemudian, sebagian dari mereka dilantik menjadi kader PRD, sebagian lagi kembali aktif kuliah di kampus.¹¹⁶ Aksi rakyat memprotes PDAM di antaranya berisi tuntutan: turunkan tarif dan perbaiki layanan air yang sering tidak mengalir. Ada beberapa kawan dari Yogya yang ikut terlibat membantu mengorganisir aksi tersebut, di antaranya Wondo dan Iwan “UII”. Mereka mengadakan aksi *long march* dari Desa Karangrejek menuju Kantor DPRD. Aksi protes tersebut tidak berhasil mendapatkan apa yang menjadi tuntutan, namun kemudian, desa berhasil membuat dan mengelola Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) mereka sendiri yang masih berjalan sampai sekarang.

Ada dua kasus lurah korup yaitu di Kelurahan Sumber Wungu, Tepus, berakhir lurah berhasil diturunkan. Juga di Kelurahan Grogol, Paliyan, dengan kasus penyewaan tanah kas desa untuk lahan tebu, juga dengan hasil lurah berhasil diturunkan. Aksi menolak kenaikan tarif listrik berupa aksi *longmarch* yang bertitik awal dari Desa Karangrejek menuju gedung DPRD Gunungkidul. Pada waktu itu, pengelolaan dan penagihan listrik dilakukan oleh KUD (Koperasi Unit Desa). Barisan aksi berhenti di depan terminal Baleharjo karena dihadang aparat. Setelah berhasil bernegosiasi, aparat pun memberi jalan. Aksi kemudian dilanjutkan ke depan alun-alun kota Wonosari (titik nol). Setelah beberapa saat orasi, aksi pun diterima di halaman gedung DPRD Gunungkidul. Waktu itu, ketua KUD dipanggil oleh anggota DPRD untuk dihadirkan. Setelah beberapa saat mimbar bebas yang diisi orasi-orasi, Ketua

¹¹⁶ Wawancara via WA dengan Krisna ‘Nana’ Wijayanto, Danang, Aus, Tutik, dan Wondo sepanjang Juni 2023.

KUD Wonosari, yang waktu itu dijabat oleh Setyo Wibowo pun membacakan keputusan tentang penundaan pembayaran listrik selama dua bulan. Selain aksi-aksi tadi, KARAG juga pernah mengadakan dua kali aksi sendiri, di antaranya berlokasi di depan kantor DPRD/Pemda Gunungkidul, bertepatan dengan Hari ABRI, 5 Oktober 1998, dengan tuntutan di antaranya Cabut Dwi Fungsi ABRI, Cabut 5 UU Politik, Habibie Boneka ABRI, Segera bentuk Pemerintahan Sipil Demokratik. Kemudian, aksi dilanjutkan dengan *long march* dari Alun-alun Pemda ke terminal.

Advokasi Pedagang Pasar Tayu Menolak Relokasi¹¹⁷



asus ini berawal dari rencana Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang hendak memindah lokasi Pasar Tayu. Meski proses pembangunan pasar sudah separuh jalan, tapi para pedagang Pasar Tayu emoh dipindah. Mereka beralasan lokasi pasar baru rawan banjir. Terlebih saat itu ekonomi sedang krisis, sehingga para pedagang pasar kesulitan membayar kios baru. Belum lagi masa adaptasi yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sayang, suara pedagang ini dimentahkan. Sejak para pedagang pasar mulai kasak-kusuk pada awal 1997 hingga berani terang-terangan protes, Pemkab juga tak kunjung merespons. Padahal, usaha penolakan melalui jalur hukum pun sudah coba ditempuh –melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pati, kemudian PBHI. Pada akhirnya, mereka tetap dipaksa pindah dan membayar uang sewa kios.

Lantas para pedagang lain, seperti Pak Sungkono, Pak Junaidi, Pak Hartono, Pak Zaenufi, dan Pak Edris Muhdi (ayah Syukri),

¹¹⁷ Disusun berdasarkan kesaksian Achmad Syukri, anak pedagang Pasar Tayu, kemudian diramu dengan informasi-informasi tambahan dari beberapa narasumber lain di antaranya Gati Andoko, Pengadilan Siregar, Fendry, Toni, Ibnu, Asisi, Entri, Nur “Sobleh”, Akuat, dan lain-lain.

juga menambah tenaga penolakan agar Pasar Tayu tidak jadi direlokasi. Para pedagang pernah melakukan mediasi dengan pihak Pemkab, tetapi tidak mencapai titik temu. Atas saran Bapak Edris Muhdi, Syukri diusulkan mencari dukungan dan advokasi dari para mahasiswa di Yogyakarta. Dan berangkatlah Syukri. Pada 10 Juli 1998, Syukri tiba di Yogyakarta. Ia lantas sambang ke indekos kawan SMA-nya, Akuat, tapi tidak ketemu sedang melawat ke Denver, Amerika Serikat. Untungnya, teman kost Akuat, Toni, mengajaknya ke sekretariat KPRP. Mereka pun disambut baik oleh sekjen KPRP saat itu, Fendry. Syukri pun menceritakan maksud dan tujuannya di hadapan kawan-kawan KPRP, antara lain Fendry, Moty, John, Wibowo “Jemek” Arief, dan lain-lain. Malam itu juga, mereka langsung berkoordinasi dan memutuskan bahwa keesokan hari sudah harus berangkat menuju Tayu.

Keesokan hari, KPRP berangkat ke Tayu —Fendry, Iwan “UII”, John, Entri, Toni, dan Sabinus Moa. Dengan bus, mereka sampai di Tayu malam hari. Tak menunggu lama, mereka pun langsung menginventarisir pokok masalah. Pagi harinya, mereka menemui pedagang sembari mencari data yang diperlukan. Mereka mendirikan posko di rumah orang tua Syukri, Bapak Muhdi, di Tayu Wetan. Menurut Toni, ia kembali ke Yogyakarta dua hari kemudian untuk berkoordinasi terkait kondisi di Tayu. Ada dua hal penting yang dilaporkan: *pertama*, masih banyak pedagang yang takut melakukan perlawanan; *kedua*, mulai ada intimidasi kepada beberapa pedagang, khususnya ayah Syukri. Selain laporan langsung seperti dilakukan Toni, menurut Syukri, koordinasi dengan kawan-kawan di Yogyakarta juga dilakukan setiap sore melalui telepon.

Esoknya, enam orang kawan berangkat lagi ke Tayu. Selang dua hari, sekitar delapan kawan Yogya, yaitu Danang cs, bermotor menuju Tayu. Besoknya, Toni dan Sobleh naik bus dan dijemput kawan-kawan di Jembatan Tayu. Mereka juga sempat mampir ke salah satu kampus di Pati untuk berkoordinasi menggalang

dukungan kawan-kawan di sana. Selang beberapa hari, Toni kembali pulang ke Yogya karena ada keperluan. Tiga hari kemudian baru berangkat lagi dengan kawan dari Surabaya. Selama di Pati, mereka dibagi dalam beberapa tim kecil untuk “silaturahmi” ke rumah beberapa pedagang. Mereka membicarakan soal pendampingan rencana aksi ke kantor bupati. Mereka menyiapkan rencana aksi sambil berusaha terus menaikkan mental para pedagang. Mental para pedagang pun makin naik dengan kedatangan kawan-kawan KPRP —Moty, Mbah Gati, alm. Gadjol, Pangadilan Siregar, Hendro “Tuhan”, Asisi, Puthut, Jemek, Chepie, Samsul, Joko, Fauzan, dan lain-lain. Setelah beberapa waktu, posko mereka pun sempat pindah di Tayu Kulon, rumah milik Mas Yono, pedagang kaset di Pasar Tayu.

Para pedagang pasar didampingi kawan-kawan KPRP melakukan aksi ke Kantor Bupati Pati dengan menaiki truk dan motor. Para pedagang dan kawan-kawan KPRP pun silih berganti berorasi: Bapak Edris Muhdi, Bapak Junaidi, Fendry, Puthut, dan Moty. Mengutip Gati Andoko, dialog yang terjadi berlangsung sangat alot antara warga dengan jajaran pemda yang dipimpin langsung oleh Bupati, Yusuf Mohammad. Tak ada kesepakatan. Asumsi dan alibi yang diajukan para pedagang memang sangat lemah, hanya sebatas “menolak” tanpa alasan “canggih”. Rombongan demonstran pun balik ke Tayu. Sebagian mahasiswa, tinggal di Tayu menyusun strategi untuk tindak lanjut berikutnya, agar tak sekedar *waton nolak* tanpa alasan kuat.

Demi menyusun alasan yang lebih kuat, masih mengutip Gati Andoko, terstruktur dan sistematis, dilakukan observasi partisipatoris, menelusuri kepustakaan dari masa pra sejarah, sejarah Babad Pati, hingga persoalan kontekstual —termasuk di dalamnya analisis dampak lingkungan (AMDAL). Data mencakup tentang sejarah Pasar Tayu, efek negatif ke para pedagang (baik ekonomi maupun sosial) jika pasar dipindah, lingkungan ekologi pasar

baru yang kurang tepat, serta tinjauan dari segi hukum terkait pelaksana proyek pembangunan terkumpul setelah hampir dua pekan. Solusi terbaik untuk menampung aktivitas pasar yang semakin banyak (penjual dan pembeli) bukan relokasi, melainkan renovasi. Berbekal asumsi ini, belasan kali mereka masih berdemonstrasi ke kantor kabupaten, bahkan sampai kantor DPRD I di Semarang, juga ke Kantor Pengadilan Tinggi Negeri, baik di Pati maupun Semarang. Aksi-aksi memang diputuskan untuk disederhanakan hanya diikuti belasan orang agar praktis juga untuk menghindari gegap-gempita yang rawan tindakan vandalis. Aksi besar hanya dipakai sebagai senjata pamungkas.

Audiensi dengan bupati dan pemda berlanjut hasilnya segera diadakan jajak pendapat. Sebelum diadakan jajak pendapat para pedagang terdampak dukungan didapat di antaranya dari Fraksi PPP dan para kyai. Isi jajak pendapat hanya berisi dua opsi: setuju dan tidak setuju relokasi. Hasilnya hampir seluruh pemilih tidak setuju relokasi. Mereka menang telak. Kasus seharusnya selesai awal September setelah jajak pendapat pada akhir Agustus dimenangkan para pedagang sekaligus pengembalian uang kios yang terlanjur sudah disetor. Namun dalam prosesnya, ternyata masih harus dikawal. Satu minggu setelah kawan-kawan KPRP kembali ke Yogyakarta, Pemkab Pati dan investor mengadakan “aksi tandingan”. Hal ini membuat panik para pedagang. Syukri pun diminta datang lagi ke Yogyakarta. Dari diskusi dengan Fendry, akhirnya KPRP menugaskan dua orang kawan yaitu Gati ditemani Nur “Sobleh” —kelak ditambah Ibnu dan Agung— untuk bertugas non-permanen ke Tayu. Mereka diminta mengawasi proses kasus relokasi ini hingga tuntas.



aat itu, salah satu yang datang ke posko pengaduan KPRP adalah seorang mahasiswa IKIP (sekarang UNY). Katanya, di desanya telah terjadi kasus sengketa tanah antara warga melawan pemerintah daerah. Ia minta tolong agar KPRP datang ke desanya untuk melihat dan membantu warga, memberikan semacam petunjuk bagaimana semestinya masalah itu diselesaikan”, demikian Agung “Cungkring” Prihatono (Akindo, 1996) mengawali kisahnya. Hal itu dikonfirmasi Awang Trisnamurti (Serikat Tani Nasional/STN). Mahasiswa IKIP sekaligus aktivis PMII itu bernama Yossy Suparyo. Dalam aksi sebelumnya, warga telah membakar balai desa.

Dipandu Yossy, Agung dan Anto ‘Profesor’ (Sanata Dharma) berangkat ke Rawaapu untuk melakukan survei dan membuat asesmen awal. Rawaapu terletak di lembah sungai Citanduy, berseberangan dengan Tasikmalaya. Warga desa kala itu berbahasa campuran, Ngapak dan Sunda, yang membuat Agung dan Anto kesulitan berkomunikasi. Yossy dan sang ibu menjadi penerjemah bagi mereka. Pada kunjungan pertama, mereka beranjangsana ke rumah beberapa warga. Menurut catatan sejarah, desa itu dulu masuk ke dalam wilayah yang disebut “wedhi kengser”¹¹⁹, yaitu wilayah yang memang tak boleh dimiliki oleh perseorangan, sehingga seluruh warga desa tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Telah berpuluh-puluh tahun warga desa berjuang untuk memperoleh hak atas tanah, tapi tak pernah

¹¹⁸ Wawancara via WA dengan Agung “Cungkring”, Dewi dan Awang sepanjang Juni 2023. Diperkuat dengan data dari berbagai sumber. Terima kasih kepada Juni Prayudi yang juga telah memberikan keterangan tambahan tentang wilayah Rawaapu.

¹¹⁹ *Wedhi kengser* adalah hasil endapan pasir dan tanah di pinggir sungai yang sudah berlangsung berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun sehingga menghasilkan daratan baru. Bisa juga terjadi karena upaya manusia dengan cara melongsorkan tanah terus menerus di pinggir sungai sehingga menjadi daratan baru.

berhasil. Akhirnya momentum 1998 mereka gunakan untuk unjuk kekuatan dengan membakar balai desa dan menuntut hak atas tanah.

Setelah dua hari menginap di Rawaapu, mereka kembali ke Yogyakarta sembari membawa data amatan awal. Setelah bermusyawarah, KPRP memutuskan untuk berangkat lagi ke sana dan memberikan semacam “pendidikan politik” ke warga desa tentang bagaimana semestinya mengatasi sengketa tanah tersebut. Pada keberangkatan kedua, Agung ditemani Dewi Ayu Pratiwi (UGM), Fathoni (UGM) dan Awang (STN) –aktivis yang berkapasitas dalam isu sengketa lahan. Pada kunjungan selanjutnya, siang hari sebelum pertemuan dengan warga pada malam hari, Agung harus membeli beberapa lembar kertas karton dan spidol untuk keperluan pertemuan dengan warga. Agung ditemani ibu Yossy, menggunakan perahu kecil menyeberangi sungai Citanduy untuk membeli beberapa lembar kertas karton dan spidol di desa seberang. Malam harinya, diselenggarakan pertemuan besar dengan warga desa di halaman rumah Yossy yang cukup luas. Di acara rembug warga tersebut, Awang berperan sebagai “mentor”. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana semestinya kasus itu diselesaikan warga. Keesokan hari, warga desa bersepakat menggeruduk kantor kecamatan, menyampaikan tuntutan. Saat itulah, terjadi kesepakatan bahwa akan ada tindak lanjut dari pihak kecamatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Setelah itu, kawan dari Yogyakarta masih beberapa kali datang ke Rawaapu untuk memantau dan mendampingi, salah satunya Awang. Sekian waktu berlalu, Yossy datang lagi ke KPRP dan memberi kabar bahwa persoalan di desanya telah selesai dengan baik. Rakyat mendapatkan hak atas tanah seiring dengan keluarnya surat keputusan bupati yang kemudian dilegalkan oleh kantor pertanahan dengan menerbitkan sertifikat hak milik.

Yossy pun menyampaikan titipan ucapan terima kasih dari warga desa karena sudah membantu mereka kala itu.

Referendum bagi Rakyat Timor Leste

 ilm bertajuk *12 Junho 1998* (12 Juni 1998) menyajikan cukup banyak data. Wawancara dengan narasumber Mariano “Assanami” memberikan pemahaman pada kita tentang latar munculnya tuntutan sentral: Referendum bagi Rakyat Timor Leste dan rasionalisasinya, juga taktik-strategi “gerilya” para pemuda-pelajar Timor Leste untuk terus mempropagandakan program tuntutan mereka “di kandang macan”. Impettu adalah organ yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, tapi, dengan taktik-strategi penyusupan, organ ini justru bermanfaat bagi usaha perjuangan kemerdekaan, alih-alih menjadi “alat kooptasi” rezim Orde Baru untuk mengendalikan pemuda-pelajar Timor Timur.

Di sisi lain, tuntutan Referendum bagi Rakyat Timor Leste adalah konsekuensi logis dari program demokratisasi di Indonesia. Ketika para aktivis di Indonesia memperjuangkan demokratisasi, maka omong kosong belaka jika hak penentuan nasib sendiri Rakyat Timor Leste tidak masuk menjadi salah satu programnya. Maka, di situlah bertemu dua kepentingan yang berbeda – demokratisasi di Indonesia dan kemerdekaan bagi Rakyat Timor Leste— menghadapi musuh yang sama, rezim Orde Baru.

Maka itu, pada 12 Juni 1998, di depan gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta, para aktivis pro-kemerdekaan Timor Leste mengadakan aksi besar “penghabisan” untuk mendesak tuntutan diadakannya referendum bagi Rakyat Maubere (Timor Leste). Aksi itu diadakan setelah Presiden B.J. Habibie menawarkan otonomi Timor Timur dan masih menjadi bagian Indonesia pada Juni. Ia mengesampingkan opsi kemerdekaan penuh bagi

rakyat Maubere. Aksi ini diorganisir pemuda-pelajar Leste, didukung beberapa organisasi lain non-Leste (Indonesia) —di antaranya Keluarga Besar Universitas Indonesia (KB-UI). Aksi “penghabisan” ini membuat para mahasiswa Timor Leste peserta aksi dari Yogyakarta bersiap jika kemudian tidak berkesempatan lagi kembali ke Yogyakarta. Mereka sudah berkemas andai kemudian harus pulang ke tanah air mereka. Kawan-kawan Timor Leste saat itu sudah bersiap “habis-habisan”. Siap menghadapi kemungkinan terburuk, banyak dari mereka yang sudah menjual barang-barangnya karena berpikir bahwa kemungkinan besar mereka harus pulang ke Leste.¹²⁰

Ada tiga perwakilan KPRP Yogyakarta yang berangkat ke Jakarta: Hendro “Tuhan”, Dhyta Caturani, dan Simeon. Setibanya di Jakarta, mereka singgah di UI. Aura represif begitu terasa. Ribuan massa aksi dikelilingi aparat dengan rapat dari berbagai kesatuan ABRI. Kata seorang wakil mahasiswa Timor Leste yang ikut dalam aksi, barisan aparat berjaga bersenjata lengkap seperti hari itu sudah biasa bagi mereka. Hendro lantas berorasi mewakili KPRP, menyampaikan pesan Solidaritas dan membacakan pernyataan dukungan. Tindak represif mengiringi pembubaran aksi. Banyak yang kena gebuk hingga bonyok, meski aparat juga tidak berani habis-habisan. Tampaknya tindakan represif berlebihan akan semakin menyulitkan negara menghadapi tekanan luar negeri. Banyak yang ditangkap saat itu, termasuk perwakilan KPRP. Mereka lantas dibawa ke tempat tahanan ke Kebon Jeruk, Jakarta Barat, di sebuah panti asuhan. Namun, di dalam bangunan itu terdapat ruang-ruang menyerupai penjara dan sel tahanan. Mereka tak lama ditahan di Kebon Jeruk, lantas semuanya dipindahkan ke Bumi Perkemahan Cibubur. Keesokan hari, mereka baru bebas. Mereka kemudian kembali ke KB-UI. Di KB-UI itu, mereka sempat

bertemu anak Mario Viegas Carrascalao¹²¹ dan sepupunya, anak dari Manuel Carrascalao, tapi mereka tidak ikut aksi. Menurut Virgilio Guterres¹²², aktivis Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste (Renetil), komite penyelenggara aksi ini bernama Front Nasional Pemuda dan Pelajar Timor-Leste (Fronpettil).

Masih di tahun yang sama, 7–8 Desember 1998, sebuah aksi masih dengan tuntutan yang sama, referendum bagi Rakyat Timor Leste, kembali digelar. Kali ini berlokasi di depan Gedung PBB. Para aktivis KPRP kembali bersolidaritas dengan ikut berangkat ke Jakarta memperkuat barisan aksi. KPRP kali ini tidak hanya memberangkatkan tiga wakil, tapi cukup banyak kawan, di antaranya Rahung “Coki” Nasution, Tony “Cikru” Heru Sudigdo, Agung “Cungkring” Prihatono, Krisna “Nana” Wijayanto, Bakti Handoko Dewanto, dan lain-lain. Kebijakan B.J. Habibie atas Timor Timur dengan melaksanakan referendum ditawarkan pada 27 Januari 1999 dengan dua pilihan yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri. Kemudian, jajak pendapat dilaksanakan Pemerintah Habibie pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations Mission for East Timor (UNAMET). Hasil referendum kemudian diumumkan di New York dan Dilli pada 4 September 1999. Hasilnya, hampir lebih dari separuh penduduk Timor Timur menginginkan merdeka. Dengan hasil tersebut, MPR RI dalam SI 1999 mencabut Tap

¹²¹ Mario Viegas Carrascalao pernah menjabat sebagai Gubernur Timor Timur selama dua periode yaitu tahun 1982-1992. Kemudian menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rumania tahun 1992-1997. Itulah mengapa anak dan keponakannya tidak ikut di aksi 12 Juni 1998 tersebut. Dan ketika Timor Leste merdeka, ia menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri Timor Leste di bawah Perdana Menteri Xanana Gusmao.

¹²² Pada 1998, Virgilio Silva Guterres menjabat sebagai Presidente Comité Permanente (Ketua Komite Permanente) di Renetil sekaligus jurnalis *Si@ar News* (media siber bawah tanah yang dikelola Grup Blok M), juga adalah Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan *Talitakum* (Bangkitlah) diterbitkan oleh mahasiswa pro-kemerdekaan Timor Leste. Pada 2016–2022, menjabat sebagai Presidente Conselho de Imprensa de Timor Leste (Ketua Dewan Pers Timor Leste). Pada 2023–2027: Provedor de Direitos Humanos e Justiça de Timor Leste (Ketua Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Timor Leste)

MPR No. VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Sejak itu, Timor Timur lepas dari Indonesia dan diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002.



► Proses penggantian foto Soeharto dan Habibie.
Sumber: Kedaulatan Rakyat, Mei 1998



BAGI KPRP,
SOEHARTO ADALAH
“SIMBOL SISTEM”
YANG DESPOTIK.
TANPA PERUBAHAN
MENDASAR, JARINGAN
ORDE BARU BERPOTENSI
BANGKIT LAGI DI
KEMUDIAN HARI.

Satu Bumi MERAH

Dari KPRP
menuju LMND

*Jangan Datar
npai Sang Turan menyerah!*

158



MERAH

Merakit Sejarah



Pemilu Habibie Sudah Curang :
Pemerintahan Transisi Jawab





elang setahun sejak Soeharto mundur, gerakan pro-demokrasi merasa perlu mengadakan penilaian kembali atas kondisi politik nasional. Organisasi gerakan ini mengadakan semacam “evaluasi” terhadap situasi internal gerakan. Pada akhir 1998, beberapa organ gerakan yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia bersepakat bersatu dan membentuk front tingkat nasional bernama Front Nasional Reformasi Total (FNRT). Inisiator dari gerakan ini, antara lain, Solidaritas Mahasiswa Sumatera Utara (SOMASU); Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Rakyat Lampung (KMPPRL); Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) dan Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Jakarta; Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP) - Bandung; Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Yogyakarta; dan Dewan Mahasiswa dan Rakyat Surakarta (DRMS), Solo. Organ-organ pembentuk FNRT ini adalah organ-organ yang ikut berperan dalam gerakan yang berpuncak pada mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Bersama berbagai organ lain seperti Forum Kota (FORKOT), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), FNRT bersepakat untuk mengadakan Rembug Nasional Mahasiswa Indonesia (RNMI) I di Denpasar, Bali. RNMI I kemudian dilanjutkan dalam RNMI II yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, FNRT sudah berubah nama menjadi Front Mahasiswa untuk Demokrasi (FONDASI). Namun, pertemuan RNMI II tidak berhasil menyatukan sikap terhadap agenda Pemilu 1999. Di sisi lain, penyikapan terhadap Pemilu 1999 dipandang sebagai hal mendesak saat itu. Maka, sebagian peserta RNMI II yang punya kesamaan visi terkait hal itu berinisiatif mengadakan pertemuan lanjutan. Dipilihlah kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat pada 9–11 Juli 1999.

Pertemuan ternyata berkembang menjadi sebuah kongres. Dalam kongres inilah, terbentuk sebuah organisasi baru bernama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).¹²³

Struktur tertinggi organisasi adalah kongres, dan di bawahnya berbentuk presidium. Saat itu, forum mempercayakan jabatan ketua presidium kepada Puthut Eko Aryanto, dan Iwan Dwi Laksono sebagai sekretaris. Dalam kegiatan sehari-hari, organisasi dijalankan oleh eksekutif nasional, dengan struktur sebagai berikut: Mohammad Sofyan (ketua umum); Sinnal Blegur (sekjen); Aprisaldi (kemudian diganti Simon—depan pertimbangan organisasi); DPP dipimpin Roy Septa Abimanyu; DHI oleh Rheinhard Sirait dan DDU oleh Jawa (kemudian diganti Indy Wantah).

Mau tak mau harus diakui, KPRP begitu mewarnai proses terbentuknya LMND dalam kongres pertama. Dalam kongres itu pula, terbitan *MERAH*—akronim Merakit Sejarah—ditetapkan sebagai organ resmi LMND. Sebelumnya, terbitan KPRP yang sudah tiga kali terbit itu, telah dipakai pula sebagai terbitan resmi FONDASI. Beberapa waktu kemudian, LMND berhasil menerbitkan organ resminya bernama *SUPEL* (Suara Pelopor).

¹²³ Kongres I LMND dihadiri organ-organ gerakan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia, yaitu Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SMUR), Aceh; Dewan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (DEMA-UMSU), Medan; Serikat Mahasiswa Palembang untuk Demokrasi (SMPD), Palembang; Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Rakyat Lampung (KMPPRL), Lampung; Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD), Jakarta; Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat Universitas Bung Karno (AMBR-UBK), Jakarta; Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Depok; Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP), Bandung; Komite Aksi Pemuda dan Rakyat Indonesia (KAPRI), Purwokerto; Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS), Semarang; Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Yogya; Dewan Mahasiswa dan Rakyat Surakarta (DRMS), Solo; Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR-UNS), Solo; Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Air (SMPTA-UMS), Solo; Aksi Bersama Rakyat Indonesia (ABRI), Surabaya; Komite Mahasiswa Malang (KMM), Malang; Komite Perjuangan untuk Reformasi Total (KPRT), Jember; Serikat Mahasiswa Makassar (SMM), Makassar; Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST), Sulawesi Tengah; Front Aksi Reformasi Total (Fair Total), Mataram, NTB; Brigade Mahasiswa untuk Pembebasan Rakyat (BAMPER), Bali; dan Front Mahasiswa Manado (FMM), Sulawesi Utara.

Demikian pula dalam kelengkapan organisasi lain seperti logo dan bendera. Sesi sidang yang cukup alot berakhir dimenangkan “kubu Yogya–Surabaya” yang mengusulkan bendera hitam berlogo mirip sekali dengan logo KPRP, yaitu gambar tangan kiri mengepal, buku, serta bintang berwarna kuning. Mereka menang atas “kubu Jakarta-Bandung” yang mengusulkan bendera warna merah. Demikian juga ketentuan soal sekretariat organisasi. Lazimnya, sekretariat organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara, Jakarta. Namun ini berbeda, sekretariat Presidium Nasional LMND berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan sekretariat Eksekutif Nasional LMND berkedudukan di Jakarta.

Kata “liga” mencerminkan konsep awal organisasi yang disepakati dalam Kongres I. Organisasi tipe “liga” bertujuan menyatukan komite-komite tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam hal ini, organ atau komite pembentuk LMND tetap dengan baju masing-masing seperti KMPPRL, KOMRAD, KPRP, DRMS, ABRI, dan lain lain, tapi secara programatik disatukan lewat liga.

Konsep “liga” ini didasarkan atas kebutuhan penyatuan program, tapi tanpa harus kehilangan identitas. Namun bukan pula berbentuk front. Konsep liga saat itu dipandang lebih maju dari front. Namun dalam praktiknya, secara teknis, konsep tersebut ternyata sulit diimplementasikan. Konsep organisasi kemudian berubah secara resmi dalam Kongres II di Lembang, Jawa Barat pada 2000, di mana seluruh organ kota yang tergabung dalam organ nasional ini kemudian melebur menjadi satu dengan nama tunggal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Di masing-masing kota, organ yang bergabung kemudian memakai nama yang sama, LMND, hanya ditambah embel-embel nama kota masing-masing sebagai keterangan cabang. Struktur Presidium Nasional berubah menjadi Dewan Nasional, dan warna dasar bendera berubah dari hitam menjadi

merah. Dalam kongres II ini, bertambah pula jumlah perwakilan kota, di antaranya masuk organ bernama Gerakan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (GAMRUD) dari Garut, Gerakan Mahasiswa (GEMA)-UNIKA Soegijapranata, Semarang, dan organ dari STT Telkom Bandung. Kepengurusan periode II LMND dipimpin oleh ketua umum Reinhard Sirait, dan Simon sebagai sekretaris jenderal. Seiring dengan berubahnya konsep organisasi dalam Kongres II LMND ini, maka keberadaan KPRP pun melenyap.

Kita adalah Generasi yang Beruntung Punya “Cerita”

Haris Rusli Moti

164

**KOMITE KEPRIHATINAN MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
(KOKAM-UGM)**

Kepada yang terhormat,
Kawan:

di Yogyakarta

Salam Demokrasi!!!

Salam sejahtera semoga Tuhan Selalu menyertai kawan-kawan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Untuk membicarakan lebih lanjut tentang persiapan *AKSI MIMBAR BEBAS* yang direncanakan dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 November 1996, maka kami sangat mengharap kesediaan kawan-kawan untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal: Sabtu, 16 November 1996

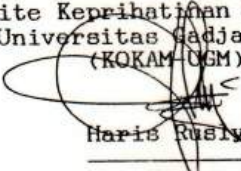
Jam: 14.00 WIB - selesai

Tempat: Sekretarian SEMA Fak. Filsafat UGM

Demikian harapan kami, atas kehadiran kawan-kawan diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 November 1996

Komite Keprihatinan Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada
(KOKAM-UGM)


Haris Rusly

Koordinator



uku Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP): *Mendongkel Kursi Sang Tiran* ini mencoba melakukan *story mining* (penambangan cerita) dengan mengekstrak cerita, informasi dan data dari berbagai sumber untuk mengungkap peristiwa jelang Reformasi, 27 tahun silam dalam konteks Yogyakarta. Begitu banyak memori saat itu terpendam di alam bawah sadar. Menurut sejumlah teori, alam bawah sadar mengendalikan sekitar 88 hingga 95 persen dari kehidupan manusia, sisanya alam kesadaran. Jadi, paling tidak, cerita tentang gerakan politik 1998 itu telah tersimpan di alam bawah sadar yang turut membentuk kepribadian, cara berpikir dan cara bertindak kami.

Yang dimaksud “cerita” di sini adalah peristiwa yang berdampak luas dan memengaruhi kehidupan banyak orang. Gerakan politik mahasiswa 1998 dapat dikatakan sebagai sebuah “cerita”, karena peristiwa itu berdampak luas mengubah tatanan otoritarian menuju pemerintahan yang liberal-demokratis. Gerakan mahasiswa 1998 adalah sebuah cerita pertarungan dan keberanian menghadapi risiko menghadapi rezim Soeharto yang kokoh berdiri selama 32 tahun.

Sebagai sebuah rezim, Orde Baru itu relatif relatif kuat dan terkendali. Namun, karena rezim ini bertumpu pada sosok Soeharto, maka ketika ia mulai melemah dimakan usia, otomatis turut melumpuhkan sistem yang menopangnya. Bisa dibayangkan, jika Orde Baru yang kuat itu tidak bertumpu pada satu sosok, tapi ditopang oleh sistem sirkulasi kepemimpinan nasional yang teratur, maka peristiwa runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998 belum tentu terjadi.

Sebetulnya pada 1996 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM telah menempuh jalan moderat dengan menyampaikan

usulan ke MPR-RI agar Soeharto diberhentikan secara konstitusional tanpa huru-hara. Ketika itu mereka mengusulkan agar MPR mengamandemen salah satu pasal di dalam UUD 1945, terutama yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden cukup dua periode saja. Dengan begitu, diharapkan pada Sidang Umum MPR 1998, Soeharto diberhentikan secara konstitusional. Andai usul ini diterima, tidak akan ada gerakan politik yang melahirkan Reformasi saat ini.

Padahal, jika ditelusuri banyak rezim otoritarian di dunia bertahan lama, karena tidak mempersonifikasi ke satu sosok semata. Walaupun sistem pemerintahannya otoriter, seperti RRC, tapi rezim ini bertahan hingga kini karena sirkulasi pergantian pemimpin nasional dilakukan secara berkala sesuai aturan. Dengan begitu, pergantian presiden dengan cara paksa, seperti melalui kudeta militer atau revolusi, bisa dihindari.

Di sisi lain, saat gerakan mahasiswa 1998 mulai mekar, berbarengan dengan momentum situasi rezim Soeharto yang sudah mulai uzur. Maka, gerakan ini tidak butuh waktu panjang untuk menumbangkan rezim —tak lebih dari dua tahun, dimulai pada pertengahan 1996 pasca-Kudatuli hingga Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Ketika meledak krisis moneter akhir 1997 bangunan rezim Orde Baru juga tampak mulai goyah. Memasuki awal 1998, keretakan di dalam tubuh rezim Orde Baru kian jelas. Situasi rezim ini mulai pincang ketika sejumlah menteri loyalisnya menyatakan enggan bergabung dengan kabinet kompromis yang dibentuk Soeharto.

Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 gerakan politik mahasiswa secara nasional —PRD, SMID dan organ jejaringnya— mengalami perlambatan. Banyak dari mereka dibui dan

dihilangkan paksa. Sebagian besar yang masih bebas memilih mengubah pola gerakan menjadi klandestin. Markas gerakan yang biasanya terbuka untuk umum diubah menjadi *safe house* yang sangat rahasia dan tertutup. Demikian juga sistem koordinasi organisasinya juga dijalankan dengan cara-cara yang tertutup dan rahasia melalui kurir. Situasi represif telah menyulitkan konsolidasi membentuk organisasi yang terkomando secara struktural di tingkat nasional hingga daerah. Namun, perlambatan itu tidak pasif, lambat laun situasinya justru seperti bara yang menyala tanpa henti. Persis seperti memadamkan kebakaran di lahan gambut: terlihat tanpa nyala api, tetapi bara menjalar di bawah permukaan. Lebih meluas, membara, tidak kasatmata, tetapi amat berbahaya.

Dalam situasi kekosongan aktor di panggung gerakan politik perlawanan tersebut, lahirlah generasi gerakan mahasiswa 1998. Semuanya mengalir, berproses secara dialektik dan menemukan momentum politiknya sendiri. Generasi ini kemudian tampil ke permukaan sebagai “line up” utama yang mengisi kekosongan gerakan perlawanan. Kemunculan *line up* generasi “baru” gerakan mahasiswa sebetulnya adalah respons terhadap situasi nasional yang terjadi di banyak kota besar –Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, Lampung, Medan, Aceh, Makasar, Palu, Kendari, Manado, dll.

Munculnya komite-komite aksi semi-permanen di berbagai kota dan di kampus-kampus tidak diperkirakan sebelumnya. Komite aksi semi-permanen yang terbentuk di berbagai kota itu tidak mempunyai hubungan struktural yang terkomando secara nasional, juga tanpa organisasi payung. Ketika itu gerakan mahasiswa dibangun, disatukan dan dikomandoi oleh “situasi”. Namun, kami juga tidak

menampik bahwa dalam membangun gerakan politik, generasi gerakan mahasiswa 1998 bukan hanya diuntungkan oleh keadaan. Ada pula yang lain: syarat kematangan ideologi, teori serta keberanian yang kadang melampaui (*beyond*) batas banyak orang di zaman itu.

Jalan dari cerita gerakan Reformasi tersebut mengalami percepatan ketika radikalisasi gerakan dilakukan dengan mengambil metode aksi bentrok dengan aparat yang ditugaskan mengamankan aksi massa. Untuk pertama kalinya terjadi bentrokan terbuka pada saat deklarasi Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) di Bundaran UGM pada 2 April 1998. Ibarat tinta yang diteteskan di atas kain putih, peristiwa di Bundaran UGM itu kemudian menjalar menjadi metode aksi yang dipakai di berbagai kota dan kampus, hingga Soeharto mundur.

Kini, 27 tahun reformasi telah berlalu. Demokratisasi politik telah terjadi ditandai pemilihan Presiden dan Pilkada langsung, kemerdekaan pers dijamin hingga kemerdekaan berserikat dan membentuk partai politik. Namun, agenda demokratisasi ekonomi dan pemerataan pembangunan masih terpasung. Sumber sumber kekayaan negara masih dikuasai segelintir orang. Kita harus melangkah kembali mengakselerasi demokratisasi ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Lini Masa KPRP

- 23 Februari —9 Maret – Aksi Tenda Keprihatinan dan Mogok Makan di Fakultas Filsafat UGM.
- 11 Maret— Di UGM, Patung Soeharto dibakar dalam aksi massa.
- 23 Maret — 1 April – Pentas Mendobrak Budaya Bisu berlangsung oleh KPRP
- 2 April – Aksi di Bundaran UGM, sekaligus deklarasi KPRP. Aksi berujung bentrok pertama di Yogyakarta.
- 23–25 April – Aksi panggung KPRP berlangsung.
- 5–6 Mei – Pecah aksi massa di Gejayan, dikenal sebagai Gejayan I.
- 8–9 Mei – Aksi massa kembali pecah di Gejayan, dikenal sebagai Gejayan II.
- 13 Mei – Demonstrasi dengan jumlah massa terbesar KPRP.
- 21 Mei 1998 – Soeharto mundur dari kursi presiden, Habibie menggantikannya.
- 4 November 1998 – Usai SI MPR – Aksi Kemah Anti-Dwifungsi ABRI di Bundaran UGM.
- 9–11 Juli 1999 – KPRP bersama organisasi lain membentuk LMND.

Sumber:

Dokumen

- Presensi pertemuan PPD
- Selebaran dan undangan diskusi, 1997
- Selebaran dan undangan diskusi di UGM, 1997
- Selebaran aksi (koleksi Asisi)
- Undangan rapat KPRP pada 27 Maret 1998
- Kronologi Aksi Rakyat 13 Mei 1998

Surat Kabar:

- *Bernas*, 3 Mei 1998.
- *Kedaulatan Rakyat*, 6 November 1998–27 November 1998
- *Kompas*, 9 November 1998
- *Jawa Pos*, 6, 8, 9-10, 14, 21-22 Mei 1998
- *Solo Pos*, 3 April 1998

Terbitan:

Angga Apip W.S. 2012. “Peranan Mahasiswa Yogyakarta dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia”, *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

- Cintya Faliana dan Sanya Dinda, 2018 “Mahasiswa di Balik Terali Besi” digitalisasi dari arsip *Majalah BALAIRUNG* No. 17/TH. VII/1993, dalam www.balairungpress.com/2018/05/mahasiswa-di-balik-terali-besi/.
- Didik Supriyanto. 1998. *Perlawanan Pers Mahasiswa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- F.X. Rudy Gunawan dkk. 2009. *Menyulut Laban Kering Perlawanan*, Jakarta: Spasi & VHR Book.
- H.S. Lilik, Tirto.id. 23 Mei 2020. “Kematian Gilang: Pengamen dari Solo Dibunuh karena Melawan Soeharto”, <http://tirto.id/kematian-gilang-karena-melawan-soeharto-fBTh>
- Kahin, Audrey dan Cribb, Robert. 2012. *Kamus Sejarah Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, Dhianita Kusuma Pertiwi.
2021. *Mengenal Orde Baru*. Yogyakarta: EA Books.
- Muridan S. Widjojo, dkk. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Naldo Rei. 2017. *Timor Timur: Sebuah Memoar*. Yogyakarta: Circa, hal. 56–57
- Octo Lampito, dkk. 1998. *Lengser Keprabon*. Yogyakarta: P.T. Grafika Wangsa Bakti.
- Pratikno, 1996, “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokrasi” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, JSP, Vol. 2, No. 2, November 1998, <https://media.neliti.com/media/publications/37587-none-e49fe060.pdf>

Sumber Wawancara:

- Wijaya Harjanata
- Roni Hasan
- Antariksa
- Wahyu Adi Prabowo
- Haris Rusly Moti, Ketua KPRP, 5 April 2025
- Fendry Ponomban, Mantan Sekjen KPRP, 5 April 2025
- Irmawati, Bendahara KPRP, 5 April 2025
- Nurhadi, Sekum BEM-UGM, 15 Januari 2021

- Devi Setiawan, mantan Sekjen LBK Taring Padi Yogyakarta 1998–2000
- Puthut Eko Ariyanto
- Bagus Kris Bawono, adik kandung Danang Ardianta, 14 April 2025
- Laurensius Mayensi
- Achmad Charris Zubair, mantan PU Universum, 18 Januari 2021
- Yayan Sopyan, mantan pegiat BPMFF Pijar, 18–19 Januari 2021
- Ahmad Rapanie, mantan pegiat LPMF Dian Budaya
- Abhisam Demosa, April–Mei 2023
- Edi Sutopo, mantan Mahasiswa IKIP Yogyakarta, 5 Desember 2021

Index

A

- Aan Rusdianto 16, 17, 87
Abhisam Demosa 101, 134, 173
ABRI 10, 26, 33, 34, 37, 38, 40, 45, 49, 78, 83, 85, 91, 106, 109, 113, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 154, 161, 162,
170
Achmad Syukri 147
Administrator 24
Agung “Cungkring” Prihatono 151, 155
Agung Wibowo Budiono 88
Ahmad Rapanie 75, 173
Akademi Pembangunan Masyarakat Desa 37
Aksi Bersama Rakyat Indonesia (ABRI) 161
Akuat 147, 148
Aliansi Jurnalis Independen 24
Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat Universitas Bung Karno (AM-
BR-UBK) 161
Ambara Muji 102
Amerta Kusuma 134
Amien Rais 39, 53, 56
Amin Sayoga 20
Andi Arief 17, 76, 82, 87
Andi Munajat 73
Angga Apip W.S. 50, 56
Anggun 107
Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) 81
Antariksa 45, 172
Antonino Delimas 56, 122
Antonio Rangel 46, 66
Antonius Hendro Rahtomo 122
Anto ‘Profesor’ 70, 151
Anto “Profesor” 107
Antun Joko Susmana 20, 22
APMD 37, 39
Aprisaldi 161
Arya 45, 107, 108
Aryaning Arya Kresna 45

B

- Bacharuddin Jusuf Habibie 132
 Badan Semi Otonom (BSO) 28
 Badrus Salam 73
 Bambang Isti Nugroho 13
 Bambang Subono 13
 BAMPER 161
 Bayu Kusuma 67
 Bejo 107
 Bekti Handoko Dewanto 117, 155
 Bilal 65
 Bimo Petrus 16, 17, 87
 Bonar Tigor Naipospos 13
 Brigade Mahasiswa untuk Pembebasan Rakyat (BAMPER) 161
 BSO 28
 Butet Kartaredjasa 85

C

- Cipayung 68, 81
 Conselho Nacional de Reconstrução de Timor (CNRT/Kongres Nasional
 untuk Rekonstruksi Timor) 141

D

- Damardjati Supadjar 56
 Danang Ardianta 44, 45, 65, 66, 67, 117, 173
 Danuri 76
 Daoed Joesoef 11
 Daru Supriyono 134
 Darwin Nugraha 102
 DEMA-UMSU 161
 Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) 13
 Dewan Mahasiswa dan Rakyat Surakarta (DRMS) 160, 161
 Dewan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (DE-
 MA-UMSU) 161
 Dewan Pelajar Yogyakarta (DPY) 136
 Dhyta Caturani 89, 154
 Dian Budaya 21, 23, 28, 45, 75, 76, 77, 78, 173
 Dita Alangkara 89
 DPY 136, 142
 DRMS 16, 160, 161, 162

E

Edi Sutopo 70, 113, 173
Edris Muhdi 147, 148, 149
Edy Haryadi 20, 22, 76, 81
Elisabet Ida 134
Esti Sri Rejeki 44

F

Fair Total 161
Faisol Reza 16, 17
Faisol Riza 20, 21, 22, 87
FAMI 65
Femi Adiningsih Soempeno 102
Fendry Ponomban 46, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 99, 100, 105, 116, 133, 172
FKMY 13, 14
FMIST 161
FMM 161
Formasta 135
Forum Diskusi Keliling 32
Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) 13
Forum Solidaritas Mahasiswa Aceh di Yogyakarta (Formasta) 135
FPRM 64
Fronpettil 155
Front Aksi Reformasi Total (Fair Total) 161
Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST) 161
Front Mahasiswa Manado (FMM) 161
Front Nasional Pemuda dan Pelajar Timor-Leste (Fronpettil) 155

G

Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesia (GAPCI) 101, 103
GAMRUD 163
GAPCI 101, 103
Gati Andoko 147, 149
Gelar 136
Gendhel 45
Gentong 107
GeRAK 38
Gerakan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (GAMRUD) 163
Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP) 160, 161
Gerakan Mahasiswa Muslim Yogyakarta (GMMY) 142

Gerakan Pelajar Revolusioner (Gelar) 136
 Gerakan Rakyat anti Kekerasan 38
 Gimin 89, 90
 GMIP 160, 161
 GMMY 143
 Golkar 15, 33, 35, 36, 81, 120, 141
 Golongan Karya 10

H

Hamzah Haz 64
 Hanafi Rais 101
 Hariman Siregar 11
 Haris Rusly Moti 25, 46, 55, 66, 68, 69, 70, 78, 81, 85, 87, 99, 100, 140, 172
 Hari Subagjo 73
 Harris Sitorus 20, 22, 24, 64
 Hartono 107, 147
 Hendro “Tuhan” 122, 149, 154
 Herman Hendrawan 16, 17, 87
 Hermawan “Kiki” Sulistyono 121
 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 33, 81
 HMI 25, 32, 33, 81, 113, 146

I

IAIN Sunan Kalijaga 35, 36, 37, 39, 115
 Ibud Sudarmanto 145
 Ignas Nong Mau 65
 Ignatius Mahendra Kusumawardhana 64
 Ikatan Mahasiswa/Pelajar Timor-Timur (Impettu) 139
 Ikhsan 117, 120
 IKIP Yogyakarta 6, 46, 53, 109, 111, 113, 115, 173
 Impettu 139, 140, 153
 International Monetary Fund (IMF) 17
 Irfan Yusuf 101
 Irmawati 44, 45, 46, 68, 69, 70, 85, 87, 99, 100, 172
 Ismail Luthfie 75
 Iwan Dwi Laksono 161
 Iwan Siswanto 75

J

JAKKER 67
 Jamaluddin Ancok 56

Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) 67
Jaringan Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (JKMY) 23, 32
JKMY 23, 32
Juanda 89, 90
Junaidi 147, 149

K

Kabakin 39
KAMADIPA 93, 117
KAMMI 35, 39, 142, 143
Kapalasastra 92
KAPP 24, 25, 26, 27, 30, 49, 64, 78
KAPRI 161
KARAG 117, 145, 146, 147
KARPI 145
KB-UI 154
KBUI 160, 161
Kelompok Studi Sosial Palagan Yogyakarta (KSSPY) 13
Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) 160, 161
Keluarga Mahasiswa Diploma Pariwisata (KAMADIPA) 93, 117
Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Rakyat Lampung (KMPPRL) 160, 161
Keluarga Pencinta Alam Fak. Sastra 92
Kesatuan Aksi Rakyat Gunungkidul (KARAG) 117, 145
Kesatuan Aksi Rakyat Peduli Indonesia (KARPI) 145
Kiasromo 65
KKPY 33, 34
KMAP 34, 36
KMM 161
KMPPRL 160, 161, 162
KNPDI 34
Koento Wibisono 53
Koesnadi Hardjasoemantri 14, 73
KOKAM-UGM 25, 26, 27, 49, 64
Komite Advokasi terhadap Penindasan Pers (KAPP) 24
Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 35
Komite Aksi Pemuda dan Rakyat Indonesia (KAPRI) 161
Komite Anak Bangsa untuk Keprihatinan Nasional (Kabakin) 39
Komite Keprihatinan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KOKAM-UGM) 25
Komite Keprihatinan Pemuda Yogyakarta (KKPY) 33, 34

- Komite Mahasiswa Anti-Penindasan (KMAP) 36
 Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) 160, 161
 Komite Mahasiswa Malang (KMM) 161
 Komite Nasional Perjuangan Demokrasi Indonesia (KNPDI) 34
 Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) 76
 Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia (KPDII) 34
 Komite Perjuangan Demokrasi (KPD) 32
 Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) i, 2, 6, 66, 78, 160, 161
 Komite Perjuangan untuk Reformasi Total (KPRT) 161
 Komite Solidaritas Pembelaan Masyarakat Muslim Kampus 33
 KOMRAD 160, 161, 162
 Komunitas Gampingan 61, 68
 KPD 32
 KPDII 34, 35
 KPRP i, ii, iii, vii, viii, ix, 2, 3, 6, 34, 42, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 126, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 172
 KPRT 161
 Krisna 'Nana' Wijayanto 146
 KSPMMK 33
 Kudatuli 15, 20, 23, 67, 76, 77, 82, 87, 98
 Kyai Muhaimin 85

L

- L.A. Aris Hartono 107
 LBH 112, 147
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 147
 Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) 79
 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) 27
 Leonardus Nugroho Iskandar 16
 Lexy Rambadeta 49, 89
 Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) 145, 162
 Lingkungan Belajar Dialogika 74
 LMND iii, 2, 64, 145, 158, 161, 162, 163, 170
 Lorensius Mayensi 20, 106, 108
 LP3ES 79
 LPM Natas 106

M

Maharani Candra Dewi 46, 66
Mahasiswa Sanata Dharma untuk Demokrasi (SOMASSI) 106
Mahasiswa untuk Reformasi 160, 161
Majalah Mahasiswa Kalpadruma 89
Manik Wijil Sadmoko 44, 69
Mario Viegas Carrascalao 155
Marsis Sutopo 75
Masyarakat Mahasiswa untuk Tragedi Makassar (MAuT) 35
Matheus Dwi Hartanto 90
Mayensi 20, 106, 108, 173
Megawati Soekarnoputri 15
M. Najib Azca 135
Mozes Gatotkaca 111
Mugiyanto 16, 17, 87
Muridan S. Widjojo 33, 35, 37, 39, 40, 49

N

Nezar Patria 16, 17, 76, 82, 87
Nining Wahyuningsih 20, 71, 72, 88
Nor Hiqmah 20

P

P3Y 143
Panjang 107
Partai Komunis Indonesia (PKI) 7
Partai Rakyat Demokratik (PRD) 15
PBB 141, 155
PBHI 147
Pedronov Loivacho Nelukala Vieira 93
Perjuangan Pemuda untuk Demokrasi (PPD) 32, 34
Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (P3Y) 143
Pijar 23, 25, 28, 35, 44, 65, 73, 74, 77, 78, 132, 134, 173
PKI 7, 9, 38, 93
PPBI 15
PPD 23, 32, 33, 34, 38, 171
PPP 15, 33, 36, 37, 38, 150
PPPY 37, 39, 40
Pramoedya Ananta Toer vi, 13, 21, 79
Pratikno 7, 8, 9, 13, 172

Presidente Komite Permanente (Ketua Komite Permanente) 155
 Prijo Wasono 88, 89, 90
 Provedor de Direitos Humanos e Justiça de Timor Leste (Ketua Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Timor Leste) 155
 Purbo 89
 Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY) 37, 39, 40
 Pusat Studi Massa Kelas Demokrasi 143
 Puthut Eko Ariyanto 44, 70, 134, 173

R

Raharja Waluya Jati 16, 87
 Rahung "Coki" Nasution 155
 Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste (Renetil) 155
 Retorika 10, 28
 Revisond Baswir 56
 Rheinhard Sirait 161
 Ricardo Simarmata 20
 Ridaya La Ode Ngkowe 50
 Riswanda Imawan 56
 Romo Yatno 85
 Roni Hasan 45, 172
 Roy Septa Abimanyu 161
 Ryan Wuryanto 145

S

Sabinus Moa 134, 148
 Sampuran 44
 Samsul Prihatmo 21, 88
 Sastro Gempur 6, 92, 93, 96, 111, 114, 117
 SDOOT 39
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Syariah Banking Institute (STIE-SBI) 32
 Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) 25
 Serikat Mahasiswa Makassar (SMM) 161
 Serikat Mahasiswa Palembang untuk Demokrasi (SMPD) 161
 Serikat Mahasiswa Yogyakarta (SMY) 13
 Serikat Pengamen Indonesia (SPI) 68, 108, 137
 Serikat Tani Nasional 151
 Sidang Istimewa Rakyat Yogyakarta 142
 Simeon 154
 Sinnal Blegur 161
 Sintesa 23, 29, 77

Sintia Novi Arthayani 107
 SIRY 142
 Siti Rubaidah 20
 SMID 15, 17, 34, 67, 76, 77, 82
 SMM 161
 SMPD 161
 SMPR-UNS 161
 SMPTA-UMS 161
 SMS 161
 SMUR 161
 SMY 13, 14, 77
 Soeharto ix, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 26, 40, 45, 46, 47, 53, 56, 61, 64, 65, 68,
 78, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 99, 101, 106, 113, 123, 124, 126, 132, 133,
 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 157, 160, 170, 172
 Soerjadi 15
 Solidaritas Demokrasi untuk Orang-orang Tertindas (SDOOT) 39
 Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi 76
 Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR-UNS) 161
 Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Air (SMPTA-UMS) 161
 Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS) 161
 SOMASSI 70, 106, 107, 144
 SPI 16, 65, 68, 108, 109, 134, 137
 SPRIM 15
 STIE-SBI 23, 32
 STN 15, 22, 151, 152
 Sugeng Bahagijo 73, 74
 Sukarno 7, 8, 11
 Sutrisno 145
 Suyat 16, 17, 88
 Syahrir 11
 Syukri 147, 148, 150

T

Taring Padi 61, 173
 Tegaklima 76, 77, 81
 Terry 44
 T. Jakob 53
 Toni 147, 148, 149
 Tony "Cikru" Heru Sudigdo 155
 Tri Agus Susanto Siswomihardjo 65

U

- UAJY 32, 39, 40, 67, 89, 110
 UII 13, 23, 32, 35, 36, 39, 40, 61, 67, 70, 89, 101, 117, 146, 148
 UNAMET 155
 United Nations Mission for East Timor (UNAMET) 155
 Universitas Atma Jaya (UAJY) 32, 67
 Universitas Sanata Dharma (USD) 6, 23, 32, 67
 USD 6, 23, 32, 67, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 117

V

- Veronica Kusuma 134
 Virgilio Silva Guterres 155

W

- Wahyu Adi Prabowo 45
 Wibowo Arief 133
 Widi Asmara 92
 Wijaya Harjanata 45, 172
 Wiji Thukul vi, 17, 88
 Wondo 146

X

- Xanana Gusmao 141, 155

Y

- Yanuar Sidharta 101
 Yayan Sopyan 73, 74, 75, 173
 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 16
 Yerry Nico Borang 117, 121
 Yohanita Irene 107
 Yossy Suparyo 151
 Yoyok 64
 Yusuf Mohammad 149

Z

- Zaenufi 147
 Zul Amrozi 17
 Zulfan Kurniawan 101
 Zul Terry Apsupi 44

Meletakkan KPRP dalam konteks ber-ada-nya adalah usaha memahami mengapa bisa muncul "fenomena" KPRP dengan segala sifat dan wataknya. Kemunculan KPRP hanya sekitar tiga bulan sebelum Soeharto mundur dari tampuk kuasa. Namun, betapa KPRP seolah mampu "mewakili" organisasi radikal—sebut saja PRD—yang saat itu sedang mengalami "perburuan kedua", sehingga tak mampu berbuat banyak dalam konteks terjadinya "Reformasi 1998". Nama KPRP pun melejit begitu cepat di Yogyakarta, bahkan juga diperhitungkan dalam konstelasi pergerakan di bawah kepeloporan mahasiswa dalam konteks nasional.

Melejitnya nama dan pengaruh KPRP itu tentu tak bisa dilepaskan dari sifat, watak, serta metode perlawanan yang dipilih dengan sadar: melawan represi kekerasan aparat dengan kekerasan pula. Hal itu tentu tak tiba-tiba jatuh dari langit. Ia muncul seiring proses menyejarah pendahulunya. Maka itu, untuk memahami KPRP yang baru muncul pada Februari–Maret 1998, kita harus menarik pemahaman sampai Peristiwa 27 Juli 1996, bahkan mesti kita rentangkan hingga akhir 1980an.

